

Jurnalis Lingkungan di Indonesia

(Profil, Pengalaman Kekerasan dan Perlindungan Negara)



**ALIANSI
JURNALIS
INDEPENDEN**
Alliance of Independent Journalist

Jurnalis Lingkungan di Indonesia
(Profil, Pengalaman Kekerasan dan Perlindungan Negara)

Penulis:

Masduki
Ahmad Arif
Anastasya Andriarti
Febrina Galuh Permanasari

Editor:

Masduki

Tim Sekretariat:

Arie Budi Kusumaningrum
Putri Adenia

Desain dan tata letak:

Ganachatta Art Studio

Diterbitkan pertama kali oleh:



Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
Jl.Kembang Raya No. 6 Kwitang Senen Jakarta Pusat 10420
Telp. +62 21 315 1214. Fax 3151261
Email: sekretariat@ajindonesia.or.id Web: www.aji.or.id

Jurnalis Lingkungan di Indonesia
(Profil, Pengalaman Kekerasan dan Perlindungan Negara)

128 hlm. : 21 cm x 29,7 cm Cet. I, Desember 2025 Apabila di dalam buku ini terdapat kesalahan cetak/produksi atau kesalahan informasi, mohon hubungi penerbit.

KATA PENGANTAR

KETUA UMUM AJI INDONESIA

Membuka Kotak Pandora

Sebuah Pengantar untuk Jurnalisme Lingkungan

Jurnalisme lingkungan di Indonesia bukan sekadar liputan tentang hutan yang gundul, sungai tercemar, atau satwa yang terancam punah. Ia adalah kerja jurnalistik yang berdiri di persimpangan kepentingan ekonomi, kekuasaan politik, hak asasi manusia, dan masa depan generasi.

Indonesia kerap disebut sebagai paru-paru dunia. Namun di balik sebutan itu, realitas menunjukkan hutan yang ditebang demi ekspansi perkebunan, banjir besar yang berulang, serta kerusakan ekosistem yang meninggalkan luka panjang bagi manusia dan alam. Dalam konteks inilah jurnalis lingkungan dituntut untuk tetap kritis dan berani—meski harga yang harus dibayar sering kali tidak murah.

Di negara dengan kekayaan alam melimpah seperti Indonesia, jurnalis lingkungan memegang peran strategis sekaligus berisiko tinggi. Mereka membuka informasi yang kerap disembunyikan, dipoles, atau disederhanakan oleh narasi resmi pembangunan. Peliputan isu lingkungan—terutama di wilayah industri ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan skala besar, kehutanan, dan energi—menempatkan jurnalis dalam posisi rawan. Selain menghadapi medan geografis yang sulit dan keterbatasan sumber daya, mereka juga berhadapan dengan ancaman kekerasan fisik, kriminalisasi hukum, intimidasi, hingga serangan digital yang terorganisir. Dalam banyak kasus, ancaman ini datang dari jejaring kepentingan yang melibatkan korporasi, aparat keamanan, elite lokal, hingga aktor politik nasional.

Ironisnya, perlindungan terhadap jurnalis lingkungan masih sangat minim. Negara kerap hadir terlambat—atau bahkan absen—dalam menjamin keselamatan mereka. Pengelola media pun belum sepenuhnya menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas melalui kebijakan redaksi, dukungan hukum, dan sistem keamanan digital. Akibatnya, jurnalis lingkungan sering bekerja dengan risiko tinggi tanpa jaring pengaman yang memadai.

Padahal, jurnalis lingkungan adalah bagian penting dari kerja pembelaan hak asasi manusia. Lingkungan hidup bukan isu sektoral, melainkan fondasi pemenuhan hak-hak dasar warga negara: hak atas air bersih, pangan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan lingkungan yang aman. Ketika jurnalis melaporkan pencemaran sungai, konflik lahan masyarakat adat, atau dampak sosial-ekologis proyek ekstraktif, mereka sedang menjalankan fungsi kontrol sosial dan memastikan hak publik atas informasi.

Tantangan tersebut kian kompleks di era digital. Selain ancaman di lapangan, jurnalis menghadapi peretasan akun, doxing, kampanye kebencian, pelaporan massal, hingga kriminalisasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Serangan ini dirancang untuk membungkam kritik dan menciptakan efek jera, baik bagi individu maupun redaksi.

Namun di balik risiko itu, jurnalisme lingkungan memiliki potensi besar. Di tengah krisis iklim, bencana ekologis yang berulang, dan meningkatnya kesadaran publik, liputan lingkungan yang kuat—berbasis data dan berpihak pada kepentingan publik—dapat mendorong perubahan kebijakan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mengangkat suara komunitas yang terpinggirkan.

Potensi ini hanya dapat terwujud jika jurnalis bekerja dalam ekosistem yang mendukung: kebijakan redaksi yang sensitif terhadap risiko, pelatihan keselamatan fisik dan digital, dukungan hukum, serta solidaritas antarjurnalis dan organisasi profesi.

Buku di tangan Anda ini membuka jendela—bahkan kotak pandora—tentang jurnalisme lingkungan di Indonesia. Di dalamnya, pembaca akan menemukan sejarah jurnalisme lingkungan, peran dan pengalaman pewartanya, kekerasan yang mereka hadapi, serta pertanyaan mendasar: sejauh mana negara benar-benar hadir melindungi mereka?

AJI menyampaikan terima kasih kepada para periset dalam buku ini—Prof. Masduki, Ahmad Arif, Febrina Galuh, dan Anastasya Andriarti—serta dukungan yang diberikan oleh Kemitraan. Semoga buku ini memperkaya khazanah jurnalisme di Indonesia dan bermanfaat luas bagi publik.

Nany Afrida

Ketua Umum AJI Indonesia

PENGANTAR TIM PENELITI

Laporan riset bertajuk: Jurnalis Lingkungan di Indonesia: profil dan pengalaman atas kekerasan dan perlindungan negara ini hadir ke hadapan pembaca dan publik sebagai bagian dari respon atas keprihatinan terjadinya berbagai ancaman terhadap peliput isu lingkungan di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Peliput isu lingkungan hidup terutama di kawasan yang menjadi lokasi industri ekstraktif rawan mengalami kekerasan fisik dan digital, sedangkan perlindungan dari pemerintah dan pengelola media masih minim. Kerangka pikir mengapa riset ini penting karena jurnalis lingkungan adalah aktivis HAM. Isu lingkungan bertalian erat dengan hajat hidup orang banyak, dan hak konstitusional warga negara untuk mengetahui dinamika pembangunan lingkungan yang adil dan aman.

Adapun metode pelaksanaan riset, khususnya pengumpulan data riset terdiri dari: studi pustaka, yang dilakukan untuk mengidentifikasi lima materi pokok: referensi tentang situasi jurnalis yang memiliki kerentanan yang khas pada peliputan isu lingkungan; referensi tentang pengalaman jurnalis Indonesia dalam meliput isu lingkungan pada lima tahun terakhir; referensi tentang kapasitas/pengetahuan dan kecakapan digital jurnalis secara umum dan relevansinya dengan peliputan isu lingkungan; referensi tentang hubungan perusahaan media dengan jurnalis terkait peliputan isu lingkungan termasuk tentang tata cara melakukan peliputan investigasi isu lingkungan serta perlindungan; regulasi atau kebijakan pemerintah terkait lingkungan dan perlindungan terhadap jurnalis peliput isu lingkungan. Lebih jauh tim juga mengkaji beberapa database kasus kekerasan jurnalis lingkungan dari AJI atau lembaga lainnya dan mengkaji regulasi yang terkait UU lingkungan hidup, ITE, UU Pers dalam perspektif HAM; pemetaan argumentasi penyebab kekerasan struktural terhadap jurnalis seperti fenomena swasensor sebagai risiko pekerjaan, atau menganggap tidak akan disetujui untuk terbit karena ada intervensi negara dan/atau ketergantungan dengan bisnis.

Berbekal studi pustaka di atas dan kajian atas materi regulasi yang relevan, tim peneliti menyusun pertanyaan untuk pelaksanaan survei *purposive* dan wawancara mendalam. Penyusunan instrumen survei dilakukan melalui suatu workshop yang dilakukan secara daring sebanyak satu kali di awal sebelum survei dilakukan, untuk mendapatkan *brainstorming* isu soal lingkungan dan konteks HAM. Pesertanya ada sekitar 15 orang, yang mencakup tim Elevate-USAID, tim periset dan dua narasumber ahli. Usai workshop, peneliti telah menyusun instrumen survei berupa kuesioner. Sebelum kuesioner dibagikan, peneliti melakukan ujicoba pengisian instrumen melibatkan 5-10 anggota AJI dalam upaya mencoba keseluruhan kuesioner untuk dilihat validitas dan kesesuaiannya.

Pasca workshop, peneliti melakukan pengumpulan data lapangan dengan metode survei dan wawancara mendalam sebagai berikut: survei dilakukan secara daring melalui metode *purposive sampling* dengan target 100 responden jurnalis lingkungan yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan merujuk tiga kriteria: Jurnalis yang pernah membuat liputan investigasi dalam satu tahun terakhir; Jurnalis

yang pernah membuat minimal dua liputan kasus lingkungan in-depth dalam satu tahun terakhir; Jurnalis yang sekurang-kurangnya pernah membuat liputan isu lingkungan (bentuk apapun) secara reguler atau minimal 12 kali atau topik dalam setahun. Dalam kategori ini, akan ada juga jurnalis yang sebelumnya aktif memberitakan kasus lingkungan dan kemudian tidak melakukan lagi dalam setahun terakhir (misalnya karena ancaman tertentu/*self-censorship*).

Kuesioner survei dibagikan melalui tautan *Google Form* oleh AJI kepada rekan-rekan jurnalis melalui berbagai saluran media digital terutama *WhatsApp*. Target sampel tiap provinsi mempertimbangkan keterwakilan jumlah jurnalis perempuan. Pengolahan data dilakukan dengan dua cara, yaitu kuantitatif menggunakan excel dan SPSS. Data kualitatif diolah berdasarkan hasil temuan menarik dalam wawancara mendalam secara daring dan luring dengan menyasar tiga kelompok target, yaitu jurnalis editor, jurnalis reporter dan perwakilan organisasi jurnalis/media masing-masing 5 orang. Terima kasih yang sebesar besarnya kami sampaikan kepada Pengurus AJI Indonesia dan Tim Elevate/Kemitraan atas kepercayaan kepada kami untuk meneliti.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA UMUM AJI INDONESIA.....	I
PENGANTAR TIM PENELITI	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR GAMBAR.....	IX
DAFTAR DIAGRAM.....	X
 BAB I MEMAHAMI JURNALISME LINGKUNGAN	 1
A. Perkembangan Jurnalisme	1
B. Jurnalisme Lingkungan	4
C. Sejarah dan Ruang Lingkup	6
D. Peran Jurnalis Lingkungan	9
Pertama, liberal pluralism.	9
Kedua, gatekeeper approach.	9
Ketiga, media sebagai public sphere.	10
E. Kekerasan Jurnalis Lingkungan	10
 BAB II SURVEI: DEMOGRAFI, PENGALAMAN DAN DUKUNGAN	 16
A. Demografi Jurnalis Lingkungan	16
1. Gender	16
2. Usia	17
3. Provinsi Domisili	18
4. Pendidikan Terakhir	19
5. Lama Bekerja Sebagai Jurnalis (Sepanjang Karier)	20
6. Status Kepegawaian di Tempat Kerja Saat Ini.....	21
7. Posisi/Jabatan Saat Ini.....	21
8. Afiliasi Dalam Asosiasi Jurnalis	22
9. Asosiasi Jurnalis.....	22
10. Jenis Media Tempat Bekerja Saat Ini.....	23
B. Pengalaman Liputan Jurnalistik	24
1. Wilayah liputan	24
2. Jenis pelatihan jurnalistik yang pernah diikuti	24
3. Spesialisasi liputan yang dikerjakan.....	25
4. Seberapa sering Anda meliput isu lingkungan?	25
5. Topik atau isu lingkungan yang pernah diliput selama setahun terakhir.....	26
6. Bagaimana Anda mendeskripsikan diri Anda dengan tema yang diliput?	27
7. Faktor mempengaruhi liputan responden sebagai jurnalis lingkungan	28
8. Apa tantangan Anda dalam meliput isu lingkungan?	29
C. Kekerasan Fisik dan Digital.....	29
1. Apakah Anda pernah mengalami kekerasan fisik selama melakukan liputan tentang isu lingkungan?	29

2. Siapa pelaku kekerasan/serangan fisik tersebut?	30
3. Kekerasan digital	31
4. Siapa pelaku kekerasan/serangan digital tersebut?	32
5. Apakah Anda pernah mengalami kekerasan lain di luar fisik dan digital selama melakukan liputan tentang isu lingkungan?	33
6. Siapa pelaku kekerasan lain tersebut?	34
7. Bentuk/jenis kekerasan yang dialami jurnalis perempuan	36
D. Dukungan dan Hambatan	37
1. Pemberi dukungan ketika jurnalis mengalami kekerasan	37
2. Apa saja bentuk hambatan di dalam redaksi selama meliput isu lingkungan?	38
3. Apa saja bentuk dukungan yang sudah tersedia bagi jurnalis lingkungan?	39
4. Apa pandangan Anda terhadap dukungan dalam liputan lingkungan dari pemangku	39
5. Klarifikasi, tambahan informasi, dan pengalaman terkait kekerasan selama liputan yang belum ditanyakan dalam survei di atas	40
BAB III WAWANCARA: DARI KEKERASAN FISIK HINGGA SWASENSOR	42
A. Jurnalis: Hambatan Kultural dan Struktural	42
Pemahaman Terhadap Isu Lingkungan	42
Alasan Memberitakan Isu Lingkungan	45
Tantangan Liputan Isu Lingkungan Di Media	48
Meliput Isu Lingkungan Bagi Jurnalis Perempuan	56
Dukungan Media Untuk Advokasi Kekerasan Jurnalis	57
Swasensor Berita di Redaksi Media	60
Jurnalis Menghadapi Praktek Swasensor	63
Pengalaman “Menyerah” Kepada Kepentingan Bisnis	65
Posisi Kerja dalam Redaksi Media	66
Kapabilitas yang Diperlukan untuk Jurnalis Lingkungan	67
B. Editor: Swasensor dan Tanggungjawab Negara	69
Mengapa isu lingkungan penting diliput?	69
Urgensi Isu Lingkungan di Redaksi Media	72
Kebijakan Redaksi Terhadap Isu Lingkungan	75
Liputan Kolaborasi Isu Lingkungan	80
Mitigasi Redaksi Terkait Keamanan Jurnalis	87
Praktek Swasensor di Redaksi Media	88
Prinsip Pagar Api Redaksi dan Bisnis	90
BAB IV REFLEKSI DAN REKOMENDASI	95
Meliput Alam Tindakan Berisiko	95
Swa-sensor: Kekerasan Struktural Tak Terlihat	97
Rekomendasi: Memperbaiki Ekosistem	99
DAFTAR PUSTAKA	102
INDEKS BUKU	106

BIODATA PENELITI/PENULIS	108
LAMPIRAN	110
Daftar Pertanyaan/Kuisisioner Survei	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pergeseran Budaya Kerja Jurnalistik Di Indonesia	4
Tabel 2 Kekerasan Terhadap Jurnalis Indonesia (2017-2021)	12
Tabel 3 Kategori Gender	16
Tabel 4 Kategori Usia	17
Tabel 5 Provinsi Domisili	18
Tabel 6 Pendidikan Terakhir	19
Tabel 7 Lama Bekerja Sebagai Jurnalis	20
Tabel 8 Status Kepegawaian Di Tempat Kerja Saat Ini	21
Tabel 9 Posisi/Jabatan Saat Ini	21
Tabel 10 Keanggotaan Pada Asosiasi Jurnalis	22
Tabel 11 Jenis Media Tempat Bekerja	23
Tabel 12 Wilayah Liputan	24
Tabel 13 Jenis Pelatihan Jurnalistik Yang Diikuti	24
Tabel 14 Spesialisasi Liputan Yang Dikerjakan	25
Tabel 15 Frekuensi Meliput Isu Lingkungan	25
Tabel 16 Topik Lingkungan Yang Pernah Diliput Setahun Terakhir	26
Tabel 17 Deskripsi Diri Responden Terkait Tema Yang Diliput	27
Tabel 18 Tantangan Dalam Meliput Isu Lingkungan	29
Tabel 19 Nilai Rata-Rata Responden Untuk Kekerasan Fisik	30
Tabel 20 Pelaku Kekerasan Fisik	30
Tabel 21 Nilai Rata-Rata Responden Untuk Kekerasan Digital	31
Tabel 22 Pelaku Kekerasan Digital Terhadap Jurnalis Lingkungan	32
Tabel 23 Nilai Rata-Rata Responden Untuk Kekerasan Lain	33
Tabel 24 Pelaku Kekerasan Lain Di Luar Fisik Dan Digital	34
Tabel 25 Gender Responden Yang Pernah Mengalami Kekerasan	36
Tabel 26 Pihak Yang Memberikan Dukungan Saat Jurnalis Mengalami Kekerasan	37
Tabel 27 Hambatan Di Dalam Redaksi Selama Meliput Isu Lingkungan	38
Tabel 28 Dukungan Yang Sudah Tersedia Bagi Jurnalis Lingkungan	39
Tabel 29 Pandangan Terhadap Dukungan Yang Diberikan Oleh Pemangku Kepentingan	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Interelasi Ruang Publik dan Jurnalisme Lingkungan	10
--	-----------

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Pembagian Responder Berbasis Jenis Kelamin.....	16
Diagram 2 Persentase Usia Responden.....	17
Diagram 3 Tingkat Pendidikan Responden	19
Diagram 4 Lama Bekerja Jurnalis	20
Diagram 5 Proporsi Afiliasi Responden Kepada Asosiasi Jurnalis	22
Diagram 6 Kategori Media Tempat Bekerja Responden	23
Diagram 7 Wilayah Liputan Jurnalis Responden.....	24
Diagram 8 Persentase Tema Pilihan Liputan	27
Diagram 9 Gambaran Pengalaman Kekerasan.....	35
Diagram 10 Pengalaman Kekerasan dari Sisi Gender Responden.....	36

BAB I

MEMAHAMI JURNALISME LINGKUNGAN

A. Perkembangan Jurnalisme

Jurnalis dan organisasi berita di Indonesia dalam 25 tahun pasca reformasi politik 1998 dan pasca digital dihadapkan dengan krisis politik, ekonomi dan keamanan digital yang terkait kerja berita, termasuk jurnalis peliput isu lingkungan. Dalam konteks HAM, krisis ini dipandang sebagai ancaman yang serius bagi keberadaan media di masa depan sebagai lembaga sosial, jurnalis sebagai pembela HAM (human right defender). Laporan ini mengajak pembaca dan semua pihak terkait memahami bagaimana peta kondisi jurnalis lingkungan, bagaimana jurnalis memandang situasi media dan profesi mereka sendiri dan bagaimana mereka merespon segala risiko dan ketidakpastian menjalankan tugas selaku juru bicara publik. Risiko disini merujuk pada serangkaian gejala perubahan politik, ekonomi, teknologi dan budaya yang mengancam keberlanjutan jurnalis sebagai aktor dan jurnalisme sebagai lembaga sosial yang vital bagi demokrasi dan HAM.

Dalam setiap perubahan peradaban terutama struktur ekonomi dan politik, akan ada beberapa sub-sektor yang mengalami perubahan struktural: perubahan hubungan sosial negara-masyarakat-pelaku ekonomi yang akan membawa risiko perubahan pula pada budaya kerja jurnalistik dan keamanan jurnalis. Manifestasi dan konsekuensi yang terkait dengan risiko-risiko ini antara lain belum tersedianya ruang kebebasan memberitakan isu publik dan keselamatan jurnalis, lemahnya prakarsa pendidikan jurnalisme lingkungan dan standar baru kompetensi pekerja berita, model distribusi berita, dll.

Merespon intensitas risiko tinggi atas kerja jurnalistik lingkungan, tahun 2024, UNESCO membuka lowongan proposal riset terkait perlindungan jurnalis lingkungan di dunia yang juga mengkaji fenomena impunitas atas pelaku kekerasan. Riset UNESCO dan Internasional Federation of Journalist (IFJ) sejak 2009 menemukan sedikitnya 204 jurnalis lingkungan mengalami tekanan fisik dan tuntutan hukum, antara lain dari pemerintah (93), dan di Asia Pasifik setidaknya ada 39 jurnalis masuk penjara. Pasal karet pencemaran nama baik umum digunakan oleh otoritas untuk menekan jurnalis. Di luar tekanan hukum, jurnalis mendapat ancaman pemutusan hubungan kerja, sehingga memaksa mereka melakukan swasensor atas berita yang berisiko pada perusahaan media setempat.

Jurnalis, organisasi berita, dan lembaga pendidikan jurnalisme sedang menghadapi perubahan multidimensi dan eskalasi tingkat risiko sehingga memunculkan narasi kritis di kalangan para sarjana media. Para ahli komunikasi menyatakan indikasi "kematian" atau "akhir" jurnalisme (Charles & Stewart, 2011; McChesney & Nichols, 2010), dan beberapa publikasi menyerukan "pembangunan kembali" jurnalisme dengan alam pikiran baru atau minimal memperbaharui, memikirkan kembali (Anderson, 2013; Boczkowski & Anderson, 2017; Downie & Schudson, 2009; Peters & Broersma, 2013).

Secara global di negara pasca otoriter, rezim politik baru terlibat merekayasa regulasi media termasuk kegiatan jurnalisme kritis agar pro-kekuasaan dan memaksakan pengawasan peraturan yang berat (Abramowitz, 2017; George, 2019). Misalnya di Indonesia, ada gejala kuat bahwa pemerintah melalui aparat hukum hingga pendengung (buzzer) mengintensifkan tindakan represif atas individu jurnalis lingkungan yang kritis, baik melalui pengaduan ke lembaga peradilan maupun doxing di media sosial.

Sampai laporan ini dibuat, ada banyak tempat berbahaya bagi jurnalis anti-korupsi politik, pelanggaran HAM dan lingkungan. Situasi ini juga dipantau organisasi internasional lain, seperti UNESCO dan International Federation of Journalist (IFJ), melalui indeks, kampanye perlindungan jurnalis dan anti impunitas para pembunuh.

Laporan ini berangkat dari tesis urgensi otonomi kerja jurnalisme lingkungan, yang dapat dibagi menjadi dua: internal dan eksternal. Otonomi internal berhubungan dengan kebebasan yang dialami jurnalis sementara otonomi eksternal berdasarkan pada kondisi luar yang mempengaruhi jurnalis untuk melakukan pekerjaan mereka. Otonomi pers seringkali diasosiasikan dengan otonomi editorial, yang berhubungan dengan pengaruh internal maupun eksternal. Studi tentang otonomi menyebutkan bahwa kondisi ini sangat penting karena pengaruhnya pada kreativitas (Fak & Kosfeld, 2006) terhadap bagaimana jurnalis memenuhi tanggung jawabnya, keamanan kerja dalam kontrol sosial yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyajikan kasus dan pendapat mereka. Otonomi jurnalis juga kondisi yang mutlak ada ketika jurnalis harus memberikan berita lingkungan yang akurat dan berimbang (Kovach & Rosenstiel, 2001).

Otonomi juga berhubungan dengan sejarah, kondisi sosial dan kebijakan politik. Di negara-negara barat, situasi ini lebih mudah direalisasikan karena sejarah panjang kebebasan pers, sementara negara-negara yang lama dikuasai oleh pemerintahan otoriter, kenyataan ini lebih sulit karena pengaruh pemerintah yang kuat baik dari segi ekonomi maupun politik. Pada perkembangannya, otonomi jurnalis adalah proses negosiasi panjang di setiap media pemberitaan (Sjovaag, 2013). Akibat sulitnya mencapai derajat tinggi otonomi pemberitaan, konsep ini hanya sampai pada tahap harapan, dan tidak menjadi kenyataan (Deuze, 2011). Pada dasarnya, jurnalis selalu menghadapi tekanan berbagai pihak, kelompok maupun pemilik media di tempat mereka bekerja (Tapsell, 2012).

Kebebasan pers dan apresiasi negara atas jurnalis sebagai pekerja HAM sebagai prakondisi otonomi jurnalis bukan suatu yang otomatis ada. Ia bertalian dengan sejarah politik dan kebijakan media jurnalisme di suatu negara. Sebagai contoh, di Inggris, nama penting di belakang pemahaman kebebasan pers, seperti John Milton tercatat aktif mempromosikan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi sejak tahun 1644 dengan memprotes kebijakan sensor yang dilakukan lembaga tertentu sebelum suatu berita mendapatkan izin untuk bisa dicetak. Selain itu, melalui bukunya *Areopagitica*, Milton menyebutkan alasan pentingnya kebebasan pers karena memungkinkan pembaca bisa memilih dan memilah berita. Restriksi

berita harusnya datang dari pembacanya, bukan dari mereka yang memegang pemerintahan dan restriksi kebebasan pers dan berekspresi tidak akan efektif karena pada dasarnya masyarakat akan mencari bentuk lain baik melalui kesenian, agama, dll.

Pemikiran ini kemudian diterapkan di Perancis melalui *Declarations of the Rights of Mans and of the Citizens* pada tahun 1789 dan pada tahun 1791 di Amerika, melalui Bill of Rights yang melindungi masyarakat Amerika dalam kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan memeluk agama masing masing. Sementara itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mensahkan Artikel 19 pada tahun 1948 yang pada intinya sama, dengan fokus pada deklarasi kebebasan, hak untuk mencari, untuk menerima dan memberikan informasi. Seiring dengan pemenuhan hak-hak publik ini, beberapa lembaga aktif memonitor kebebasan pers di dunia, antara lain: *Reporters san Frontiers (RSF)* atau reporter tanpa batas yang berbasis di Paris, Perancis dan Freedom House (FH), organisasi nirlaba yang berdiri pada tahun 1941 dan berbasis di Washington DC, Amerika Serikat. Dua lembaga ini mengukur kebebasan pers dari konteks yang berbeda. RSF mengukur kebebasan pers berdasarkan pada kasus-kasus yang menimpa jurnalis baik berupa intimidasi, kekerasan, maupun pelecehan. Sementara itu FH mengukur kebebasan pers dari segi ekonomi dan politik. Isu yang mendapat perhatian antara lain soal keamanan kerja jurnalis peliput lingkungan.

Disrupsi teknologi produksi dan distribusi berita pasca digital berpengaruh, bukan hanya pada budaya kerja itu sendiri tetapi tuntutan kompetensi profesi, membangun interaksi dengan khalayak hingga model bisnis korporasi. Sikap pemilik media semakin menjadi faktor penentu orientasi atau arah kerja, di samping keberadaan kode etik dan regulasi formal. Terlihat bahwa otonomi jurnalis makin sempit dan peluang kerja jurnalis dengan keterampilan analog makin tipis, namun menarik dicatat bahwa publik masih percaya bahwa media massa mampu menjadi pilar keempat demokrasi. Sebaliknya, mereka skeptis terhadap pilar yang lain: pemerintah atau parlemen, dan lembaga peradilan.

Merujuk Masduki & Muchtar (2021), persepsi jurnalis tentang pergeseran budaya kerja jurnanisme di Indonesia pasca 1998 dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 1
Pergeseran Budaya Kerja Jurnalistik di Indonesia

Orientasi dan Aktor	Implikasi	Lingkungan Makro
- Dari “jurnalisme pembangunan” di era Orde Baru ke jurnalisme komersial dan publik. - Dari pemerintah ke pemilik modal dan publik.	- Kompetensi baru: akademik jurnalistik dan penguasaan teknologi digital. - Lingkungan kerja baru dari <i>single player</i> ke <i>multiplayer</i>.	- Perubahan sistem politik dari otoriter ke demokrasi. - Revolusi teknologi dari analog ke digital. - Disrupsi teknologi atas budaya kerja jurnalis. - Perubahan aspirasi publik.

(Sumber: diolah dari berbagai sumber bacaan)

B. Jurnalisme Lingkungan

Jurnalisme adalah bidang disiplin dalam mengumpulkan, memastikan, melaporkan dan menganalisis informasi yang dikumpulkan terhadap suatu kejadian aktual. Orang yang menjalankan kegiatan jurnalistik disebut jurnalis. Aktivitas utama dari jurnalisme adalah pelaporan kejadian merujuk siapa, apa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana. (dalam istilah jurnalistik dikenal dengan 5W+1H atau *What, Who, Where, When, Why and Who*) dan juga menjelaskan kepentingan dan akibat suatu peristiwa. Hakikat utama jurnalisme secara umum ialah menyediakan berita yang komprehensif (Kovach dan Rosenstiel, 2001). Sebagai muaranya, informasi mampu memberikan gambaran pola pikir atau mendidik masyarakat untuk mengatur hidupnya secara harmonis. Hal ini sebagai tuntutan perluasan kebutuhan ruang dan waktu dalam masyarakat. Dalam hal ini, praktik jurnalisme harus memperhatikan penerimaan khalayak diiringi tanggung jawab etis.

Jurnalisme lingkungan secara teknis didefinisikan sebagai proses kerja pengumpulan, verifikasi, distribusi dan penyampaian peristiwa menjadi berita terbaru berkaitan dengan fenomena, kecenderungan, dan permasalahan masyarakat, yang berhubungan dengan dunia non-manusia di mana manusia berinteraksi di dalamnya.

Mocatta (2024) melihat jurnalisme lingkungan sebagai pusat beragam kepentingan ekonomi, politik dan sosial yang membentuk dilema: memenuhi kebijakan politik lingkungan yang pro oligarki atau menjaga kewarasan dan nilai pelestarian lingkungan. Jurnalisme lingkungan bertitik tekan pada konflik atau situasi lingkungan dengan cara menyajikan; (1) informasi yang relevan dengan latar belakang kasus lingkungan, (2) materi berita yang menjernihkan situasi (3) memperhatikan risiko/dampak lebih lanjut berita lingkungan atas perubahan kebijakan, dll. Peran

jurnalis melingkupi empat klaster: *monitorial, facilitative, collaborative, radical*. Konflik kepentingan oleh media dan jurnalis kerap terjadi, sehingga merujuk Anderson (1997) jurnalis lingkungan wajib memiliki pengetahuan lingkungan dan nilai budaya dari masyarakat atau kasus yang dia liput.

Pada prinsipnya jurnalisme lingkungan sama formatnya dengan jurnalisme yang lain. Namun, ia fokus ke isu sentral lingkungan, dan menitikberatkan peliputan dan produksi teks berita pada realitas lingkungan seperti: kerusakan akibat ulah tangan manusia (pencemaran, banjir, tanah longsor, penggundulan hutan), kearifan lokal, konservasi, limbah, penggunaan sumber daya alam (Abrar, 1993). Sikap yang harus dimiliki jurnalis pengusung jurnalisme lingkungan (Agustina, 2022) meliputi: (1) Pro Keberlanjutan: lingkungan hidup harus dapat dinikmati oleh lintas generasi. (2) Biosentris: berpusat pada kelangsungan, pembangunan pun dapat disesuaikan dengan lingkungan hidup sehingga tidak mengganggu ekosistem. (3) Pro Keadilan: Berpihak pada korban/lemah, agar mereka mendapatkan akses setara atas lingkungan yang bersih, sehat dan dapat terhindar dari dampak negatif kerusakan lingkungan. (4) Profesional: menguasai materi dan isu-isu lingkungan, patuh kaidah-kaidah jurnalistik, menghormati etika profesi, dan menaati hukum.

Semaraknya jurnalisme lingkungan seiring dengan gerakan peduli lingkungan dan diksi lingkungan sudah muncul sejak abad ke 20. Isu teknologi nuklir, interelasi alam, pengetahuan dan kehidupan manusia atau *Silent Spring* mewarnai perdebatan di tahun 1950-an di dunia. Dalam perspektif geografis, jurnalisme lingkungan merupakan hulu dari jurnalisme sensitif bencana yang bermuara pada konsep komunikasi lingkungan. Jurnalisme sensitif bencana ialah praktik jurnalis yang memperhatikan aspek-aspek dalam memberitakan suatu bencana, informasi yang benar, *human interest*, dll. Dalam logika ini, jurnalisme lingkungan itu memihak pada proses-proses untuk meminimalkan dampak negatif kerusakan lingkungan, memihak kepada upaya mempertahankan kelestarian.

Lebih jauh, basis akademik dari jurnalisme lingkungan adalah komunikasi lingkungan, yang mengkaji bagaimana individu, masyarakat serta budaya memahami, membentuk, menggunakan pesan tentang lingkungan itu sendiri, serta hubungan timbal-balik antara manusia dengan lingkungan (Cox, 2010). Secara historis, jurnalisme lingkungan berkembang pada akhir 1980-an, ketika peristiwa kerusakan lingkungan mulai muncul dengan berbagai skala kerusakan. Istilah ini merujuk pada pemberitaan jurnalis yang berkaitan dengan isu non-manusia. Ia disebut juga *green press, eco-journalism*, liputan lingkungan (*environmental reporting*), atau *science reporting*. Pada akhirnya, jurnalisme lingkungan adalah menulis dengan sebuah tujuan, yaitu untuk menyuarakan isu lingkungan kepada publik dengan menyajikan data-data akurat, sehingga dapat memberikan kontribusi pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik berkaitan dengan kasus lingkungan (Rademakers, 2004).

Definisi jurnalis lingkungan merujuk organisasi Serikat Jurnalis Lingkungan (SEJ) tercakup pada tiga aspek: kompetensi pengetahuan jurnalis atas isu lingkungan, masih aktif bekerja membuat berita isu lingkungan dan menerima gaji/berstatus kerja

dari perusahaan media. Definisi ini cukup longgar. Hanitzsch (2001) secara umum merinci ada empat elemen kompetensi jurnalis: profesionalisme kerja (status), pengetahuan dan keterampilan. Profesional berarti kemampuan dasar pengetahuan teknis jurnalisme. Terkait lingkungan, kompetensi teknis meliputi teknologi dan akses data kasus. Menyusul disrupsi digital, maka profesi jurnalis lingkungan bisa digantikan/dilengkapi oleh para pembuat konten (*content creator*), *freelance*, *digital documentation*, *casual reporters* dan sebagainya.

Berangkat dari uraian di atas jurnalisme lingkungan dapat dipahami sebagai genre jurnalisme yang mengkaji dan mengkategorisasikan liputan dan penyajian berita terkait isu-isu lingkungan dan keberlanjutannya. Jurnalisme lingkungan memberikan pemahaman yang tajam dan mendalam kepada publik terkait krisis dan tantangan dalam tata kelola dan kebijakan perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, disertai upaya advokasi kebijakan, upaya konservasi, dan upaya lainnya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Merujuk Ana Nadhya Abrar dalam buku: *Mengenal Jurnalisme Lingkungan*, UGM Press (2018), jurnalisme lingkungan istilah yang paling tepat untuk cara melaporkan berita lingkungan hidup melalui media massa. Berita lingkungan diproduksi dengan bahan baku realitas lingkungan hidup seperti polusi udara, penggundulan hutan, pencemaran sampah, pencemaran industri, serta peran masyarakat sipil di dalamnya.

C. Sejarah dan Ruang Lingkup

Definisi atas jurnalisme lingkungan cenderung beragam, demikian pula deskripsi atas sosok jurnalisnya. Ia dapat berangkat dari pengertian substansi hingga teknis: penyajian data ancaman lingkungan kepada kesehatan manusia (Rademakers, 2004) sebagai pola kerja dan proses produksi, menjaga nilai-nilai dan menyajikan laporan komprehensif. Aspek yang menjadi perhatian adalah interaksi manusia dan non-manusia. Jurnalis lingkungan tidak berada di ruang hampa, tetapi merupakan ‘aktor politik lingkungan’ yang strategis. Kerja jurnalis adalah kegiatan advokasi politik terhadap kasus lingkungan secara lokal dan global. Dua kata kunci: risk and crisis menjadi pintu masuk pemberitaan jurnalis lingkungan (OSJ, 2024). Pedroso de Holanda (2022) dalam artikel berjudul: *Environmental journalism: characteristics and interfaces in a developing field* menyebut faktor ideologi politik, sistem dan struktur politik dan faktor sumber pendanaan produksi memengaruhi bagaimana jurnalis dan media lingkungan mendefinisikan diri mereka di ruang publik.

Pada saat gerakan-gerakan lingkungan muncul, media sedang *booming* berita kasus lingkungan yang besar, di antaranya ancaman limbah beracun merkuri di perairan Ontario, dan juga hujan asam yang terjadi di pertengahan tahun 1970 (Dewi, JSP 2011). Misalnya, pada 26 April 1986 terjadi insiden Chernobyl, yaitu ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir di kota Chernobyl, Ukraina. Peristiwa ini menyebabkan 600.000 orang terkena radiasi tingkat tinggi, dan lima juta orang terpapar *low radiation*. Akibat radiasi ini adalah *thyroid cancer*. Ini kasus bencana lingkungan terburuk yang diakibatkan manusia. Pada saat itu media massa dibanjiri oleh informasi dari seluruh aspek yang berkaitan dengan peristiwa tersebut (politik, ekonomi, hukum), namun

aspek lingkungan sendiri tidak banyak disentuh oleh jurnalis karena mereka tidak mampu memahami persoalan lingkungan secara *scientific*.

Pada tahun 1990, berdiri *The Society of Environmental Journalists (SEJ)* yang dipelopori oleh The Philadelphia Inquirer, USA Today, Turner Broadcasting, Minnesota Publik Radio, dan National Geographic. Misi dari organisasi ini adalah untuk menguatkan kualitas, capaian, dan viabilitas dari jurnalisme pada seluruh media dalam memberikan advokasi kepada publik untuk memahami isu-isu lingkungan (Rademakers, 2004). Selain SEJ, masih ada lembaga kajian maupun institusi akademis. Misalkan *The Environmental Journalism Center of The Radio – TV News Director Association and Foundation* (1991), *Center for Environmental Journalism – University of Colorado* (1992), *International Federation of Environmental Journalists* (1993), *Knight Center for Environmental Journalism-Michigan State University* (1994), *Earth Journalism Network* (2004).

Di Indonesia, beberapa organisasi profesional untuk jurnalis lingkungan juga telah terbentuk, di antaranya adalah Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia atau *Society of Environmental Journalism (SIEJ)*, Kelompok Jurnalis Peduli Lingkungan (KJPL), dan Sahabat Alam. Dalam praktiknya, jurnalis lingkungan harus menguasai persoalan lingkungan secara komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat, solusi-solusi, memberikan prediksi berkait dengan potensi risiko baik yang berskala kecil maupun besar, berkait dengan sebuah isu kepublikan. Jurnalis tidak lagi hanya bersandar kepada informasi pemerintah, pelaku industri, aktivis lingkungan dalam memahami isu (Keating, 1993).

Jurnalisme lingkungan di Indonesia tumbuh pada tahun 1980-an seiring inisiatif pembentukan lembaga bernama PPLH (The Developing and Environment Controller) (Iswari, 1992). Parahita (2017) mencatat, perspektif atau pendekatan jurnalisme lingkungan di Indonesia cenderung berbeda dengan jurnalisme serupa di negara Barat. Merujuk tren serupa di negara berkembang, jurnalisme lingkungan Indonesia mengacu paradigma *developmentalis* (Shresta, 1994). Konteksnya percepatan ekonomi berbasis lingkungan sebagai indikator pembangunan (Friedman & Friedman, 1982). Peran jurnalis lingkungan di Indonesia pada era Orde Baru adalah mendukung pendidikan publik atas lingkungan secara positif (Iswari, 1992). Sedangkan di Amerika Serikat, jurnalisme ini identik dengan pertemuan antara pengetahuan, informasi risiko dan advokasi kasus krusial (Palen, 1999; Rademakers, 2004). Dalam konteks ini, jurnalisme lingkungan di Indonesia tidak bermuatan kritik bagian dari industrialisasi lingkungan. Ia terhubung agenda penguatan kebijakan pro-lingkungan pemerintah (Friedman & Friedman, 1989; Iswari, 1994; Masduki, 2009).

Sebagai profesi di ruang publik, jurnalis lingkungan terikat kode etik. Ia dapat bekerja atau dipengaruhi dua faktor: subjektif sikap dan objektif data. Dalam kode etik yang ditulis American Society of News Editors disebutkan bahwa “Tujuan utama dari membagi dan mendistribusikan berita adalah untuk menjaga kesejahteraan bersama dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat dan menjadikan mereka mampu membuat penilaian-penilaian mereka sendiri terhadap isu-isu yang

berkembang”. Ketika media mengambil bagian dalam mengawal isu dan memberikan literasi kepada masyarakat terhadap hal tersebut, maka tak cukup hanya dengan memberikan informasi belaka, akan tetapi penyusunan alur cerita dan sudut pandang yang digunakan juga menjadi unsur penting dalam pemberitaan.

Di Indonesia keberadaan asosiasi jurnalis lingkungan secara legal ditempatkan sebagai peran masyarakat yang diatur UU Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 pasal 70 (1), “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Media massa dalam konteks ini dianggap sebagai bagian dari peran masyarakat yang memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk berperan dalam menjaga lingkungan hidupnya, selain tanggung jawab dari media itu sendiri untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap berbagai kegiatan yang membahayakan.

Sejak periode 1990-an, telah ada beberapa praktek baik jurnalisme lingkungan seperti liputan yang memberi perhatian khusus pada deforestasi, tambang, polusi udara dan air, biodiversitas di Indonesia. Dengan menggunakan metode ilmiah dan fakta lapangan, jurnalis lingkungan bekerja sama dengan ilmuwan dan aktivis lingkungan untuk memastikan keakuratan informasi yang disampaikan. Budaya kerja jurnalisme lingkungan bukan hanya bersifat informatif dan konstruktif, tetapi memiliki unsur advokasi sosial untuk perlindungan korban krisis lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Konten beritanya berhubungan pada solusi dan tindakan yang dapat diambil otoritas terkait.

Adapun kategori liputan isu lingkungan sangat beragam, mencakup segala informasi berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam; lingkungan perkotaan termasuk sampah, polusi, dan pencemaran udara. Juga konflik agraria, sinergitas program pemerintah dengan penerima manfaat yang berkaitan kebijakan lingkungan; kesehatan lingkungan; pembangunan berkelanjutan; masyarakat adat, isu korupsi di sektor lingkungan, perdagangan karbon, biodiversity, emisi, air dan sanitasi, *animal agriculture*, dan sebagainya.

Dilihat dari bobot karya dan distribusi kewenangan liputan, terdapat sedikitnya tiga kategori jurnalis lingkungan. Pertama, mereka yang secara khusus dan mendalam, konsisten meliput isu-isu lingkungan di atas atau jurnalis spesialis. Mereka kerap kali melakukan liputan investigasi dan berjejaring dalam komunitas aktivis lingkungan. Kedua, jurnalis peliput beragam isu publik termasuk isu lingkungan dengan karya berita mendalam. Mereka adalah jurnalis generalis dengan minat khusus pada isu dan kebijakan terkait lingkungan dan HAM. Ketiga, mereka yang meliput isu lingkungan secara casual, tentatif dan umumnya dalam bentuk berita sederhana. Dalam konteks lain, mereka terbagi ke dalam jurnalis yang memproduksi konten lingkungan secara teratur atau jurnalis yang hanya pernah meliput isu lingkungan minimal 1-2 per bulan sesuai tugas editorialnya.

D. Peran Jurnalis Lingkungan

Konsep jurnalisme lingkungan dalam institusi media sangat lekat dengan pola pikir dan pandangan dunia dan nilai-nilai keutamaan serta kepentingan publik. Kajian mengenai jurnalisme lingkungan di media kerap kali melibatkan perdebatan antara dua pandangan. Pertama, pandangan bahwa berita terkait lingkungan harus mempromosikan kepentingan dari kalangan dominan. Kedua, pandangan bahwa berita jurnalisme lingkungan mengamplifikasi kritik, tandingan dalam upaya penegasian, perlawanan, dan pembebasan korban dari proyek lingkungan. Nampak bahwa, paling tidak hingga kondisi tertentu, media massa menjadi ruang kontestasi dan konflik ideologi jurnalisme pembangunan dan ekonomi politik kritis dalam kompetisinya di ruang publik. Berbagai nilai sosial telah diamplifikasi media massa, dikompetisikan, oleh dan/atau melalui media massa.

Dari perspektif ideologi politik dan ekonomi, maka pengkajian peran-peran jurnalis lingkungan mengasumsikan beberapa pandangan sebagai berikut:

Pertama, liberal pluralism.

Media dan jurnalis lingkungan sebagai institusi yang tidak monolitik. Tampilnya ide yang berbeda dalam media memberi kontribusi kepada keterbukaan sirkulasi ide itu sendiri, suatu kondisi yang diperlukan dalam menjaga demokrasi informasi. Dalam beda pendapat, terdapat pilihan kebijakan dan peran media dalam menjaga tata kelola lingkungan. Pada dasarnya kelompok pemikir media liberal melihat media sebagai anjing penjaga perilaku pejabat dan arena orang biasa bersuara. Media jadi alat pemeriksa pelaksanaan kekuasaan agar tidak terjadi malpraktek yang bisa merugikan publik.

Kritik atas peran ini adalah bahwa ia gagal menegaskan faktor pemilik dan kuasa politik dan kepentingan sepihak pengiklan yang dominan dibandingkan posisi jurnalis. Menurut Curran dan Gurevitch (2000), pengandaian peran di atas menghambat advokasi karena produksi berita tetap berbiaya mahal. Konten berita lingkungan di samping sangat terbatas juga rawan dikendalikan kelompok dominan di atas.

Kedua, gatekeeper approach.

Peran kedua dapat berupa gatekeeper (penjaga gawang). Pelaku media di ruang berita memiliki kekuasaan sekaligus kerawanan karena posisi dirinya. Terdapat relasi antara pilihan informasi yang diseleksi untuk publik dengan kekuasaan mutlak produser informasi (editor dan jurnalis). Apa saja yang dipilih dan bagaimana kemasan atas berita ditentukan, kapan ia akan diterbitkan sangat ditentukan oleh faktor subjektivitas individu. Dalam hubungan ini, kebijakan organisasi media menjadi faktor penentu. Kritik atas peran ini adalah ia lemah pemikiran yang melihat media sebagai institusi yang kompleks. Juga tidak melihat faktor makro ekonomi politik media di mana media itu beroperasi.

Ketiga, media sebagai public sphere.

Dalam bukunya berjudul: *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1991), studi Habermas menempatkan media sebagai ruang publik merujuk pada situasi kelas menengah abad ke-18. Ruang publik menggambarkan adanya warga yang secara egaliter berdebat dan berdiskusi terkait isu-isu kepublikan (Curran and Gurevitch, 2000). Sebagai sebuah gagasan, konsepsi media sebagai ruang publik Habermas menjadi titik pijak pemikiran terkait kebebasan berekspresi dan berkomunikasi.

Klasifikasi ruang dalam studi Habermas juga memperkenalkan apa yang disebutnya sebagai *private sphere* dan *intimate sphere* (Habermas, 1991). *Private sphere* adalah ruang yang berada dalam hubungan ekonomi atau lebih disebut sebagai ruang kepemilikan. Kaum borjuis adalah orang-orang yang dalam konteks ini disebut *private persons*. Sementara ruang keluarga yang disebut sebagai *intimate sphere* adalah inti dari *private sphere*. Sebagai *private persona* kaum elit di otoritas lingkungan dominan. Terjadi dominasi ruang-ruang yang awalnya untuk publik (tanpa kelas) oleh kaum borjuis. Dominasi itu terjadi karena sumber daya ekonomi dan politik untuk mengakses ruang publik berbeda-beda di antara warga negara. Kaum borjuis dengan modal ekonomi yang kuat lebih mampu secara reguler mengakses ruang publik dalam iklim demokrasi liberal dan kompetisi gagasan yang terbuka. Gambar berikut ini menguraikan interelasi antara kepentingan publik, ruang publik dalam media dan bagaimana posisi jurnalis dalam isu lingkungan.

Gambar 1

Interelasi Ruang Publik dan Jurnalisme Lingkungan



E. Kekerasan Jurnalis Lingkungan

Meliput isu lingkungan menghadirkan tantangan khusus bagi jurnalis, yang tidak hanya terkait dengan aspek teknis peliputan, jumlah berita, tetapi juga risiko tekanan struktural aktor politik. Dalam reportase, informasi kasus kerap kali terbatas, disertai ancaman dan intimidasi, dan tingkat pemahaman teknis maupun ilmiah jurnalis yang lemah.

Di Indonesia pasca reformasi politik 1998 dan pasca disrupsi digital, problematika yang dihadapi jurnalis lingkungan semakin kompleks. Posisi berita lingkungan di redaksi media secara umum masih marginal karena faktor kesadaran yang rendah dan jumlah jurnalis yang khusus meliput isu lingkungan masih sedikit. Jurnalis anggota The Society of Indonesian Environmental Journalists hingga 2024 masih sekitar 200 orang di tengah jumlah jurnalis Indonesia yang mencapai 235.000 orang. Umumnya, jurnalis yang menjadi anggota SIEJ merupakan peliput yang bertugas hanya untuk kantor media massa besar atau sebaliknya sebagai freelancer journalist. Persoalan lain adalah intensitas produksi berita isu lingkungan yang berbasis jurnalisme data dan jurnalisme investigasi masih sangat kurang.

Dinamika kasus kekerasan struktural yang mengancam keselamatan jurnalis peliput isu HAM, lingkungan, korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik di ranah fisik, verbal maupun digital. Jurnalis rentan menjadi target kekerasan karena perannya sebagai pengawas sosial. Banyak pihak berupaya membungkam aktivitas jurnalis untuk bersikap kritis melalui kegiatan jurnalistik, termasuk jurnalistik lingkungan. Pembungkaman terhadap jurnalis ini dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan meminta swasensor.

Data AJI Indonesia sejak Januari hingga November 2023 menjelaskan, setidaknya ada 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Bentuk kekerasannya beragam, yaitu kekerasan fisik, pelarangan liputan, perusakan alat dan penghapusan data liputan. Kekerasan lainnya yaitu teror dan intimidasi, serangan digital, serta kekerasan berbasis gender. Jumlah kasus ini meningkat dari tahun sebelumnya 62 kasus. Dibandingkan dengan isu lainnya, isu lingkungan lebih sensitif, rentan risiko tekanan, khususnya dalam liputan kasus pertambangan batu bara dan sawit karena ini memerlukan investigasi mendalam yang mengharuskan keterlibatan ilmuwan, aktivis, dan pihak lain untuk memastikan akurasi data. Tidak semua perusahaan media memiliki sumber daya atau waktu untuk mendukung investigasi, juga belum ada proteksi yang memadai secara hukum.

Laporan UNESCO yang berjudul *Press and Planet in Danger*, mengungkapkan setidaknya 749 jurnalis dan media berita yang melaporkan isu-isu lingkungan menjadi sasaran pembunuhan, kekerasan fisik, penahanan dan penangkapan, pelecehan daring, atau serangan hukum pada periode 2009-2023. Lebih dari 300 serangan terjadi antara 2019-2023 atau data ini meningkat 42 persen dari periode lima tahun sebelumnya (2014-2018). Selain itu laporan tersebut juga mengungkapkan bentuk-bentuk serangan fisik dengan 353 insiden. Serangan meningkat lebih dari dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir, dari 85 serangan pada tahun 2014-2018 menjadi 183 kasus di periode 2019-2023.

Laporan yang berjudul *The Chilling: Tren Global Kekerasan Online terhadap Jurnalis Perempuan* juga menyebutkan bahwa jurnalis perempuan selaku investigator lebih sering mengalami pelecehan seksual secara online dibandingkan jurnalis laki-laki. Sepertiga dari jurnalis yang ikut survei menyatakan bahwa selain serangan fisik, berita mereka disensor dan hampir setengahnya menyatakan menyensor beritanya

sendiri ketika meliput isu lingkungan karena takut diserang, narasumber terekspose atau menyadari bahwa berita yang ditulis menabrak kepentingan pemegang kekuasaan politik.

Di Indonesia, kekerasan terhadap jurnalis saat meliput isu lingkungan juga kerap kali ditemukan. Dalam laporan akhir AJI tahun 2023, tercatat sebanyak 14 jurnalis mendapat intimidasi karena meliput isu lingkungan hidup. Dalam laporan ini, praktek swasensor menjadi salah satu indikator kekerasan yang dialami di ruang redaksi. Merujuk Article 19, swasensor adalah upaya koreksi internal/personal oleh jurnalis atas berita yang mereka buat dalam situasi ketakutan atau sebagai bentuk antisipasi potensi terjadinya kekerasan pasca publikasi berita. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) aktif mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan jurnalis lingkungan seperti jurnalis Deutsche Welle yang mendapat intimidasi saat akan melakukan konfirmasi kepada humas PT IWIP di kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara; dua jurnalis di Bandung mendapat kekerasan saat meliput kerusakan di perumahan Dago Elos; dan sejumlah jurnalis di Sumatera Barat, mendapatkan intimidasi dari pihak kepolisian saat meliput pemulangan paksa masyarakat Air Bangis, kabupaten Pasaman Barat yang menjadi korban Proyek Strategi Nasional (PSN).

Telah ada beberapa riset terkait kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia, tapi menurut catatan kami belum pernah ada sebuah survei yang berfokus pada jurnalis perempuan dan berskala nasional. AJI selama 2017-2021 misalnya mencatat kasus kekerasan yang dialami jurnalis laki-laki dan perempuan berjumlah 300 lebih kasus. Kasusnya beragam, mulai dari pemukulan, perusakan alat dan/atau data hasil peliputan, gugatan perdata, sampai dengan pembunuhan. Dalam laporan “Kebebasan Pers Memburuk di Tengah Pandemi” yang diterbitkan AJI Indonesia (Mawel, dkk. 2021), kekerasan terhadap jurnalis yang dilaporkan selama 3 Mei 2020-3 Mei 2021 berjumlah 90 buah—meningkat dari periode sebelumnya yang berjumlah 57 kasus. Data kekerasan jurnalis secara umum versi AJI Indonesia selama periode 2017-2021 tampak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2
Kekerasan terhadap Jurnalis Indonesia (2017-2021)

No.	Jenis Kekerasan	2017	2018	2019	2020	2021	Total
1.	Kekerasan fisik	34	16	22	15	8	95
2.	Pengusiran/pelarangan liputan	13	11	5	2	3	34
3.	Ancaman kekerasan atau teror	7	10	6	7		30
4.	Perusakan alat dan/atau hasil peliputan	6	9	14	21		50
5.	Pemidanaan/kriminalisasi	5	7	7	5	1	25

6.	Mobilisasi massa/penyerangan kantor redaksi	1	2		1		4
7.	Intimidasi lisan oleh pejabat publik		5	1	23	1	30
8.	Sensor/Pelarangan Pemberitaan		4	3	2		9
9.	Ancaman				1	2	3
10.	Penghapusan hasil liputan				2		2
11.	Penahanan				2	1	3
12.	Gugatan perdata				1		1
13.	Serangan digital					5	5
14.	Teror dan intimidasi					3	3
15.	Perusakan/perampasan alat				1	1	2
16.	Penuntutan hukum					3	3
17.	Pembunuhan					1	1
Total		66	64	58	83	29	300

(Sumber: diolah dari berbagai sumber bacaan)

Revolusi teknologi digital memiliki dua sisi kontradiktif. Anugerah sekaligus bencana. Sisi positifnya ia membuka ruang percakapan publik yang lebih terbuka, setara, setiap orang bisa menjadi komentator, memiliki media atau menjadi jurnalis tanpa kendala geografis, birokrasi produksi konten dan tuntutan keterampilan jurnalistik memadai. Sebaliknya, revolusi media digital juga membuka kontrol politik ekonomi atas perilaku sosial penggunaannya termasuk jurnalis, oleh kekuatan raksasa dari pemerintah atau korporasi global untuk berbagai tujuan. Ruang digital menjadi ruang yang tidak aman, bahkan bisa memicu konflik sosial, polarisasi politik hingga aksi terorisme. Jurnalis profesional adalah aktor yang terdampak langsung bahkan kerap kali menjadi target pemantauan digital.

Laporan dari ICJR dan LBH Pers tahun 2021 yang berjudul: <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/03/Penelitian-Situasi-Kebebasan-Pers-Keselamatan-Jurnalis-dan-Pemenuhan-Hak-Hak-Ketenagakerjaan-Selama-Masa-Pandemi.pdf> mencatat sedikitnya 125 jurnalis mengalami kekerasan digital, baik terkait laporan soal COVID-19 maupun laporan berita politik secara umum. Pada era media konvensional, pelakunya mudah diidentifikasi, mereka adalah aparat keamanan dan kelompok-kelompok radikal. Sementara di era media sosial, pelaku kekerasan cenderung anonim. Di era sebelum tahun 2010, kekerasan jurnalis terhadap terjadi di ruang terbuka berupa perampasan alat liputan, ancaman verbal hingga pembunuhan. Di era pasca 2010 atau pasca disrupsi digital dan merebaknya media sosial, bentuknya bergeser ke/menjadi peretasan akun media sosial.

Dalam rentang Mei 2020-akhir April 2021, terjadi 14 serangan digital, yakni terhadap 10 jurnalis dan empat laman media berita. Jenisnya beragam, yang mencakup 8 kasus *doxing*, empat kasus peretasan, dan dua kasus serangan *distributed denial-of-service* (DDos). Data serangan digital dalam publikasi AJI senada dengan temuan SAFEnet (2020), bahwa jurnalis menjadi profesi terbanyak korban *doxing* di Indonesia sepanjang 2020.

Di Indonesia dalam hampir sepuluh tahun terakhir, politisasi internet di satu sisi dan komodifikasi media sosial di sisi lain memicu kekerasan struktural terhadap jurnalis termasuk jurnalis lingkungan. Peneliti media asal Australia Ross Tapsell menyebut pada Pemilu 2014 dan 2019 baik Prabowo dan Jokowi memiliki tentara siber. Cybertroop ini dikerahkan untuk membentuk opini positif dan mengendalikan berita negatif yang muncul di media sosial. Dua kubu politik saling serang. Dalam prakteknya, tentara siber juga menyerang produk berita dan jurnalis yang mengkritik idola mereka. Majalah Tempo dengan produk investigasinya kerap menjadi sasaran. Bentuknya bisa *bullying* atas jurnalis hingga reproduksi/manipulasi atas konten beritanya. Tentara digital atau 'buzzer' ini ibarat anak haram dunia digital, yang mengadopsi logika politik dan ekonomi sekaligus. Mereka bekerja untuk perekrutnya sekaligus mencari untung dari pelanggan kontennya.

Selain jurnalis, partisipasi dari aktor publik lain dalam isu-isu iklim dan lingkungan dihambat cukup serius dengan berbagai cara, misalnya kriminalisasi lewat UU Informasi dan Transaksi Elektronik, kekerasan fisik dan digital, dan bentuk-bentuk pembungkaman lainnya, salah satunya seperti yang didokumentasikan oleh lembaga Auriga, bahwa terjadi 133 kasus serangan terhadap aktivis lingkungan sejak 2014-2023.

PSN ini memicu banyaknya konflik agraria serta dampak-dampak bagi lingkungan. Menghadapi tantangan yang besar ini, jurnalis diasosiasikan sebagai pembela HAM (human right defender) dan karenanya harus mendapat perlindungan paripurna. Dalam perspektif gender, masuk di sini kategori kekerasan seksual, istilah yang luas dan sering dipakai banyak pihak untuk memayungi berbagai tindak kekerasan seksual secara fisik maupun nonfisik, verbal maupun nonverbal, serta daring maupun luring. Jenis-jenis tindak kekerasan sangat beragam dan untuk memudahkan pemetaan, peneliti menggunakan dua kategori utama, yaitu pelecehan seksual dan serangan seksual. Pelecehan seksual mengacu pada tindak gangguan tanpa adanya sentuhan atau kontak fisik, sementara serangan seksual mengacu pada tindak serangan yang disertai sentuhan atau kontak fisik.

Profesi jurnalis lingkungan juga sangat berdekatan dengan aktivisme digital. Merujuk George dan Leidner (2019), aktivisme digital terkait *social activism: taking action to create social change*, yang digelar organisasi dan individu masyarakat sipil. Mereka dapat tergabung dalam organisasi gerakan sosial yang luas, suatu kelompok kritis yang bentuknya terstruktur, tersentral atau sebaliknya: informal, desentralistik dan sporadik.

Di Indonesia, aktivisme digital yang dikerahkan berbagai organisasi dan komunitas cenderung berwarna, tidak hanya terpusat di kota besar Jakarta atau Surabaya. Misalnya, komunitas kaum muda di Yogyakarta yang memilih aktivisme digital antara lain komunitas Jalin Merapi yang bergerak di saat terjadi erupsi Gunung Merapi, *Young on Top*, Festival Film Dokumenter (FFD), Jendela, Book for Mountain (BFM), Koalisi Pemuda Hijau (KOPHI), Ketjil Bergerak, Coin A Change dan @Gejayanmenanggil. Hambatan aktivisme digital, tidak jauh berbeda dengan jurnalis lingkungan. Pelaku utamanya adalah pemerintah, terutama pada pemerintah yang otoriter. Seperti terjadi di negara Tunisia, otoritas setempat melakukan pemblokiran website dan situs-situs publik yang merepresi ruang demokrasi secara digital, namun satu jalan ditutup ribuan jalan masih terbuka melalui internet. Tren aktivisme digital menghangat seiring munculnya berbagai gerakan politik pro-hijau, semisal Zapatista, *Occupy*, N20 Seattle yang beririsan dengan isu *climate change*.

Aktivisme digital yang melibatkan jurnalis lingkungan adalah bentuk aktualisasi dari resistensi atas politik digital yang tidak pro lingkungan. Politik digital adalah ruang publik di dunia maya (Postill, 2012), arena non struktural, dinamis, dan egaliter yang memungkinkan semua orang berpartisipasi, berpendapat melalui jejaring digital.

BAB II

SURVEI: DEMOGRAFI, PENGALAMAN DAN DUKUNGAN

Bab ini menyajikan tabulasi hasil survei terhadap sekitar 100 orang jurnalis peliput isu lingkungan di Indonesia. Uraian dalam bab ini terdiri dari empat aspek penting yang telah digali dalam survei. Pertama, demografi jurnalis lingkungan. Kedua, pengalaman melakukan peliputan isu lingkungan; Ketiga, kekerasan fisik yang dialami; Keempat, dukungan dan hambatan kultural struktural. Survei telah dilakukan secara daring melalui metode *purposive sampling* dengan target perolehan 100 responden jurnalis lingkungan yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Pemilihan responden dalam survei ini merujuk tiga kriteria: Jurnalis yang pernah membuat liputan investigasi dalam satu tahun terakhir; Jurnalis yang pernah membuat minimal dua liputan kasus lingkungan in-depth dalam tahun 2025; Jurnalis yang minimal pernah membuat liputan lingkungan (bentuk apapun) secara reguler dan/atau minimal 12 kali dan topik dalam setahun. Dalam kategori ini, akan ada juga jurnalis yang sebelumnya aktif memberitakan kasus lingkungan dan kemudian tidak melakukan lagi dalam setahun terakhir (misalnya karena ancaman tertentu/*self-censorship*).

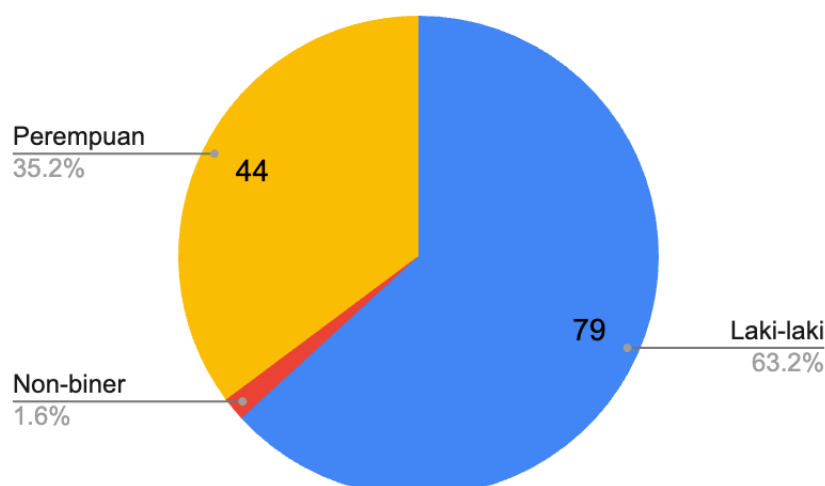
A. Demografi Jurnalis Lingkungan

1. Gender

Tabel 3
Kategori Gender

No.	Gender	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	79	63,2%
2	Non-biner	2	1,6%
3	Perempuan	44	35,2%
	Total	125	100%

Diagram 1
Pembagian Responder Berbasis Jenis Kelamin



Dari 125 jurnalis lingkungan yang terlibat dalam riset ini, sebanyak 63,2% di antara mereka adalah laki-laki, diikuti 35,2% perempuan, dan 1,6% merupakan non-biner.

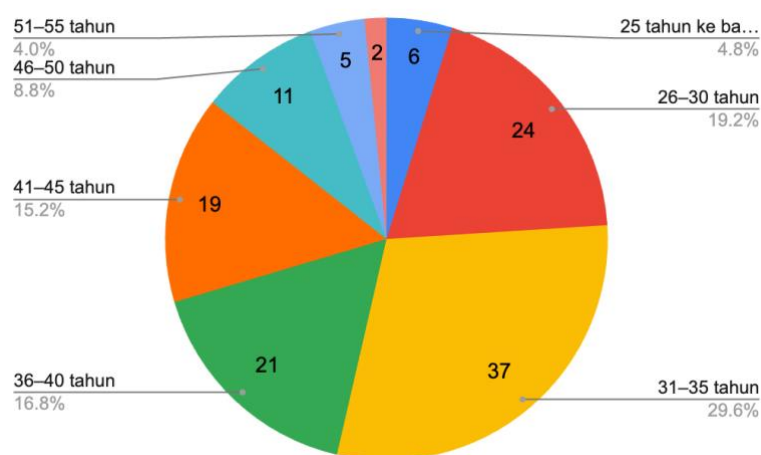
Dominasi jurnalis laki-laki ini merupakan refleksi dari profil jurnalis di Indonesia secara umum. Sebagai gambaran, riset AJI Indonesia berjudul *Potret Jurnalis Indonesia 2025* (Masduki et al., 2025) yang melibatkan 2.020 jurnalis yang tersertifikasi Dewan Pers, menunjukkan profesi jurnalis di Indonesia sangat didominasi oleh laki-laki, dengan 76,7% jurnalis berjenis kelamin laki-laki, hanya 23,2% perempuan, dan 0,1% yang non-biner.

2. Usia

Tabel 4
Kategori Usia

No.	Usia	Frekuensi	Persentase
1	25 tahun ke bawah	6	4,8%
2	26–30 tahun	24	19,2%
3	31–35 tahun	37	29,6%
4	36–40 tahun	21	16,8%
5	41–45 tahun	19	15,2%
6	46–50 tahun	11	8,8%
7	51–55 tahun	5	4,0%
8	56 tahun ke atas	2	1,6%
	Total	125	100%

Diagram 2
Persentase Usia Responden



Dari delapan kelompok usia di atas, mayoritas responden berusia 31-35 tahun (29,6%). Kelompok usia ini merupakan kelompok terbanyak dalam profil jurnalis Indonesia secara umum. Riset AJI Indonesia terhadap 2.020 jurnalis berjudul *Potret Jurnalis Indonesia 2025* (Masduki et al., 2025) mencatat, rata-rata jurnalis Indonesia berusia 36,3 tahun.

Kelompok usia terbanyak berikutnya dalam riset ini adalah 26-30 tahun (19,2%), diikuti 36-40 tahun (16,8%), dan 41-45 tahun (15,2%). Kelompok usia yang paling sedikit adalah 56 tahun ke atas (1,6%) dan 51-55 tahun (4%).

3. Provinsi Domisili

Tabel 5
Provinsi Domisili

No.	Domisili	Frekuensi	Persentase
1	Aceh	4	3,2%
2	Bali	3	2,4%
3	Banten	1	0,8%
4	Bengkulu	3	2,4%
5	D I Yogyakarta	4	3,2%
6	DKI Jakarta	9	7,2%
7	Gorontalo	2	1,6%
8	Jambi	2	1,6%
9	Jawa Barat	14	11,2%
10	Jawa Tengah	5	4,0%
11	Jawa Timur	6	4,8%
12	Kalimantan Barat	1	0,8%
13	Kalimantan Selatan	3	2,4%
14	Kalimantan Tengah	1	0,8%
15	Kalimantan Timur	9	7,2%
16	Kepulauan Bangka Belitung	2	1,6%
17	Kepulauan Riau	1	0,8%
18	Lampung	4	3,2%
19	Maluku Utara	12	9,6%
20	Nusa Tenggara Barat	6	4,8%
21	Nusa Tenggara Timur	6	4,8%
22	Papua Barat	1	0,8%
23	Papua Barat Daya	2	1,6%
24	Papua Selatan	2	1,6%
25	Riau	2	1,6%
26	Sulawesi Selatan	2	1,6%
27	Sulawesi Tengah	5	4,0%
28	Sulawesi Tenggara	5	4,0%
29	Sulawesi Utara	1	0,8%
30	Sumatera Barat	2	1,6%
31	Sumatera Selatan	2	1,6%
32	Sumatera Utara	3	2,4%
	Total	125	100%

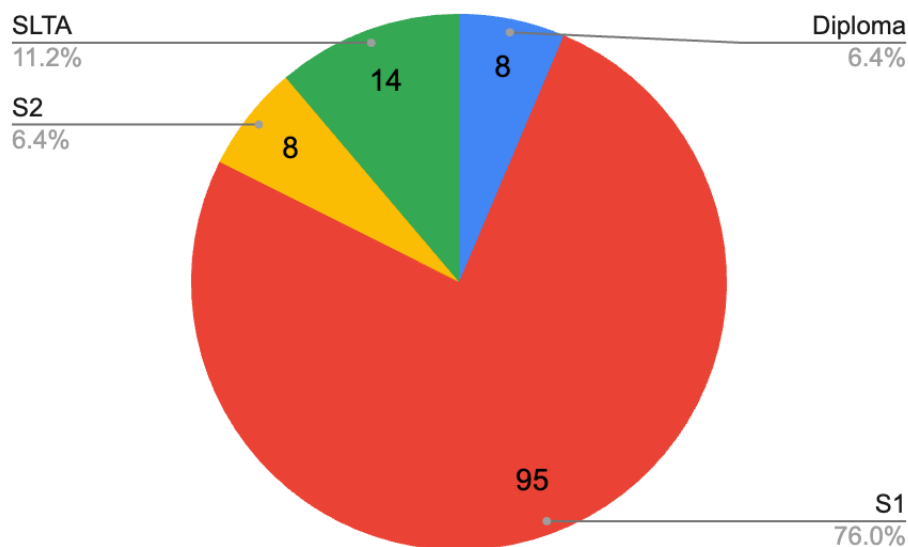
Dari 125 responden, sebagian besar dari mereka berdomisili di Provinsi Jawa Barat (11,2%), diikuti Maluku Utara (9,6%), DKI Jakarta dan Kalimantan Timur (masing-masing 7,2%), lalu Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (masing-masing 4,8%).

4. Pendidikan Terakhir

Tabel 6
Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	Diploma	8	6,4%
2	S1	95	76,0%
3	S2	8	6,4%
4	SLTA	14	11,2%
	Total	125	100%

Diagram 3
Tingkat Pendidikan Responden



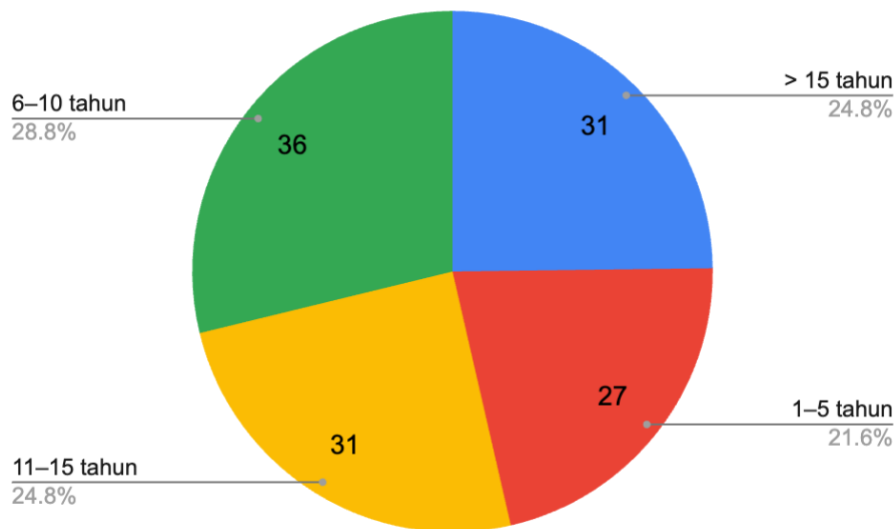
Mayoritas responden memiliki latar pendidikan terakhir S1 (76%), yang diikuti oleh lulusan diploma dan S2 yang sama banyaknya (6,4%), dan terakhir adalah lulusan SLTA (11,2%).

5. Lama Bekerja Sebagai Jurnalis (Sepanjang Karier)

Tabel 7
Lama Bekerja Sebagai Jurnalis

No.	Lama Bekerja	Frekuensi	Persentase
1	Kurang dari 1 tahun	0	0%
2	1–5 tahun	27	21,6%
3	6–10 tahun	36	28,8%
4	11–15 tahun	31	24,8%
5	Lebih dari 15 tahun	31	24,8%
	Total	125	100%

Diagram 4
Lama Bekerja Jurnalis



Mengenai lama bekerja sebagai jurnalis, para responden memiliki pengalaman kerja yang relatif sama, dengan sebagian besar telah bekerja selama 6-10 tahun (28,8%), diikuti 11-15 tahun dan lebih dari 15 tahun (masing-masing 24,8%), dan 1-5 tahun (21,6%). Sementara itu, tidak ada satu pun responden yang memiliki pengalaman kerja kurang dari 1 tahun.

Tren ini juga merupakan profil jurnalis Indonesia secara umum, sebagaimana temuan riset AJI Indonesia (Masduki et al., 2025) terhadap 2.020 jurnalis Indonesia tersertifikasi Dewan Pers, yang mencatat bahwa mayoritas jurnalis Indonesia telah bekerja selama 6-10 tahun (30,5%), dengan rata-rata bekerja selama 9,7 tahun.

6. Status Kepegawaian di Tempat Kerja Saat Ini

Tabel 8
Status Kepegawaian di Tempat Kerja Saat Ini

No.	Status Kepegawaian	Frekuensi	Persentase
1	Kontributor	25	20,0%
2	Pegawai kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	26	20,8%
3	Pegawai tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)	42	33,6%
4	Pekerja mandiri (<i>freelance</i>)	32	25,6%
	Total	125	100%

Sebagian besar responden memiliki status kepegawaian sebagai pegawai tetap (33,6%), diikuti pekerja mandiri (25,5%), pegawai kontrak (20,8%), dan kontributor (20%).

7. Posisi/Jabatan Saat Ini

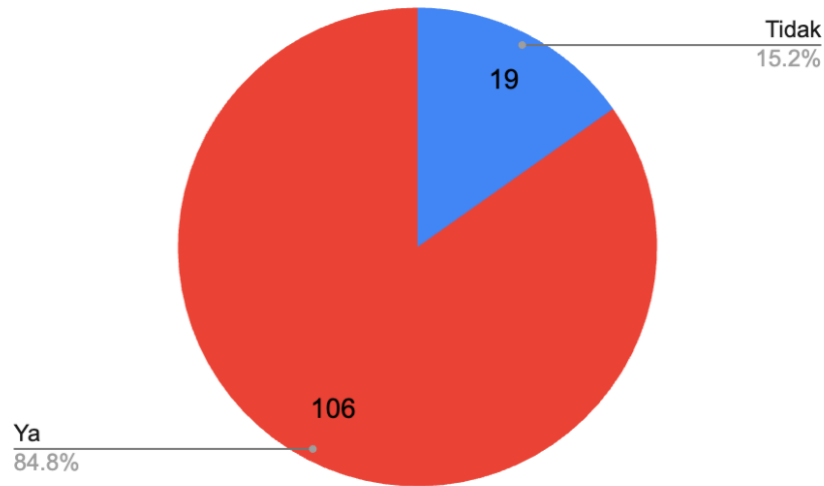
Tabel 9
Posisi/Jabatan Saat Ini

No.	Posisi/Jabatan	Frekuensi	Persentase
1	Pemimpin redaksi	12	9,6%
2	Redaktur pelaksana	6	4,8%
3	Editor	26	20,8%
4	Reporter	70	56,0%
5	Peneliti	1	0,8%
6	Penyiar	1	0,8%
7	Fotografer	3	2,4%
8	Desainer grafik	1	0,8%
9	Lainnya	5	4,0%
	Total	125	100%

Sebagian besar responden memiliki posisi sebagai reporter (56%), diikuti editor (20,8%), pemimpin redaksi (9,6%), dan redaktur pelaksana (4,8%). Posisi berikutnya adalah peneliti, penyiar, fotografer, dan desainer grafik.

8. Afiliasi Dalam Asosiasi Jurnalis

Diagram 5
Proporsi Afiliasi Responden Kepada Asosiasi Jurnalis



Mayoritas responden (84,8%) menyatakan diri mereka tergabung dalam asosiasi jurnalis, sementara hanya 15,2% yang tidak bergabung dalam asosiasi jurnalis.

9. Asosiasi Jurnalis

Tabel 10
Keanggotaan Pada Asosiasi Jurnalis

No.	Asosiasi	Frekuensi	Persentase
1	Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	90	85,0%
2	The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)	5	4,7%
3	Pewarta Foto Indonesia (PFI)	3	2,8%
4	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	3	2,8%
5	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)	1	0,9%
6	AJI dan SIEJ	3	2,8%
7	Tidak menyebutkan	1	0,9%
Total		106	100%

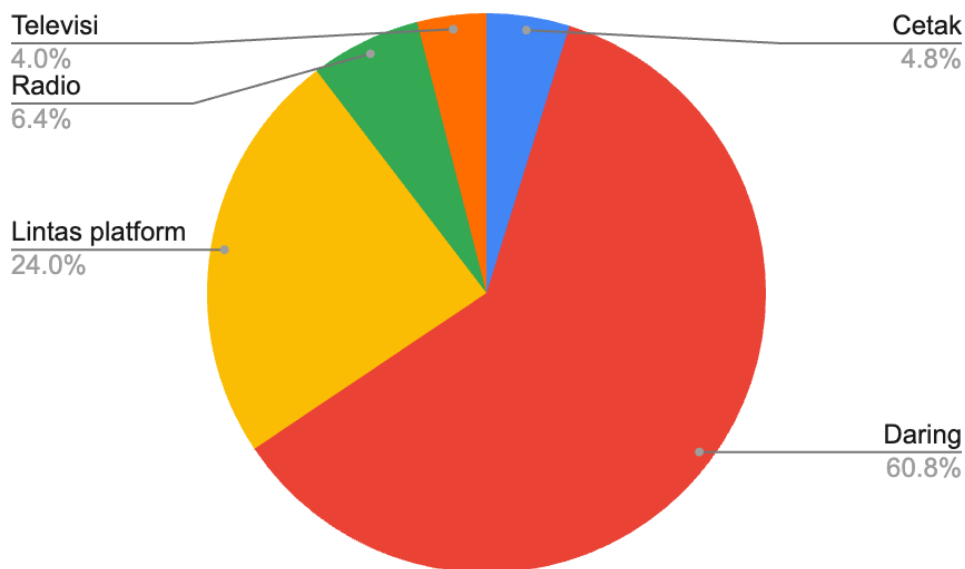
Dari 106 jurnalis yang tergabung dalam asosiasi jurnalis, mayoritas merupakan anggota AJI yaitu 85,%, diikuti SIEJ (4,7%), PFI dan PWI (masing-masing 2,8%), IJTI (0,9%), serta anggota AJI dan SIEJ sekaligus (2,8%).

10. Jenis Media Tempat Bekerja Saat Ini

Tabel 11
Jenis Media Tempat Bekerja

No.	Jenis Media	Frekuensi	Persentase
1	Cetak	6	4,8%
2	Daring	76	60,8%
3	Lintas platform	30	24,0%
4	Radio	8	6,4%
5	Televisi	5	4,0%
	Total	125	100%

Diagram 6
Kategori Media Tempat Bekerja Responden



Mayoritas jurnalis lingkungan yang disurvei bekerja pada media daring (60,8%), diikuti lintas platform (24%), radio (6,4%), cetak (4,8%), dan televisi (4%).

Komposisi ini juga merefleksikan komposisi jenis media pers di Indonesia secara umum, sebagaimana ditunjukkan oleh riset Dewan Pers dan Universitas Media Nusantara (Priyonggo et al., 2024). Riset tentang lanskap industri media itu mencatat terdapat 5.019 media pers yang menjadi anggota asosiasi perusahaan media konstituen Dewan Pers, dengan 77,4% di antaranya adalah media daring, diikuti radio (10,9%), cetak (10,5%), dan televisi (1,1%).

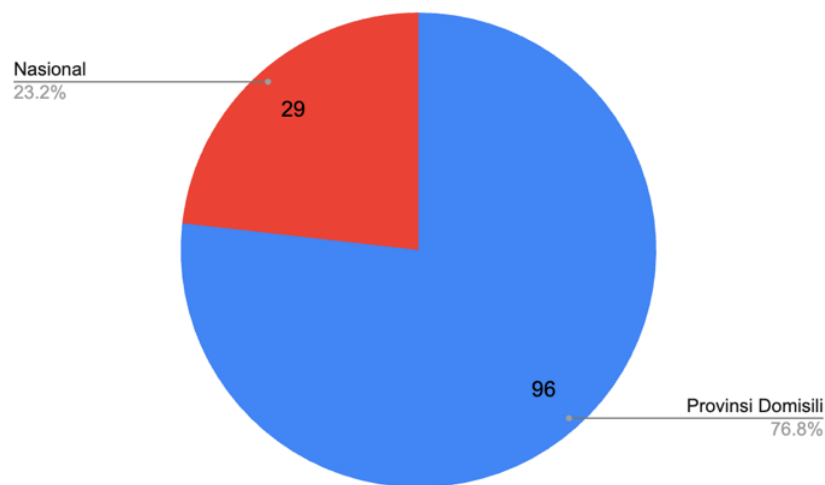
B. Pengalaman Liputan Jurnalistik

1. Wilayah liputan

Tabel 12
Wilayah Liputan

No.	Wilayah Liputan	Frekuensi	Persentase
1	Domisili	96	76,8%
2	Nasional/ Seluruh Indonesia	29	23,2%
	Total	125	100%

Diagram 7
Wilayah Liputan Jurnalis Responden



Mengenai wilayah liputan, sebagian besar responden meliput di provinsi tempat mereka tinggal (76,8%), dan hanya 23,2% yang memiliki wilayah liputan berskala nasional.

2. Jenis pelatihan jurnalistik yang pernah diikuti

Tabel 13
Jenis Pelatihan Jurnalistik yang Diikuti

No.	Jenis Pelatihan Jurnalistik	Frekuensi	Persentase
1	Teknik reportase	85	16,1%
2	Investigasi	88	16,7%
3	Penulisan	92	17,4%
4	Kode Etik Jurnalistik	86	16,3%
5	SOP Keamanan Peliputan	96	18,2%
6	Peliputan isu tematik	81	15,3%
7	Tidak pernah mengikuti pelatihan jurnalistik apapun	0	0%
	Total	528	100%

Responden kemudian diminta menjawab jenis pelatihan jurnalistik yang pernah mereka ikuti, dengan tiap responden bisa memilih lebih dari satu jawaban. Jenis pelatihan yang paling banyak diikuti responden adalah *standard operating procedure* (SOP) tentang keamanan liputan (18,2%), diikuti penulisan (17,4%), investigasi (16,7%), kode etik jurnalistik (16,3%), teknik reportase (16,1%), dan pelatihan isu tematik (15,3%). Sementara, tidak ada satu pun responden yang menyatakan tidak pernah mengikuti pelatihan jurnalistik apa pun.

3. Spesialisasi liputan yang dikerjakan

Tabel 14
Spesialisasi Liputan yang Dikerjakan

No.	Spesialisasi Liputan	Frekuensi	Persentase
1	<i>Hard news</i> (lebih mendesak, langsung, singkat)	15	12,0%
2	<i>Hard news</i> dan <i>soft news</i> (generalis)	65	52,0%
3	Investigasi	18	14,4%
4	<i>Soft news</i> (tidak bersifat mendesak, lebih menekankan sisi human interest)	27	21,6%
	Total	125	100%

Sebagian besar responden riset ini menyatakan diri mereka sebagai jurnalis generalis, yaitu biasa mengerjakan liputan *hard news* dan *soft news* sekaligus (52%), diikuti spesialis *soft news* (21,6%), spesialis liputan investigatif (14,4%), dan spesialis *hard news* (12%).

4. Seberapa sering Anda meliput isu lingkungan?

Tabel 15
Frekuensi Meliput Isu Lingkungan

No.	Frekuensi Meliput	Frekuensi	Persentase
1	Dua minggu sekali	12	9,6%
2	Enam bulan sekali	39	31,2%
3	Satu bulan sekali	33	26,4%
4	Setahun sekali	14	11,2%
5	Setiap minggu	27	21,6%
	Total	125	100%

Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka meliput isu lingkungan enam bulan sekali (31,2%), diikuti satu bulan sekali (26,4%), setiap minggu (21,6%), setahun sekali (11,2%), dan dua minggu sekali (9,6%). Hal ini menunjukkan, frekuensi peliputan isu lingkungan yang cukup rendah di Indonesia.

Meski mayoritas kelompok responden berada dalam frekuensi enam bulan sekali, terdapat jumlah jurnalis yang cukup besar dalam kelompok “satu bulan sekali” dan “setiap minggu” (ditotal mencapai 48%), yang mengindikasikan adanya frekuensi peliputan isu lingkungan yang cukup tinggi oleh jurnalis Indonesia.

5. Topik atau isu lingkungan yang pernah diliput selama setahun terakhir

Tabel 16
Topik Lingkungan yang Pernah Diliput Setahun Terakhir

No.	Topik	Frekuensi	Persentase
1	Pertambangan	66	8,1%
2	Perkebunan	37	4,5%
3	Sampah dan pencemaran lingkungan	76	9,3%
4	Penebangan hutan	42	5,1%
5	Polusi dan pencemaran udara	41	5,0%
6	Konflik agraria	46	5,6%
7	Sinergi program pemerintah dengan masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan	33	4,0%
8	Kesehatan lingkungan	47	5,7%
9	Isu dan kebijakan sosial	46	5,6%
10	Pembangunan berkelanjutan	36	4,4%
11	Masyarakat adat	57	7,0%
12	Isu korupsi di sektor lingkungan	26	3,2%
13	Perdagangan karbon	11	1,3%
14	Keanekaragaman hayati	43	5,3%
15	Proyek Strategis Nasional (PSN)	60	7,3%
16	Air dan sanitasi	47	5,7%
17	Perburuan & perdagangan satwa liar	36	4,4%
18	Krisis iklim	64	7,8%
19	Lainnya (Energi terbarukan, abrasi, nelayan, legalitas kayu)	5	0,6%
Total		819	100%

Responden kemudian diminta menyatakan topik yang pernah mereka liput selama setahun terakhir, dengan tiap responden bisa memilih lebih dari satu jawaban. Sampah dan pencemaran lingkungan menjadi topik yang paling banyak mereka liput (9,3%), diikuti pertambangan (8,1%), krisis iklim (7,8%), proyek strategis nasional (7,3%), dan masyarakat adat (7%).

Hal ini mengindikasikan bahwa sampah dan pencemaran lingkungan, pertambangan, dan krisis iklim merupakan isu yang dianggap paling penting oleh mayoritas jurnalis lingkungan atau redaksi media di Indonesia.

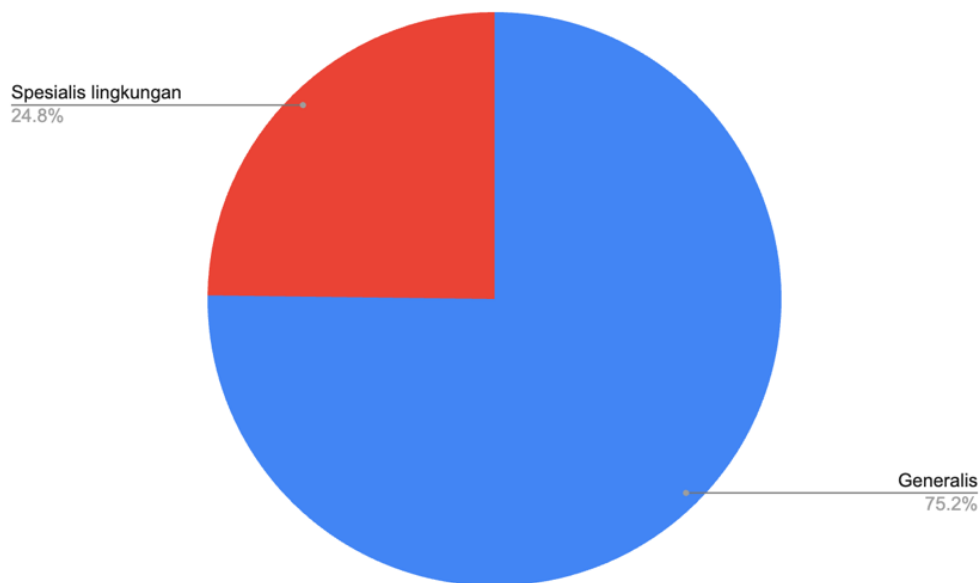
Sementara itu, proyek strategis nasional (PSN) adalah proyek-proyek yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang dianggap memiliki sifat strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat keberagaman proyeknya, yang mencakup antara lain pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus, penyediaan air bersih dan pangan, proyek energi, hingga infrastruktur perhubungan, PSN sangat berpotensi bersinggungan dengan isu-isu lingkungan. Sebagai contoh, PSN Pengembangan Pangan dan Energi di Merauke, Papua Selatan sejak 2024 yang mengakibatkan masyarakat adat kehilangan kontrol atas hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka dan memperparah krisis ekologi yang sudah terjadi (Makuba, 2024).

6. Bagaimana Anda mendeskripsikan diri Anda dengan tema yang diliput?

Tabel 17
Deskripsi Diri Responden Terkait Tema yang Diliput

No.	Deskripsi Diri	Frekuensi	Persentase
1	Generalis	94	75,2%
2	Spesialis lingkungan	31	24,8%
	Total	125	100%

Diagram 8
Persentase Tema Pilihan Liputan



Saat ditanya bagaimana responden mendeskripsikan dirinya terkait tema liputannya, mayoritas responden menyatakan dirinya sebagai generalis (75,2%), sebagai kebalikan dari jurnalis spesialis lingkungan (24,8%).

7. Faktor mempengaruhi liputan responden sebagai jurnalis lingkungan

Pada bagian ini, responden diminta menuliskan secara bebas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi liputan mereka sebagai jurnalis lingkungan.

Sebanyak 50% responden menuliskan faktor-faktor yang mendorong mereka melakukan liputan lingkungan, yaitu adanya kerusakan lingkungan yang berdampak pada semua makhluk hidup dan perlunya liputan lingkungan untuk mendorong kebijakan lingkungan yang lebih baik. Jawaban yang mereka tulis dalam kuesioner antara lain:

1. "Bumi saat ini sedang tidak baik- baik saja."
2. "Banjir setiap musim hujan, tanah longsor di sekitar."
3. "Maraknya kasus perburuan hewan liar."
4. "Pengelolaan sampah yang belum maksimal dilakukan pemerintah."
5. "Bumi makin panas, tren bencana meningkat."
6. "Perubahan iklim yang menyebabkan bencana dan ancaman di pulau kecil."
7. "Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada keadilan ekologi dan sering kali tidak melibatkan masyarakat adat yang menjadi korban dari kebijakan mereka."
8. "Isu lingkungan belum menjadi isu utama dalam kerja dan karya jurnalistik."
9. "Masih banyaknya jurnalis yang berhimpun di dalam asosiasi jurnalis lingkungan namun tidak pernah sama sekali meliput terkait isu-isu lingkungan."
10. "Pemberitaan isu lingkungan di Indonesia belum banyak mendapat ruang dan agenda redaksi media."

Sementara itu, sekitar 50% responden lainnya menjawab faktor-faktor yang secara umum mempengaruhi rencana dan proses peliputan. Jawaban mereka antara lain:

1. "Data, lokasi liputan, narasumber, keamanan fisik."
2. "Ekosistem yang mendukung baik seprofesi maupun lintas profesi."
3. "Kondisi ekologis, ketersediaan data dan informasi, konteks sosial dan ekonomi, serta kesadaran publik."
4. "Dampak kerusakan dan narasumber."
5. "Keterjangkauan dan keamanan."
6. "Kebijakan pemerintah dan redaksi, kredibilitas sumber, kondisi sosial, bahkan finansial."

Sebagian kecil responden menyatakan prinsip dan tujuan dari peliputan lingkungan, seperti:

1. "Jurnalis harus tetap berimbang, kritis, dan inovatif dalam menyampaikan informasi yang bertujuan membangun kesadaran dan aksi terhadap isu-isu lingkungan."
2. "Mampu membuat orang lain tersadar saat membacanya."

3. “Pemerintah mengatasi kerugian yang ditimbulkan akibat permasalahan lingkungan”.

8. Apa tantangan Anda dalam meliput isu lingkungan?

Di sini, responden bisa memilih lebih dari satu jawaban mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam meliput isu lingkungan.

Tabel 18
Tantangan Dalam Meliput Isu Lingkungan

No.	Tantangan	Frekuensi	Persentase
1	Kompleksitas isu	84	19,0%
2	Biaya liputan	98	22,2%
3	Keamanan fisik	72	16,3%
4	Keamanan digital	41	9,3%
5	Tidak adanya dukungan redaksi	24	5,4%
6	Tingkat keterbacaan rendah	43	9,8%
7	Ketersediaan data dan narasumber	75	17,0%
8	Lainnya (Pengolahan data, Wilayah liputan, Pemahaman tentang isu)	4	0,9%
	Total	441	100%

Dari tujuh pilihan jawaban untuk tantangan dalam meliput isu lingkungan, sebagian besar responden memilih biaya liputan (22,2%), diikuti kompleksitas isu (19%), ketersediaan data dan narasumber (17%), keamanan fisik (16,3%), tingkat keterbacaan rendah (9,8%), dan keamanan digital (9,3%).

Jawaban para responden tersebut mencerminkan sifat dari jurnalisme lingkungan yang bersifat kompleks dan erat dengan dimensi politik, ekonomi, sosial, dan sains. Topik yang seringkali sensitif ini, karena mengkritik praktik kekuasaan, harus ditampilkan jurnalis secara akurat dan berimbang, sambil memastikan pesannya bisa diterima oleh audiens secara luas. Konsep-konsep ilmiah seperti jejak karbon, keadilan lingkungan, efek rumah kaca, dan keberlanjutan perlu dihubungkan dengan fakta-fakta yang digali di lapangan, yang kondisinya hampir selalu menantang dan terisolir. Situasi ini menyebabkan liputan lingkungan hampir selalu berbiaya mahal, butuh upaya ekstra, dan berisiko tinggi (Collins, 2023; Van Witsen & Takahashi, 2018).

C. Kekerasan Fisik dan Digital

1. Apakah Anda pernah mengalami kekerasan fisik (seperti di bawah ini) selama melakukan liputan tentang isu lingkungan?

Untuk tiap jenis kekerasan fisik yang ditanyakan, responden diminta memilih satu dari lima jawaban terkait frekuensinya, yaitu tidak pernah, jarang, kadang, sering, dan sangat sering.

Lalu, peneliti memberikan nilai untuk setiap jawaban tersebut, mulai 4 hingga 0, dengan tidak pernah bernilai 4 dan sangat sering bernilai 0. Jadi, semakin tidak pernah atau jarang responden mengalami kekerasan, semakin tinggi atau baik nilainya.

Di bawah ini adalah skor rata-rata 125 responden untuk lima jenis kekerasan fisik.

Tabel 19
Nilai Rata-rata Responden untuk Kekerasan Fisik

No.	Jenis Kekerasan Fisik	Nilai rata-rata responden	Skala
1	Serangan fisik yang bersifat non-seksual	3,8	0-4
2	Ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat non-seksual	3,1	0-4
3	Perusakan atau perampasan hasil/alat liputan	3,9	0-4
4	Serangan fisik yang bersifat seksual	3,8	0-4
5	Ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual	3,7	0-4
	Rata-rata	3,7	0-4

Dari lima jenis kekerasan di atas, ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat non-seksual memiliki skor paling rendah (3,1) atau merupakan jenis kekerasan yang paling sering dialami oleh para responden. Sementara itu, jenis kekerasan yang paling jarang dialami responden adalah perusakan atau perampasan hasil/alat liputan (3,9).

2. Siapa pelaku kekerasan/serangan fisik tersebut?

Selanjutnya, responden diminta menjawab pelaku yang melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya, dengan adanya pilihan tidak pernah bagi responden yang tidak pernah mengalami kekerasan fisik. Di sini tiap responden bisa memilih lebih dari satu jawaban.

Tabel 20
Pelaku Kekerasan Fisik

No.	Pelaku Kekerasan Fisik	Frekuensi	Persentase
1	Polisi	30	11,7%
2	TNI	20	7,8%
3	Jaksa	2	0,8%
4	Aparatur pemerintah	33	12,9%
5	Organisasi masyarakat	18	7,0%
6	Warga	21	8,2%
7	Perusahaan	30	11,7%
8	Partai politik	4	1,6%
9	Pekerja profesional	7	2,7%

10	Preman	38	14,8%
11	Lainnya (Anggota parlemen, Desa adat, Sesama wartawan)	3	1,2%
12	Tidak pernah	50	19,5%
	Total	256	100%

Dari 10 pilihan jawaban, preman menjadi pihak yang paling sering melakukan kekerasan (14,8%), diikuti aparat pemerintah (12,9%), polisi dan perusahaan (masing-masing 11,7%), warga (8,2%), dan TNI (7,8%).

Temuan riset ini menunjukkan, hanya 50 responden (40%) yang tidak pernah mengalami kekerasan fisik, atau terdapat 75 responden (60%) yang pernah mengalami kekerasan fisik selama melakukan liputan tentang isu lingkungan. Angka ini sangat memperingatkan, mengingat mayoritas responden pernah mengalami kekerasan fisik saat meliput isu yang berkaitan dengan kasus lingkungan.

3. Kekerasan digital

Untuk tiap jenis kekerasan digital yang ditanyakan, responden diminta memilih satu dari lima jawaban terkait frekuensinya, yaitu tidak pernah, jarang, kadang, sering, dan sangat sering.

Lalu, peneliti memberikan nilai untuk setiap jawaban tersebut, mulai 4 hingga 0, dengan tidak pernah bernilai 4 dan sangat sering bernilai 0. Jadi, semakin tidak pernah atau jarang responden mengalami kekerasan, semakin tinggi atau baik nilainya.

Di bawah ini adalah skor rata-rata 125 responden untuk 10 jenis kekerasan digital.

Tabel 21
Nilai Rata-rata Responden untuk Kekerasan Digital

No.	Jenis Kekerasan Digital	Nilai rata-rata responden	Skala
1	Penyebaran rumor/fitnah	3,8	0-4
2	<i>Doxing</i> (penyebaran informasi pribadi korban dengan tujuan mengancam dan mengganggu)	3,8	0-4
3	Intersepsi/penyadapan (pelaku menyimpan dan membaca komunikasi/lalu lintas internet korban)	3,7	0-4
4	Peniruan identitas (pembuatan akun palsu atas nama korban)	3,8	0-4
5	Peretasan/pengambilalihan akun media sosial	3,8	0-4
6	<i>Social engineering</i> (taktik manipulasi psikologis supaya korban memberikan akses terhadap akun, perangkat, atau data pribadi)	3,8	0-4

7	<i>Phishing</i> (tindakan pencurian informasi dengan mengarahkan korban untuk masuk ke halaman/situs palsu)	3,8	0-4
8	Serangan digital berbasis gender (misalnya pelecehan secara verbal melalui teks dan audio visual, hingga ancaman kekerasan fisik)	3,8	0-4
9	Ancaman dan intimidasi yang bukan berbasis gender (mencakup ancaman kekerasan, pembunuhan, hingga intimidasi terkait konten jurnalistik)	3,6	0-4
10	Diawasi/ <i>stalked</i>	3,2	0-4
Rata-rata		3,7	0-4

Dari 10 jenis kekerasan di atas, diawasi/*stalked* memiliki skor paling rendah (3,2) atau merupakan jenis kekerasan yang paling sering dialami oleh para responden, diikuti dengan ancaman dan intimidasi yang bukan berbasis gender (3,6). Sementara itu, jenis-jenis kekerasan lainnya cenderung memiliki skor yang relatif baik atau jarang dialami (skor 3,6 ke atas), dengan yang paling jarang dialami responden ada tujuh, yaitu penyebaran rumor/fitnah, *doxing*, peniruan identitas, peretasan, *social engineering*, *phishing*, dan serangan digital berbasis gender (masing-masing 3,8).

Dua jenis kekerasan digital yang paling sering dialami responden tersebut (diawasi/*stalked* dan ancaman yang bukan berbasis gender) juga konsisten dengan temuan riset AJI Indonesia *Keamanan Digital Perusahaan Media di Indonesia* (Wendratama et al., 2024), yang mencatat bahwa dua jenis kekerasan digital itu paling sering dialami oleh karyawan perusahaan media (jurnalis dan non-jurnalis).

4. Siapa pelaku kekerasan/serangan digital tersebut?

Selanjutnya, responden diminta menjawab pelaku yang melakukan kekerasan digital terhadap dirinya, dengan adanya pilihan tidak pernah bagi responden yang tidak pernah mengalami kekerasan digital. Di sini tiap responden bisa memilih lebih dari satu jawaban.

Tabel 22
Pelaku Kekerasan Digital Terhadap Jurnalis Lingkungan

No.	Pelaku Kekerasan Digital	Frekuensi	Persentase
1	Polisi	32	13,1%
2	TNI	20	8,2%
3	Jaksa	2	0,8%
4	Aparatur pemerintah	25	10,2%
5	Organisasi masyarakat	15	6,1%
6	Warga	17	7,0%
7	Perusahaan	26	10,7%
8	Partai politik	8	3,3%

9	Pekerja profesional	10	4,1%
10	Preman	30	12,3%
11	Pelaku lainnya (Anggota DPR, Orang tidak dikenal)	2	0,8%
12	Tidak pernah	57	23,4%
Total		244	100%

Dari 10 pilihan jawaban, polisi menjadi pihak yang paling sering melakukan kekerasan digital (13,1%), diikuti preman (12,3%), perusahaan (10,7%), aparaturn pemerintah (10,2%), dan TNI (8,2%).

Temuan riset ini menunjukkan, hanya 57 responden (45,6%) yang tidak pernah mengalami kekerasan fisik, atau terdapat 68 responden (54,4%) yang pernah mengalami kekerasan digital selama melakukan liputan tentang isu lingkungan. Angka ini memprihatinkan, mengingat mayoritas responden pernah mengalami kekerasan digital saat mengerjakan jurnanisme untuk isu lingkungan.

5. Apakah Anda pernah mengalami kekerasan lain di luar fisik dan digital (seperti di bawah ini) selama melakukan liputan tentang isu lingkungan?

Peneliti juga menanyakan pengalaman responden terkait dua jenis kekerasan selain fisik dan digital, yaitu pemidanaan terkait kerja jurnalistik dan diskriminasi gender di tempat kerja. Di sini responden diminta memilih satu dari lima jawaban terkait frekuensinya, yaitu tidak pernah, jarang, kadang, sering, dan sangat sering.

Lalu, peneliti memberikan nilai untuk setiap jawaban tersebut, mulai 4 hingga 0, dengan tidak pernah bernilai 4 dan sangat sering bernilai 0. Jadi, semakin tidak pernah atau jarang responden mengalami kekerasan, semakin tinggi atau baik nilainya.

Tabel 23
Nilai Rata-rata Responden untuk Kekerasan Lain

No.	Jenis Kekerasan Lain	Nilai rata-rata responden	Skala
1	Pemidanaan atau kriminalisasi terkait kerja jurnalistik	3,8	0-4
2	Diskriminasi gender di tempat kerja	3,7	0-4
Rata-rata		3,8	0-4

Temuan riset menunjukkan, tidak ada perbedaan signifikan untuk pengalaman responden terkait pemidanaan atau kriminalisasi terkait kerja jurnalistik (skor 3,8) dan diskriminasi gender di tempat kerja (skor 3,7). Ini menunjukkan bahwa dua jenis kekerasan itu sangat jarang dialami oleh para responden.

6. Siapa pelaku kekerasan lain tersebut?

Selanjutnya, responden diminta menjawab pelaku yang melakukan kekerasan lain terhadap dirinya, dengan adanya pilihan tidak pernah bagi responden yang tidak pernah mengalami dua kekerasan tersebut. Di sini tiap responden bisa memilih lebih dari satu jawaban.

Tabel 24
Pelaku Kekerasan Lain di Luar Fisik dan Digital

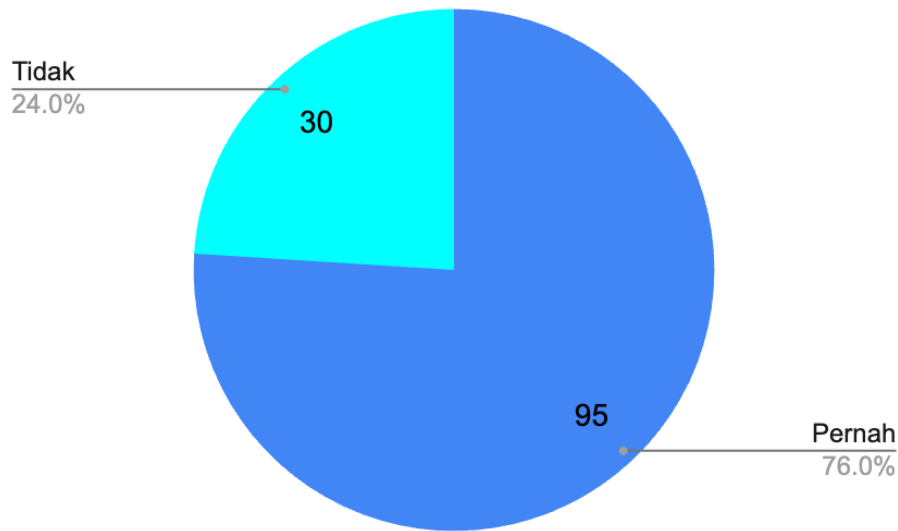
No.	Pelaku Kekerasan Lain	Frekuensi	Persentase
1	Polisi	19	10,6%
2	TNI	8	4,4%
3	Jaksa	1	0,6%
4	Aparatur pemerintah	10	5,6%
5	Organisasi masyarakat	9	5,0%
6	Warga	8	4,4%
7	Perusahaan	16	8,9%
8	Partai politik	2	1,1%
9	Pekerja profesional	9	5,0%
10	Preman	7	3,9%
11	Lainnya (Orang di kantor lama, Orang tidak dikenal, Rekan kerja, Wartawan, Imigrasi)	5	2,8%
12	Tidak pernah	86	47,8%
	Total	180	100%

Dari 10 pilihan jawaban, polisi menjadi pihak yang paling sering melakukan dua jenis kekerasan tersebut (10,6%), diikuti perusahaan (8,9%), aparaturn pemerintah (5,6%), dan organisasi masyarakat dan pekerja profesional (masing-masing 5%).

Temuan riset ini menunjukkan, 86 responden (68,8%) yang tidak pernah mengalami kekerasan fisik, atau terdapat 39 responden (31,2%) yang pernah mengalami dua jenis kekerasan tersebut selama melakukan liputan tentang isu lingkungan. Angka ini menunjukkan, kekerasan fisik dan digital jauh lebih mendominasi dibanding dua jenis kekerasan itu bagi para responden saat meliput isu lingkungan.

Kemudian untuk merangkum tiga kategori kekerasan tersebut (fisik, digital, dan lainnya) riset ini menemukan 95 responden (76%) pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan dalam tiga kategori tersebut saat meliput isu lingkungan. Dengan kata lain, hanya 30 responden (24%) yang sama sekali tidak pernah mengalami kekerasan.

Diagram 9
Gambaran Pengalaman Kekerasan



Temuan ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat mayoritas responden (76%) pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan saat meliput isu lingkungan.

Angka tersebut juga mirip dengan temuan riset AJI Indonesia (Masduki et al., 2025) terhadap 2,020 jurnalis yang tersertifikasi Dewan Pers, yang mencatat sebanyak 75,1% jurnalis pernah mengalami kekerasan sepanjang karier jurnalistik mereka.

Sebagai perbandingan lain, riset UNESCO terhadap 905 jurnalis lingkungan dari 129 negara pada 2024 (Burgess et al., 2024) mencatat bahwa 70% dari 905 jurnalis itu pernah mengalami kekerasan (serangan, ancaman, atau tekanan) terkait liputan mereka. Lebih lanjut, 40% dari jurnalis yang pernah mengalami kekerasan itu juga mengalami kekerasan fisik.

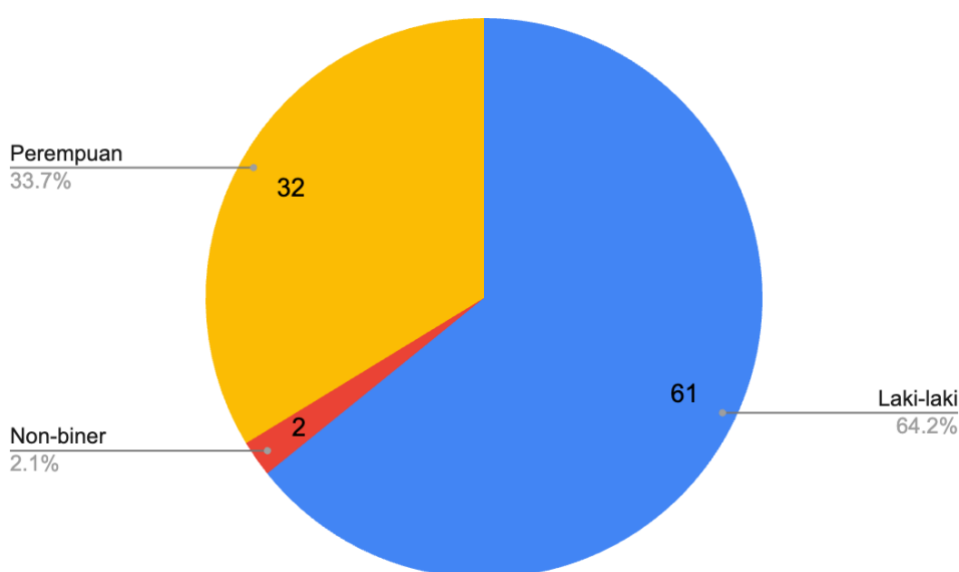
Mengenai pelaku kekerasan, dominasi aktor negara (polisi, TNI, aparat pemerintah) sebagai pelaku yang cukup sering melakukan tindak kekerasan konsisten dengan pengalaman kekerasan yang dialami oleh jurnalis lingkungan secara global. Data yang dihimpun UNESCO (Burgess et al., 2024) tentang kekerasan terhadap jurnalis lingkungan di 129 negara menunjukkan, aktor negara (polisi, militer, dan aparat pemerintah) bertanggung jawab terhadap mayoritas serangan terhadap jurnalis lingkungan selama 2009-2023.

Kemudian, dari 95 responden yang pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan dalam tiga kategori di atas, mayoritasnya adalah laki-laki (64,2%), dengan perempuan sebanyak 33,7% dan non-biner 2,1%.

Tabel 25
Gender Responden yang Pernah Mengalami Kekerasan

No.	Gender responden yang pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	61	64,2%
2	Non-biner	2	2,1%
3	Perempuan	32	33,7%
	Total	95	100%

Diagram 10
Pengalaman Kekerasan dari Sisi Gender Responden



7. Bentuk/jenis kekerasan yang dialami jurnalis perempuan

Dari 32 jurnalis perempuan yang menyatakan pernah mengalami kekerasan di atas, mereka diminta menuliskan contoh kekerasan yang mereka alami.

Jenis kekerasan yang paling banyak mereka sebutkan adalah ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat non-seksual (kategori kekerasan fisik). Ini konsisten dengan skor rata-rata responden untuk semua jenis kekerasan di atas, dengan ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat non-seksual memiliki skor paling rendah (3,1). Contoh yang mereka sebutkan antara lain “kekerasan verbal”, “pelecehan profesi oleh warga/narasumber”, “intimidasi dari narasumber karena mereka tidak senang dengan pemberitaan saya dan mengaku tidak pernah mengeluarkan *statement* itu, tapi saya punya bukti rekaman wawancara”, “pelecehan saat wawancara narasumber”, dan “tekanan psikologis”.

Jenis terbanyak berikutnya adalah diskriminasi gender di tempat kerja (kategori lainnya), yang contohnya antara lain “dianggap tidak profesional karena perempuan, sehingga kerap tidak ditempatkan setara”, “diberhentikan karena akan mengambil cuti melahirkan”, “gaji saya lebih rendah dari jurnalis laki-laki dengan posisi setara dan tanggung jawab serta beban kerja yang sama”, dan “perbedaan perlakuan terhadap jurnalis perempuan dan jurnalis laki-laki”. Jenis terbanyak selanjutnya adalah ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual (masuk dalam kategori kekerasan fisik), yang contohnya antara lain “*cat calling*”, “candaan seksis”, dan “pelecehan seksual”.

Sementara itu, jenis-jenis lain yang dicontohkan oleh para responden responden perempuan ini adalah “dilarang menaikkan bahan wawancara menjadi berita dan meminta berita yang sudah naik untuk *take down*”, “penghalangan kerja di lapangan”, dan “didorong ajudan pejabat karena tidak boleh mendekat saat wawancara”.

D. Dukungan dan Hambatan

1. Pemberi dukungan ketika jurnalis mengalami kekerasan

Di sini, responden ditanya mengenai pihak yang memberikan dukungan ketika mereka mengalami berbagai jenis kekerasan di atas (fisik, digital, dan lainnya). Bentuk dukungan ini bisa berupa bantuan hukum, pengobatan, bantuan moril, dan pengurangan jam kerja. Ada delapan pihak yang disebutkan dalam kuesioner, yaitu perusahaan media (pemilik, pemimpin, editor), kolega dari kantor sendiri, kolega dari kantor lain, asosiasi jurnalis, pemerintah, lembaga negara (LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan), polisi, dan lembaga non-profit. Untuk tiap pilihan jawaban (delapan pihak) tersebut, tiap responden bisa memilih lebih dari satu jawaban.

Tabel 26

Pihak yang Memberikan Dukungan saat Jurnalis Mengalami Kekerasan

No.	Pihak	Jumlah jurnalis yang pernah menerima dukungan	Persentase jurnalis yang pernah menerima dukungan (dibandingkan dengan jurnalis yang pernah mengalami kekerasan yang berjumlah 95 responden)
1.	Perusahaan media (pemilik, pemimpin, editor)	60	63,1%
2.	Kolega dari kantor sendiri	64	67,3%
3.	Kolega dari kantor lain	51	53,6%
4.	Asosiasi jurnalis	81	85,2%
5.	Pemerintah	12	12,6%

6.	Lembaga negara (LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan)	27	28,4%
7.	Polisi	12	12,6%
8.	Lembaga non-profit	47	49,4%

Tabel di atas menunjukkan, asosiasi jurnalis menjadi pihak yang paling banyak memberikan bantuan (85,2% responden yang pernah mengalami kekerasan menerima bantuan dari asosiasi jurnalis), diikuti kolega dari kantor sendiri (67,3%), perusahaan media (63,1%), dan kolega dari kantor lain (53,6%).

Hal ini menunjukkan, asosiasi jurnalis menjadi pihak yang paling berperan bagi para jurnalis lingkungan ketika mereka mengalami berbagai jenis kekerasan saat melakukan liputan, dengan polisi dan pemerintah menjadi pihak yang paling sedikit memberikan dukungan—bahkan polisi dan aparat pemerintah tercatat sebagai pihak yang cukup sering melakukan kekerasan (lihat tabel pelaku kekerasan fisik, digital, dan lainnya).

2. Apa saja bentuk hambatan di dalam redaksi selama meliput isu lingkungan?

Di sini responden diberi enam pilihan hambatan di dalam redaksi saat mereka meliput isu lingkungan, dengan tiap responden bisa memilih lebih dari satu hambatan.

Tabel 27
Hambatan di dalam Redaksi Selama Meliput Isu Lingkungan

No.	Hambatan	Frekuensi	Persentase
1	Swasensor oleh jurnalis	19	9,8%
2	Penghapusan data tertentu oleh editor	20	10,3%
3	Penundaan penayangan liputan	25	12,9%
4	Pelarangan liputan isu tertentu	26	13,4%
5	Pembatalan penayangan berita	16	8,2%
6	Pengurangan dan peniadaan anggaran	30	15,5%
7	Lainnya (Kebijakan redaksi dalam memilih fokus isu lingkungan)	1	0,5%
8	Tidak ada hambatan sama sekali	57	29,4%
	Total	194	100%

Temuan riset menunjukkan, hambatan yang paling sering ditemui responden adalah pengurangan dan peniadaan anggaran (15,5% dari total jawaban), diikuti pelarangan liputan isu tertentu (13,4%), penundaan penayangan liputan (12,9%), penghapusan data tertentu oleh editor (10,3%), dan swasensor oleh jurnalis (9,8%).

Sementara itu, sebanyak 57 responden (29,4% dari total jawaban) menyatakan tidak pernah menemui hambatan sama sekali. Dengan kata lain, dari total 125 responden yang terlibat riset ini, terdapat 68 responden yang menyatakan pernah menemui hambatan dalam redaksi saat meliput isu lingkungan. Ini menunjukkan

bahwa mayoritas responden masih menemui hambatan internal dari dalam redaksi untuk peliputan isu lingkungan.

Fenomena tersebut juga dialami oleh jurnalis lingkungan secara global, seperti ditunjukkan oleh riset UNESCO berjudul *Press and Planet in Danger* (Burgess et al., 2024). Riset tersebut mencatat, 33% dari 905 responden di 129 negara mengatakan liputan mereka mengalami penyensoran oleh editor, dan 45% dari 905 responden pernah melakukan swasensor karena khawatir mengalami serangan, narasumber mereka terancam, dan terjadinya konflik dengan kepentingan perusahaan media atau pengiklan.

3. Apa saja bentuk dukungan yang sudah tersedia bagi jurnalis lingkungan?

Di sini responden diberi lima pilihan bentuk dukungan yang sudah tersedia bagi mereka, dengan tiap responden bisa memilih lebih dari satu jawaban.

Tabel 28
Dukungan yang Sudah Tersedia bagi Jurnalis Lingkungan

No.	Dukungan yang Sudah Tersedia	Frekuensi	Persentase
1	Akses terhadap pengetahuan mengenai lingkungan	94	21,9%
2	Akses terhadap pelatihan jurnalisme lingkungan	92	21,4%
3	Hibah pendanaan atau beasiswa liputan	82	19,1%
4	Dukungan media tempat bekerja	71	16,5%
5	Jejaring masyarakat sipil	86	20,0%
6	Lainnya (Tidak pernah, Dukungan belum aktif dan maksimal, Minim akses terhadap pelatihan)	5	1,2%
	Total	430	100%

Bentuk dukungan yang paling sering tersedia bagi responden adalah akses terhadap pengetahuan mengenai lingkungan (21,9%), diikuti akses terhadap pelatihan jurnalisme lingkungan (21,4%), jejaring masyarakat sipil (20%), hibah pendanaan atau beasiswa liputan (19,1%), dan dukungan media tempat bekerja (16,5%).

Ini menunjukkan bahwa, menurut para responden, dukungan dari media tempat jurnalis bekerja masih kurang jika dibandingkan bentuk dukungan yang diberikan oleh pihak lainnya.

4. Apa pandangan Anda terhadap dukungan dalam liputan lingkungan dari pemangku

kepentingan di bawah ini? (dari sisi keamanan, pendanaan, akses ke sumber data, bantuan hukum, dll).

Responden diminta memberikan pandangannya terhadap dukungan dari tujuh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan liputan lingkungan. Ini bisa berbentuk dukungan kemananan, pendanaan, akses ke sumber data, bantuan hukum, dan

lainnya. Untuk tiap pilihan pemangku kepentingan, responden diminta memberikan penilaian sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang.

Peneliti memberikan skor 0 hingga 4 untuk tiap pilihan penilaian tersebut, dengan sangat kurang bernilai 0 dan sangat baik bernilai 4.

Tabel 29
Pandangan terhadap Dukungan yang Diberikan oleh Pemangku Kepentingan

No.	Pemangku Kepentingan yang Memberikan Dukungan	Nilai rata-rata responden	Skala
1	Pemerintah daerah	1,1	0-4
2	Lembaga Negara (LPSK, Komnas HAM & Komnas Perempuan)	1,8	0-4
3	Dewan Pers	2,0	0-4
4	Organisasi jurnalis	3,0	0-4
5	Lembaga Bantuan Hukum	2,4	0-4
6	Organisasi masyarakat sipil (WALHI, Greenpeace)	2,9	0-4
7	Perusahaan Media	2,5	0-4
	Rata-rata	2,2	0-4

Riset ini menemukan, pihak yang dinilai responden paling baik dalam memberikan dukungan bagi pelaksanaan liputan lingkungan adalah organisasi jurnalis (nilai 3,0), diikuti organisasi masyarakat sipil seperti WALHI dan Greenpeace (2,9), perusahaan media (2,5), lembaga bantuan hukum (2,4), dan Dewan Pers (2,0).

Sementara itu, pemangku kepentingan yang mendapat nilai paling rendah adalah pemerintah daerah (1,1) dan lembaga negara (LPSK, Komnas HAM & Komnas Perempuan) (1,8).

Secara keseluruhan, tujuh pemangku kepentingan tersebut mendapat nilai 2,2, yang mengindikasikan bahwa dukungan para pemangku kepentingan terhadap peliputan isu lingkungan sudah cukup baik.

5. Klarifikasi, tambahan informasi, dan pengalaman terkait kekerasan selama liputan yang belum ditanyakan dalam survei di atas

Sebagian responden menyampaikan pengalaman kekerasan yang pernah mereka alami:

1. "Ancaman melalui telepon dari orang yang tak dikenal."
2. "Dalam kasus peliputan isu agraria di Pulau Rempang, beberapa jurnalis termasuk saya sering mendapatkan tekanan dari pemangku kepentingan dan pihak TNI/polisi."
3. "Hanya ancaman mau ditembak saja dan pernah HP diretas."

4. “Intimidasi oleh perusahaan yang dituding merusak lingkungan menggunakan kelompok masyarakat tertentu, akibatnya jurnalis bentrok dengan masyarakat.”
5. “Ancaman dari perusahaan dan preman saat meliput di lapangan.”
6. “Saya dan sebagian kawan beberapa kali mendapatkan ancaman verbal oleh warga sekitar yang menjadi pekerja limbah medis.”
7. “Saat liputan tambang, pernah mendapatkan ancaman rumah didatangi dan teror melalui ponsel.
8. “Sebagai jurnalis perempuan, pengalaman kekerasan yang paling sering saya hadapi adalah pelecehan verbal di lapangan dan ancaman online setelah menerbitkan laporan kritis. Selain itu, intimidasi dari pihak berkuasa sering dilakukan secara halus melalui tekanan psikologis, seperti mempertanyakan kredibilitas saya atau menyebarkan informasi palsu untuk merusak reputasi. Tantangan lainnya adalah menghadapi stereotip bahwa perempuan kurang mampu meliput isu-isu berat, seperti lingkungan dan politik, yang membuat saya harus bekerja ekstra untuk membuktikan profesionalisme.”

Kelompok jawaban terbanyak berikutnya adalah hambatan yang mereka alami saat meliput isu lingkungan. Contohnya antara lain:

1. “Hubungan kerjasama antara kantor dan pemerintahan menjadi hambatan utama dalam meliput isu-isu sensitif seperti lingkungan.”
2. Dukungan pendanaan bagi media lokal yang fokus ke isu lingkungan sangat jarang.”
3. “Isu lingkungan kerap kali berhubungan dengan politik, terkadang akses informasi dan konfirmasi sulit, data juga tidak tersedia.”
4. Jurnalis di daerah sulit mendapatkan akses ke lembaga/instansi yang berada di Jakarta sehingga butuh bantuan.”
5. “Saat ini liputan lingkungan sangat terbatas bagi saya, mengingat saya berada di perusahaan media yang bekerjasama dengan sejumlah perusahaan tambang di Maluku Utara.”
6. “Keterbatasan pembiayaan serta dukungan redaksi yang masih kurang.”
7. “Upaya sensor terhadap hasil liputan pernah dilakukan oleh pihak perusahaan media saya, karena mereka terikat kontrak dengan perusahaan tambang”.

BAB III

WAWANCARA: DARI KEKERASAN FISIK HINGGA SWASENSOR

Untuk melengkapi informasi mengenai tantangan jurnalis lingkungan di Indonesia dalam memberitakan isu ini, studi ini dilengkapi dengan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara daring dan luring, kepada perwakilan individu jurnalis lingkungan dan perwakilan dari unsur manajemen redaksi media serta bagian bisnis di media yang memiliki desk lingkungan. Informan mewakili media nasional dan lokal serta sudah menggambarkan keragaman wilayah Jawa dan luar Jawa - mewakili barat, tengah dan timur Indonesia. Media yang di wilayahnya sedang beroperasi Proyek Strategis Nasional (PSN) ataupun kategori usaha tambang yang ekstraktif menjadi prioritas sebagai informan.

Untuk mendapatkan gambaran tentang tantangan meliput isu lingkungan, sebanyak lima belas (15) jurnalis dan editor lingkungan diwawancarai. Berikut data yang didapat dari wawancara dengan tujuh (7) informan jurnalis lapangan.

A. Jurnalis: Hambatan Kultural dan Struktural

Pemahaman Terhadap Isu Lingkungan

Riset ini menemukan data bahwa mayoritas jurnalis yang menjadi informan memahami isu lingkungan sebagai isu yang amat kompleks. Enam misalnya, menyebut isu lingkungan merupakan serangkaian masalah yang terkait alam serta relasinya dengan manusia. Memahami isu lingkungan, menjadi tantangan tersendiri bagi informan Enam. Apalagi, latar belakang pendidikan Enam pendidikan keguruan.

“Kalau aku jadi wartawan terus langsung tertarik dengan isu lingkungan, itu nggak ya. Menurutku itu isu yang sulit dipelajari. Mau bilang kebakaran di lokasi ini seluas 5 hektar itu sulit banget. Kalau cuma nerima dari omongan orang, atau omongannya narasumber. Jadi aku pernah minta bantuan untuk pakai citra satelit dan ternyata tidak 5 hektar tetapi 10 hektar dan itu kan butuh waktu”. (Informan 6, 2 September 2025)

Kompleksnya isu lingkungan, juga diakui oleh Informan Tujuh. Perjalanan Tujuh selama 2,5 tahun di program mendalam (*In-Depth Reporting*) sebuah stasiun televisi berita membuatnya menyadari ketertarikannya pada isu lingkungan. Terutama isu krisis iklim. Sejak itu, ia kerap mengajukan ide liputan lingkungan terutama yang terkait kebijakan publik yang merugikan lingkungan. *“Isu lingkungan itu banyak sekali ya...definisi liputan isu lingkungan seperti apa itu pendekatannya lebih kepada mereka yang terdampak dan minta accountability-nya pada pemerintah”. (Informan 7, 3 September 2025)*

Informan Sembilan yang kini merupakan jurnalis lepas, sebelumnya adalah jurnalis televisi. Sama seperti Tujuh, menurut Sembilan isu lingkungan adalah soal ruang hidup. *“Isu lingkungan itu bukan sekedar pohon ditebang atau pencemaran lingkungan...ini soal ruang hidup, ruang hidup itu yang mencakup manusianya,*

mencakup floranya dan mencakup faunanya karena ini mencakup banyak aspek...maka nanti akan pada soal ekonomi, soal tradisi dan budaya, soal gastronomi, soal konservasi satwa dan macam-macam". (Informan 9, 4 September 2025)

Adapun informan ke-13 memaknai isu lingkungan sebagai isu yang erat kaitannya dengan ekologi yang terkait dengan banyak hal. Termasuk isu keamanan. *"Erat kaitannya dengan ekologi, ekosistem dengan masyarakat, dengan perusahaan, korporasi sehingga berkaitan dengan negara dan negara dalam hal ini pemerintah, berkaitan dengan kekuatan aparat keamanannya, berkaitan dengan ekonomi"* (Informan 13, 14 September 2025)

Empat Belas, melihat isu lingkungan bagian tak terpisahkan dengan politik dan perempuan.

"Dalam prinsip liputan yang saya gunakan apapun produk politik yang dibuat cuma dua yang merasakan dampak terburuknya. Pertama lingkungan dan yang kedua perempuan. Karena perempuan itu kita berbicara soal tataran sosial terkecil di negara itu kan rumah tangga dan beban terbesar rumah tangga ada pada perempuan". (Informan 14, 14 September 2025)

Empat Belas melihat dalam kehidupan sehari-hari, perempuan banyak mengambil peran. Namun, perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk berbagai produk politik baik di tingkat daerah maupun pusat. Ini yang menurut Empat Belas, menyebabkan ketimpangan.

Ketertarikan informan pada isu lingkungan, rata-rata terbangun sejak awal karir jurnalistik mereka. Informan satu mengaku mulai menulis isu lingkungan sejak awal di media. Bahkan, di saat isu lingkungan ini tidak populer di media pertama tempatnya bekerja, lantaran sedikit sekali yang menulis soal ini. Perempuan usia 30-an tahun ini, tetap menulis isu lingkungan, di tengah kewajiban menulis isu *"hard"* yang dianggap lebih disukai seperti isu politik, korupsi ataupun konflik/ kekerasan. Walau itu artinya, harus meluangkan waktu lebih banyak lantaran kewajiban meliput isu reguler tetap terpenuhi.

Adapun Lima, baru memulainya pada 2021, setelah ia menulis untuk media lingkungan.

Sementara, Enam bahkan memulainya sejak mahasiswa pada 2010 yang kemudian diteruskan ketika menjadi calon jurnalis hingga jurnalis profesional. Walau awalnya saat mulai menulis sebagai calon wartawan pada 2014, tulisannya berbasis *"talking news"* yang mengandalkan pernyataan narasumber resmi dan belum didukung reportase lapangan serta suara mereka yang terdampak. *"Waktu masih belum wartawan, aku udah meliput tentang kebakaran hutan dan lahan tapi saat itu belum ke lapangan karena aku masih di Jakarta sedangkan kejadiannya di Kalimantan, Sumatera dan Papua waktu itu".* (Informan 6, 2 September 2025). Barulah di 2015, Enam menulis berita lingkungan yang lebih banyak menyuarakan mereka yang

terdampak karena ditempatkan di wilayah yang banyak usaha ekstraktif dan pengrusakan hutan.

Informan Tujuh, pertama kali meliput isu lingkungan pada 2019. Saat itu perempuan jurnalis ini meliput bencana yang mengintai di Bandung Utara. Memburuknya kondisi lingkungan terlihat nyata dan ia menyaksikan pembangunan yang tidak sesuai peruntukannya. Kesadaran akan pentingnya isu lingkungan yang terbangun dari liputan harian itu, menemukan muaranya saat ia dipindahkan ke program yang menyajikan laporan mendalam untuk beragam isu.

“Aku dulu berangkat dari reporter. Aku ngerasa kayak ternyata isu lingkungan itu di buletin atau di berita harian itu sebatas peristiwa bencana atau pers rilis dari pemerintah. Jadi pemerintah sudah melakukan ini-ini-ini tetapi in-depth-nya atau lebih ke manusianya atau solusinya itu tidak banyak dibahas di ruang-ruang liputan harian, baik itu liputan hariannya maupun di dialognya ya biasanya kita ada talk show atau dialog”. (Informan 7, 3 September 2025)

Sementara, pintu masuk liputan isu lingkungan bagi Sembilan adalah meliput isu kaum marjinal. *“Jadi keadilan sosial soal masyarakat pedesaan yang termarginalkan, lalu masyarakat adat dan konflik agraria, baru kemudian merambah soal isu-isu konsesi tambang, konsesi sawit dan macam-macam dan puzzle-puzzle itu yang jadi satu. Saya menganggap bahwa isu lingkungan itu tidak bisa dimonopoli dengan label saya jurnalis lingkungan...tetapi saya bicara soal manusia yang ada di dalamnya, saya bicara soal ekosistem yang ada di dalamnya dan bagaimana menjembatannya”. (Informan 9, 4 September 2025)*

Informan Tiga Belas mulai meliput isu lingkungan sejak 2012 atau setahun sejak ia menjadi jurnalis. Ia merantau ke Merauke, Papua pada 2011 dan langsung bekerja di media lokal. *“Kita ini straight news di koran lokal tetapi waktu itu saya tertarik melihat lingkungan karena merasa prihatin dengan kondisi masyarakat di sana”. (Informan 13, 14 September 2025)*

Empat Belas fokus pada isu lingkungan sejak 2008. Saat itu ia memproduksi film dokumenter tentang sebuah desa yang berprofesi. Mulanya mereka menjadi penambang, kemudian beralih menjadi perajin anyaman daun untuk atap rumah. Persinggungan pertamanya dengan perempuan sebagai warga yang menggerakkan perubahan ini, membuat Empat Belas lebih peka akan isu perempuan dan lingkungan.

“Iya, perempuan berdaya, kelompok-kelompok. Karena mereka menyadari, mereka harus mandiri dalam pengelolaan lingkungan karena perempuan dan lingkungan itu karena ruang hidup mereka yang terdekat untuk perempuan kelola dalam artian mengurus keluarga, membagi waktu”. (Informan 14, 14 September 2025)

Alasan Memberitakan Isu Lingkungan

Para jurnalis lingkungan yang diwawancarai rata-rata meliput isu lingkungan lantaran **melihat langsung persoalan** atau bahkan **merasakan dampak kerusakan lingkungan** di daerahnya masing-masing. Informan Lima menuturkan, isu lingkungan **jarang sekali diangkat** ke media. Untuk itu, jurnalis media online ini ingin mengisi ruang kosong tersebut. Menurutnya, bila jurnalis daerah, warga tidak menuliskan praktek pengrusakan lingkungan, dan aktivitas yang berdampak pada lingkungan di wilayah tempat tinggalnya, maka publik tidak akan tahu.

“Media-media di daerah itu paling banyak tertarik dengan isu-isu politik, hukum, peristiwa tetapi jarang mereka menulis soal isu lingkungan yang lebih dalam, bahkan itu tidak pernah”. (Informan 5, 27 Agustus 2025)

Ketertarikan Lima bermula dari keikutsertaan pada sebuah *fellowship* yang mengharuskannya mengangkat isu sawit. Dari sini, ia tertarik mengangkat isu lingkungan.

“Menarik karena sebenarnya menulis isu lingkungan itu bukan hanya menulis tetapi juga belajar sebenarnya. Menulis soal lingkungan itu seperti memahami lebih dalam, sebenarnya apa fungsi media ini...Kalau dalam cerita saya itu 80% itu cerita masyarakat, 20% konfirmasi. Yang membuat saya tertarik karena ketemu dengan masyarakatnya langsung yang cukup rentan”. (Informan 5, 27 Agustus 2025)

Lima, bahkan **membuat media sendiri** khusus untuk menyuarakan isu lingkungan terutama yang terjadi di daerahnya. Media yang dibangun setahun lalu ini, belum berbadan hukum. Dan sampai saat ini, kontennya masih berisi replikasi tulisan-tulisan Lima dan partnernya sebelum diedit oleh Editor media online nasional.

“Saya buat (media) dengan teman satu itu karena di lokal itu (jurnalis) diam, banyak sudah kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan perusahaan. Ketika mereka sudah kerja sama dengan perusahaan itu mereka tidak kritis lagi bicara lebih dalam soal dampak pada aktivitas perusahaan atau kebijakan yang dilakukan pemerintah yang justru memicu kerusakan lingkungan”. (Informan 5, 27 Agustus 2025)

Lima menuturkan, minimal seminggu sekali ada berita lingkungan yang naik. Walau pernah juga ketika isu lingkungan sedang hangat, bisa muncul lima berita dalam sepekan. Pembacanya ada di rentang usia 20-30 tahun. Kebanyakan warga Celebes. Media yang digagas Lima juga memberi ruang bagi akademisi untuk menulis isu lingkungan atau berbagi hasil riset terkait lingkungan di kolom opini.

Lima sendiri mengaku masih bingung mengarahkan bentuk badan hukum medianya. Biaya yang dikeluarkan sampai saat ini baru membayar *hosting* domain, sekitar Rp 1 juta per tahun yang disisihkan dari penghasilan sebagai jurnalis.

“Buat skema bisnisnya yang agak sulit kita di daerah karena orang kan, juga karena mungkin dominasi formasi di daerah itu paling banyak hanya soal hukum dan peristiwa. Ketika kita buat skema bisnis yang mungkin itu bisa menarik publik untuk bisa mendonasi itu juga agak sulit karena pembacanya sedikit di daerah”. (Informan 5, 27 Agustus 2025)

Meski begitu, Lima membuka donasi publik sejak awal, yang muncul dalam bentuk *pop up* ketika pembaca berselancar di website. Lima juga membuat **garis api (firewall) tegas** di media yang didirikannya. *“Kita sudah buat penegasan untuk publik bahwa kita tidak mau kerja sama dengan (perusahaan) ekstraktif bahkan orang yang terafiliasi dengan perusahaan itu. Tidak mau. Makanya saya bingung, kita buat PT, Koperasi atau yayasan karena skema Dewan Pers membuat bingung juga apalagi harus terverifikasi dan lainnya inikan agak sulit”. (Informan 5, 27 Agustus 2025)*

Senada dengan Lima, informan Enam juga terdorong menulis isu lingkungan lantaran terdampak langsung perubahan lingkungan tempat hidupnya akibat tambang. Aktivitas pertambangan memotong separuh bukit tempat informan Enam dulu bermain di waktu kecil. Jadilah tulisan pertama terkait lingkungan yang ditulisnya saat masih mahasiswa, menyoal apa yang terjadi di tanah kelahirannya. *“Aku nggak bilang suka ya (isu lingkungan), waktu itu terdorong situasi. Rumah di kampungku dekat dengan lokasi pertambangan. Jadi karena aku ngerasain dampaknya”. (Informan 6, 2 September 2025)*

Enam makin leluasa menulis lingkungan saat menjadi jurnalis media cetak nasional. Apalagi, di wilayah penugasannya, Enam lagi-lagi merasakan langsung dampak kerusakan lingkungan. Wilayah liputannya langganan kabut asap.

Perjalanan dan diskusi dengan Editor, membuat Enam makin matang menulis isu lingkungan, memberi konteks serta gambaran pada publik apa dampak kerusakan lingkungan pada manusia.

“Jawaban sederhananya ya. Jadi editor kalau udah isu lingkungan itu naik dan beberapa kali naik terus, jadi aku jadi seneng gitu. Wartawan seneng kalau tulisannya di-publish apalagi di koran. Yang kedua itu aku sering banget nulis tentang masyarakat adat. Kayak udah deket, nggak tahu sebenarnya boleh atau nggak jurnalis seperti itu”. (Informan 6, 2 September 2025)

“Aku melihat bagaimana susahny mereka dan bagaimana mereka (dekat) banget sama hutannya dan itu yang mendorong kemudian aku nulis tentang isu lingkungan terus”. (Informan 6, 2 September 2025)

Menurutnya, ini menunjukkan sikap atau keberpihakan sebagai jurnalis. Enam sempat mengilustrasikan bagaimana dirinya mengawal warga Komunitas Adat yang salah tangkap, dituduh sebagai pelaku pembakar hutan melalui tulisannya. Bahkan Enam membangun disiplin jurnalismenya sendiri. Ketika ditempatkan menjadi penguasa wilayah, ia selalu membuat perencanaan liputan sendiri setahun ke depan,

berangkat dari pengalaman meliput isu lingkungan. Hasilnya, tulisan Enam “dimakan” pembaca.

Sebanyak 80 persen tulisan Enam selama hampir satu dekade terakhir, menyoal perubahan lingkungan di jantung Borneo. Walau, di sela-sela menulis lingkungan, Enam tetap harus meliput isu lainnya. Sayangnya, setahun terakhir Enam digeser ke ibukota.

“Ya udah beda lagi zona liputannya. Sekarang lebih banyak ekonomi tapi masih beberapa kali aku kaitkan juga dengan isu-isu di daerah kayak aku pernah nulis tentang sawit di sini, itu aku angkat lagi kasus-kasus kayak penangkapan kepala desa di Tempayung, Kotawaringin Barat itu tetap aku berusaha kaitkan sama kondisi di lapangan, masih usaha-lah”. (Informan 6, 2 September 2025)

Tujuh juga tergerak untuk mendalami isu lingkungan, setelah **melihat langsung dampak** pembangunan yang mengabaikan alam di Bumi Parahyangan. *“Banyak longsor di situ, banyak hotel-hotel yang dibangun di situ jadi degradasi lingkungan itu terlihat nyata dan ternyata memang ada pembangunan yang tidak sesuai dengan prosedur dan sebagainya. Lalu berangkat dari situ aku ikut training lingkungan waktu itu dari Deutsche Welle Akademie melalui online itu berjalan di tengah aku liputan debu batubara di Pelabuhan Marunda”. (Informan 7, 3 September 2025)*

Sementara, kesadaran Sembilan bahwa isu lingkungan adalah soal ruang hidup muncul setelah banyak meliput dengan pendekatan *indepth reporting*. Kesempatan belajar ini, bermula saat ia menjadi jurnalis media cetak di daerah. Kemudian berlanjut di awal ia bekerja untuk media televisi pada 2015. Masa bulan madu ini, berlangsung hingga 2019. Setelah medianya makin dekat dengan penguasa, isu lingkungan tak lagi punya ruang di media. *“Awal-awal itu diberi keleluasaan untuk membuat pengajuan liputan...Kalau dulu masih waras, begitu jadi sahabat rezim itu udah beda lagi kebijakan redaksinya”. (Informan 9, 4 September 2025)*

Sembilan sempat diberi slot khusus setengah jam untuk menayangkan berbagai isu terkait ruang hidup dengan tiga segmen. Tidak ada jadwal tetap, tidak dikejar tayang karena waktu itu yang diutamakan adalah kualitas. Ia mengingat, hanya memproduksi 4 tayangan mendalam selama setahun. Barulah pada 2022, dibuat program sekali sepekan yang bertajuk *Indepth Reporting*. Namun tak sampai setahun, program ini tutup dengan alasan efisiensi. Program ini sebenarnya tidak secara khusus memuat isu lingkungan, namun bila Sembilan yang berkesempatan mengisinya, ia selalu mengajukan isu lingkungan.

Senada dengan Sembilan, Empat Belas juga menyebut lingkungan sebagai ruang hidup manusia. Perilaku manusia membentuk lingkungan. Banyaknya persoalan lingkungan inilah yang membuat Empat Belas tertarik meliput bahkan membuat film dokumenter tentang lingkungan. Sementara, Tiga Belas tertarik dengan persoalan lingkungan, lantaran menurutnya di wilayahnya isu ini lekat dengan aparat keamanan.

“Berbicara soal lingkungan itu yang kita lihat lahan pembukaan hutan secara besar, eksploitasi hutan secara besar dimana untuk kepentingan dan itu selalu ada penempatan anggota polisi, anggota Brimob bahkan dari Angkatan Darat. Saya melihat itu kayak ada semacam ancaman tersendiri bagi masyarakat apabila ada masyarakat yang merasa tidak puas dengan pihak perusahaan”. (Informan 13, 14 September 2025)

Tiga Belas sempat berpindah-pindah media, walau sama-sama media lokal di Papua. Baru di media yang ia awaki saat ini, Tiga Belas lebih leluasa meliput isu lingkungan.

“Saya melihat kesenjangan. Pertama dalam lingkungan itu kan ada masyarakat, masyarakat terutama yang punya tanah, masyarakat lokal. Bagaimana kehidupan masyarakat lokal dalam “sangat makin susah” dari tampilan fisiknya, berbeda dengan orang-orang yang berada di lingkaran perusahaan itu. Mereka mau cari makan saja susah dan banyak keluhan-keluhan dari mereka, sebelum perusahaan masuk itu ada janji-janji, janji bagaimana untuk menyekolahkan anak. Jadi program tanggung jawab sosialnya banyak yang tidak ditepati tetapi terutama sih sebenarnya kesenjangan”. (Informan 13, 14 September 2025)

Informan Lima mengaku paling banyak menulis isu tambang, sawit, dan krisis iklim. *“Karena di lingkungan itu mungkin banyak ilmu yang perlu kita dalami sebenarnya, karena saya belum ada spesifikasi keilmuan di lingkungan. Makanya saya sampai hari ini isu paling banyaknya isu di darat, tambang, sawit, krisis iklim paling banyak saya tulis”. (Informan 5, 27 Agustus 2025)*. Adapun Tiga Belas, banyak menulis soal hutan yang hilang dan dikaitkan dengan masyarakat pemilik tanah. Empat Belas mulai banyak memberitakan isu lingkungan terutama isu pesisir dan energi terbarukan pada 2016. Barulah sejak 2019, ia memfokuskan dampak perubahan lingkungan ke fokus kelompok perempuan terdampak.

“Saya fokus awalnya banyak meliput isu pesisir, biodiversitas. Di pesisir itu berkumpul kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, lengkap...Perubahan (lingkungan) itu memperparah, jadi pragmatis kan”. (Informan 14, 14 September 2025)

Tantangan Liputan Isu Lingkungan Di Media

Tantangan meliput isu lingkungan, yang pertama menurut para informan harus belajar isu ini yang sangat kompleks. *“Ancamannya nggak hanya (ada) di isu lingkungan. Tantangan utamanya itu niat dulu. Kita niat dan bisa memahami, itu susah banget menurutku ya untuk isu lingkungan itu nggak gampang”. (Informan 6, 2 September 2025)*

Kemudian, tantangan berikutnya lokasi liputan biasanya jauh. Informan Satu misalnya lokasi liputan isu lingkungan yang **umumnya jauh** dari lokasi tempat tinggalnya sehingga terkadang harus menginap, berdampak pada **biaya liputan**. Belum lagi ditambah dengan isu cuaca saat meliput. Sementara, statusnya sebagai

jurnalis di media online daerah membuat biaya liputan cenderung **ditanggung sendiri**. Tidak ada kebijakan jelas terkait biaya operasional liputan.

“Isu lingkungan itu jauh dan akses jalan yang susah, karena di jalur-jalur tertentu itu memang pemerintah tidak memperhatikan sehingga akses jalan itu susah sekali. Tetapi kalau kita tidak pergi untuk mengambil isu itu, berarti itu terabaikan sama pemerintah. Jadi memang saya senang ambil sesuatu yang tidak terlihat oleh media lain atau jarang dilihat oleh pemerintah. Jadi benar-benar saya ambil dari orang-orang yang sangat terdampak, orang-orang kecil yang sangat butuh suara mereka bisa tersampaikan”. (Informan 1, 18 Januari 2025)

Soal lokasi liputan isu lingkungan yang jauh, juga diakui oleh Enam. Namun, ia sebisa mungkin tidak mengajukan anggaran liputan luar kota ke kantor, walau secara jarak memenuhi.

“Harus di atas 90 atau 100 kilo, tapi harus nginep kalau misalnya nggak nginep misalnya PP 150 kilo jadi 300 kilo itu aku nggak klaim DLK (Dinas Luar Kota) karena aku nggak nginep juga. Kadang aku juga kalau cuman 90 atau 110 kilo kayak Food Estate itu kan aku nggak klaim DLK karena aku datang pagi malamnya pulang itu sekitar 100-an kilo doang naik motor”. (Informan 6, 2 September 2025)

Jika usulan DLK-nya tidak disetujui atasan, Enam punya jurus lain agar tetap bisa meliput isu lingkungan. *“Aku ngakalin. Ngakalannya aku ikut sama teman-teman NGO atau akademisi yang memang mau ke lokasi, biasanya nebeng sama mereka mobilnya atau sama wartawan lain. Jadi nggak klaim transport ke kantor, hanya klaim uang harian”. (Informan 6, 2 September 2025)*

Selain itu, para informan menghadapi tantangan seperti **keamanan fisik**, **ketersediaan data** karena sulit menembus narasumber, terutama saat ingin mengonfirmasi temuan di lapangan kepada para aktor perusak lingkungan.

Selain itu, mereka **rentan diincar atau dicari** setelah liputannya dimuat. Mulai dari intimidasi verbal, seperti informan Dua yang dihubungi melalui telepon oleh pihak yang berwenang untuk dimarah-marahi selepas mengangkat banjir di wilayahnya. Sama seperti Dua, informan Lima juga pernah mengalami hal serupa. Ia mengakui ini **tantangan jurnalis daerah**. Karena publik biasanya tahu persis, identitas jurnalis sebagai sesama warga lokal. *“Bahkan polisi militer saja menelpon saya “Mau minta berapa?” Saya bilang ga mau dan setiap orang telpon saya rekam, sebelum kejadian dan setelah kejadian”. (Informan 5, 27 Agustus 2025)*

Kejadian yang dimaksud Lima adalah saat ia sampai harus **mengungsi ke provinsi lain** setelah tulisannya soal pelet kayu terbit. Ia mendengar dirinya dicari orang, saat tengah mengikuti pelatihan jurnalistik di ibukota provinsi lain.

“(Larinya berapa lama?) Ya paling tidak sampai sebulan sih, karena kan sebenarnya saya juga orang sana jadi balik kampung. Ide sendiri, karena saya pikir sedang tidak aman, jadi balik dulu. Istri, dengan adik perempuan (ikut mengungsi)”. (Informan 5, 27 Agustus 2025)

Enam juga pernah mengalami **intimidasi** selepas menulis *Food Estate* pada awal 2018. *“Ada kata sebagian petani gagal panen. Posisinya, aku nggak di rumah jadi istriku yang didatengin. Sudah di atas jam 12.00 malam...ada suara motor mondar-mandir di depan rumah terus orang itu masuk buka gerbang, ngeliat-liat.”* (Informan 6, 2 September 2025)

Tak selesai sampai di situ, keesokan harinya rumah keluarga Enam kembali disambangi. Kali ini pedagang baju bekas yang tak pernah terlihat berdagang sebelumnya, langsung masuk ke halaman pintu depan dan mencecar sang istri. *“Hampir setiap hari ada orang asing lewat depan situ. Enggak sampai seminggu itu aku bawa anak istriku balik, setelah 3-4 hari berita itu naik”.* (Informan 6, 2 September 2025)

Bukan sekali ini saja, keluarga Enam diintimidasi. Masih soal *Food Estate*. Berselang sehari setelah berita terbit, kepala daerah langsung mengunjungi lokasi dan menggelar konferensi pers di sana. Saat Enam berada di lokasi liputan, keluarganya kembali diintimidasi dengan cara didatangi tempat tinggal mereka. *“Udah beberapa kali kalau intimidasi karena isu lingkungan ya, dulu aku juga nulis soal sumur bor juga dicari-cari orang dan sebelum Food Estate itu ada cetak sawah juga”.* (Informan 6, 2 September 2025)

Intimidasi yang didapat Enam saat meliput sumur bor enam tahun lalu berupa *spam call* di gawainya. *“Jangan pulang. Kami tahu di mana tinggalmu. Kayak gitu. Aku nggak nanggapi cuma ya takut juga. Habis itu aku pindah (tinggal). Semua kejadian itu juga aku laporkan ke atasannya”.* (Informan 6, 2 September 2025)

Enam, bahkan pernah **“dijemput paksa”** saat tengah nongkrong di warung kopi sekitar 2019. Saat itu, ia bukan tengah menulis isu lingkungan. Sebelum dijemput, ia mengabaikan puluhan telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal. Adapula chat di Whatsapp, dari petinggi militer yang memintanya bertemu. Ia membalas tengah berada di luar kota.

Namun, tiba-tiba saja Enam sudah “dijemput”. Dari warung kopi, dia dibawa ke suatu tempat dan mendapat intimidasi untuk tidak menaikkan berita. Enam baru dilepas, setelah menelpon Editornya. Ini sempat membuatnya ciut, menepi sejenak, walau tidak membuatnya berhenti menulis. Apalagi kejadian ini adalah intimidasi pertamanya kala menjalankan tugas jurnalistik.

“Saya takut, takutnya setengah mati. Di situasi yang saya diancam, karena saya bukan jagoan, saya bukan preman jadi itu hampir kencing di celana. Membuat saya bisa berencana harus lebih baik, kalau kemarin kalau saya diancam di tengah hutan itu membuat saya mikir. Oh saya kurang persiapan, nggak antisipasi. Saya takutnya setengah mati dan itu bagi saya tantangan yang sangat berat”. (Informan 6, 2 September 2025)

Enam juga pernah diancam langsung saat investigasi pertambangan emas di lahan konservasi pada 2018. *“Kalau itu parang sudah di leher, waktu itu aku jalan nggak sendiri. Sama teman. Itu kami investigasi soal pertambangan emas di lahan konservasi sebenarnya. Kami berdua itu memastikan bahwa itu tambang ilegal yang berusaha dijadikan legal sama pemerintah dan setelah ditelusuri data-data dan dokumen-dokumennya itu ternyata punya pejabat-pejabat di sana. Kalau itu, aku selain diancam fisik sama pekerja tambang di sana diancam juga sama pengacara akan digugat begitu tulisannya. Tapi sampai sekarang enggak ada gugatan sih”.* (Informan 6, 2 September 2025)

Tulisan Enam dan kawannya yang berasal dari media yang berbeda, berdampak pada ditutupnya tambang tersebut. Sebelumnya, Enam mengajak kawan-kawan jurnalis setempat untuk meliput. Namun, tidak ada yang ikut memberitakan. *“Aku tulis sebelum mereka mulai menambang itu (tapi hutan sudah mulai dibuka). Aku udah tulis duluan, kemudian baru setelah itu tim penegak hukum KLHK itu datang dan menutup itu... Teman-teman media lokal aku ajak, tapi nggak ada yang mau karena mereka juga tahu ada kaitannya sama pejabat di situ, dan mereka orang situ jadi mereka takut”.* (Informan 6, 2 September 2025)

Tak hanya ancaman verbal dan fisik, jurnalis lingkungan juga mendapat **serangan digital**. Ini dialami Lima, awal 2025 saat menulis tambang ilegal di media lokal yang melibatkan institusi coklat. Pelaku menyebarkan informasi palsu terkait isi chat WhatsApp yang mengatasnamakan dirinya beserta foto pribadi yang tersebar di media sosial. *“Itu setorannya ada setiap bulan, datanya lengkap. Akhirnya karena mereka mau amankan saya, tidak bisa, maka buat doxing. Nomor saya dipakai seolah-olah saya yang punya nomor itu dan saya hubungi pelaku usaha dengan meminta uang sekian, itu yang kemudian disebar lewat media sosial tapi akun yang menyebarkan itu akun fake”.* (Informan 5, 27 Agustus 2025)

Saat itu, Lima meminta **pendampingan organisasi profesi jurnalis**. Selain *doxing*, ia mengalami intimidasi lain seperti intel-intel polisi yang mencari informasi tentangnya lewat orang-orang. *“Bahkan data pribadi saya disebar oleh Polisi di grup-grup. Misalnya tanggal/tempat lahir, tempat tinggal, pokoknya KTP, wajah juga”.* (Informan 5, 27 Agustus 2025)

Lima mengenang, kala itu para jurnalis senior menghubungi untuk memintanya berhenti menulis itu. Ia bergeming, lantaran tahu persis bagaimana praktek perusahaan membungkam jurnalis. Dari seorang kawan, Lima mengetahui perusahaan sudah menyiapkan uang untuk membuatnya berhenti menulis. Namun ia tetap menulis.

“Lalu saya ga mau. Saya ketemu dengan (pihak) perusahaan untuk konfirmasi. Konfirmasinya dapat, bahkan dikasih data soal perdagangan itu. Pasca itu, liputan saya akhirnya membuat Korea Selatan memotong subsidi 50% dari perusahaan itu dan mereka ikut membiayai praktik perusahaan ini dan akibat terbit tulisan saya, maka Korea Selatan potong 50% subsidinya. Gara-gara itu (tulisan pelet kayu)”. (Informan 5, 27 Agustus 2025)

Menjadi jurnalis lingkungan, menurut Lima, harus siap dimusuhi kawan-kawan sendiri. Apalagi berbeda dengan arus utama di daerah, Lima menolak amplop. *“Baik itu perusahaan legal maupun ilegal datang setiap bulan dan dibagi secara organisasi bukan individu, misalnya organisasi ini berapa orang lalu kasih, setiap bulan. Saya kan tahu itu tapi saya ga tulis kasihan juga tapi saya tulis soal praktik di lapangan”.* (Informan 5, 27 Agustus 2025)

“Saya pernah ditawarkan 200 juta (rupiah). Ini kan saya harus konfirmasi ke perusahaan, saya ke kantor mereka sudah bawa preman, tapi ga buat apa-apa hanya untuk nakut-nakutin saja dan saya konfirmasi. Lalu perusahaan mau kasih uang dan saya ga mau, langsung balik saya dan dari itu mereka langsung cari”. (Informan 5, 27 Agustus 2025)

Tujuh juga mengakui tantangan meliputi isu lingkungan sangat banyak. Salah satunya, mencari **narasumber yang mau bersuara**. Selain itu, Tujuh menggarisbawahi soal **keberpihakan media** yang masih minim terhadap isu lingkungan.

“Isu lingkungan ini masih kurang mendapat porsi. Karena sebatas peristiwa, tidak dibuat liputan atau dialog khusus. Karena selama ini kan kita melihat kalau dialog di TV itu lebih pada politik, hukum dan keamanan. Ini terkait share dan rating. Terus dana. Jujur saja untuk misalnya meliput kerusakan-kerusakan lingkungan yang berada di wilayah Timur atau Barat”. (Informan 7, 3 September 2025)

Ketiadaan jurnalis di lokasi terutama di wilayah yang jauh dari kantor pusat media, ataupun jurnalis yang terlalu dekat dengan penguasa juga menjadi tantangan tersendiri. *“Misalnya, di Morowali itu kita tidak punya kontributor ataupun kalau ada kontributor ternyata lebih dekat dengan pemerintah daerah di sana. Jadi kalau misalnya ditanya coba cari warga yang begini, itu nggak mau dan gak bisa. Daya juang jurnalis daerah juga perlu diasah lagi dan karena tidak ada dana itu, kita tidak bisa langsung datang ke sana”.* (Informan 7, 3 September 2025)

Tujuh menyebut, dana yang diperuntukkan bagi biaya peliputan lingkungan makin sulit keluar usai Pemilu 2024. *“Kayaknya dari 2024 atau akhir 2023 yaitu terasa banget, sorry aku harus bilang kayak gini kerasa banget itu setelah Pilkada selesai dan pemerintahan yang baru ini berjalan itu memang terasa banget. Aku yakin nggak cuma di media ini saja tapi di media-media lain, perjalanan-perjalanan keluar kota itu jadi semakin susah”.* (Informan 7, 3 September 2025)

Salah satu upaya untuk tetap membunyikan isu lingkungan, menurut Tujuh, adalah **berkolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**. Biaya liputan bisa ditanggung bersama. Biasanya, akan ada negosiasi soal biaya apa yang bisa ditanggung media, dan apa yang dibantu pihak LSM. Tujuh akan mencari LSM yang punya kepedulian yang sama dengan isu lingkungan yang akan diliput. Namun, terkadang isu yang sudah diliput belum tentu bisa ditayangkan secara utuh, lantaran terbentur pengiklan besar yang terkait dengan isu yang tengah diangkat.

“Jadi pada saat di ruang editing ternyata yang kita minta pertanggungjawabannya yang memang punya iklan besar di sini. Jadi terbentur dengan industri, dikurangi ini dan dikurangi ini dan dikurangi ini. jadi kita kayak aduh ini gimana maksudnya esensi suara yang mau kita tampilkan, suara dari masyarakat yang genuine ini jadi akhirnya terpotong”. (Informan 7, 3 September 2025)

Selain dengan LSM, peluang lain adalah kerjasama dengan perusahaan. Namun Tujuh sendiri belum pernah punya pengalaman meliput isu lingkungan dengan perusahaan sebagai sponsor yang membiayai.

Sembilan juga menyebut tantangannya adalah bagaimana **mempopulerkan isu lingkungan di Redaksi**. Media televisi yang sempat menaungi Sembilan menyebut fokus mereka adalah liputan atau isu harian. *“Pertama problemnya adalah tidak ada sumber daya yang concern terhadap isu ini dan yang kedua adalah teman-teman di dalam (manajemen) itu tidak punya concern yang sama”. (Informan 9, 4 September 2025)*

Manajemen yang tidak paham dan juga tidak punya perspektif soal isu lingkungan, mempertaruhkan keamanan jurnalis yang masih berupaya mengangkat isu tersebut dengan pendekatan laporan mendalam maupun investigasi. Selain itu, menurut Sembilan, tidak ada sistem di redaksi yang memungkinkan orang berkembang secara natural untuk fokus pada isu tertentu, karena setiap hari liputannya berbeda dan cenderung mengejar isu berbasis peristiwa.

“Misalnya aku liputan investigasi soal isu sensitif ya lingkungan atau isu sensitif ketemu Kopassus dan ketemu ini, ketemu itu dan risiko berbahaya dan setelah liputan itu besoknya disuruh live report car free day”. (Informan 9, 4 September 2025)

Sembilan memang belum pernah mengalami kekerasan fisik selama meliput isu lingkungan. Namun, pernah diintimidasi aparat saat meliput kerusakan hutan akibat pembangunan pembangkit listrik. *“Kita tanya-tanya supaya dia nggak merasa berhasil mengintimidasi tim. Katanya yang penting jangan liputan soal orangutan, padahal liputannya ya sama orangutan. Pas buat diseminasi hasil liputan, diskusinya digeruduk sama orang nggak dikenal, dibubarin dan (ada) teriak-teriak di forum itu”. (Informan 9, 4 September 2025)*

Namun tidak ada hal lain yang mengancam menurut Sembilan, termasuk warga lokal yang membantu liputan. Hal ini menurut Sembilan, karena sudah ada mitigasi yang disiapkan.

Sementara, Tiga Belas menyebut akses masuk untuk meliput isu lingkungan menjadi tantangan utama. Belakangan, ia berkolaborasi dengan LSM lingkungan untuk memudahkan masuk ke wilayah terdampak. *“Kita harus cover both sides tidak sepihak dan itu sulit sekali, itu selalu dicegat. Kalau kita mengaku kita jurnalis itu tidak pernah diizinkan masuk, jadi kasarnya kalau kita mau mengetahui di dalam itu istilahnya kita punya orang dalam dan terakhir-terakhir itu baru ikut teman-teman untuk bagaimana investigasi”. (Informan 13, 14 September 2025).* Selain akses, Tiga Belas

menyatakan tantangan lain meliputi isu lingkungan adalah soal keamanan jurnalis. Intimidasi yang didapat, tidak langsung dari aparat. Ancaman justru dari warga yang memihak perusahaan.

“Orang-orang yang pro ini mereka yang memang mendapatkan perhatian dari perusahaan sementara yang melawan ini orang-orang yang memang kehilangan haknya. Kenapa sampai ada yang pro dan ada yang tidak, karena tanah di sana bukan milik 1 orang tetapi komunal. Jadi tanah ulayat, itu yang bisa menyebabkan konflik sosial, benturan di antara mereka”. (Informan 13, 14 September 2025)

Tiga Belas juga pernah mendapat teror melalui telepon untuk kasus penyelundupan teripang yang melibatkan tentara. Sementara, ketika meliput isu banjir, penguasa daerah menegurnya lewat seorang kawan. *“Dengan efek pembukaan hutan itu saya kaitkan, saya ditegur sama Bupati lewat teman... tapi saya bilang saya punya hak menulis dan sudah dua kali saya ditegur”. (Informan 13, 14 September 2025)*

Sejak itu, ia mengembangkan mitigasi risiko keamanan sendiri. Sebelum meliput isu yang dianggap rentan, ia membagikan sejumlah nomor kepada keluarga yang bisa dikontak untuk membantu bila dirinya tidak ada kabar dalam kurun waktu tertentu. *“Jadi saya bilang kalau saya nggak pulang, ada apa-apa kamu kontak ini dan kamu sampaikan bahwa saya ada turun ke sini. Kemudian saya kalau jalan seperti itu saya tidak kasih tahu teman-teman juga”. (Informan 13, 14 September 2025)*

Tak banyak jurnalis lokal yang mau bersusah payah mendapat cerita langsung dari warga terdampak, seperti yang dilakukan Tiga Belas. Ini yang menjelaskan, ia banyak meliput sendiri. *“Pada prinsipnya mereka mau cari aman menyangkut keselamatan, rata-rata seperti itu dari berita itu lebih banyak berkaitan dengan seremonial atau rilis”. (Informan 13, 14 September 2025)*

Selain itu, ia harus menghadapi medan liputan yang tidak mudah dan biayanya tidak murah. *“Karena kami harus melewati jalan yang banjir, jadi jalan itu sudah tidak ada hanya rawa saja, jadi kami harus mengangkat motor dan belum lagi motor rusak jadi hambatan-hambatan itu... kita nginep di sekolah atau misalnya di puskesmas, pertama kita melapor. Kita ketemu dengan narasumber itu harus bawa karena suka kopi, gula, rokok”. (Informan 13, 14 September 2025)*

Tantangan lain adalah “amplop” dari perusahaan. Tiga Belas, dipetakan sebagai jurnalis kritis oleh perusahaan ekstraktif di sana. Ia tak masuk dalam undangan konferensi pers perusahaan, tidak mendapat rilis, dan akses untuk konfirmasi resmi ke perusahaan ditutup. Biasanya, menurut Tiga Belas, praktik bagi-bagi amplop terjadi saat konferensi pers. *“Memang kita ini orang-orang yang memang keras menulis, jadi ya kalau mereka mau kirim rilis ke media-media tertentu. Iya ga dikirim, tidak masalah”. (Informan 13, 14 September 2025)*

Catatan Empat Belas terkait tantangan isu lingkungan juga mirip dengan apa yang sudah disebutkan para informan lain. *“Yang pertama dana, lalu yang kedua tantangan meliputi lingkungan itu terkadang akses wilayah, contohnya lebih pada*

demografi Indonesia Timur. Lalu yang ketiga, ini tantangan terberat, saya kesulitan mendapatkan narasumber yang bisa membahas produk politik dan lingkungan itu ada perempuan di situ”. (Informan 14, 14 September 2025).

Sementara, isu keamanan bagi Empat Belas bisa dimitigasi. Baik oleh media maupun jurnalis. Sebagai jurnalis lepas, ia juga menyoroti para jurnalis yang kerap meremehkan **risiko kesehatan di isu lingkungan**.

“Iya, ini kan sudah bermutasi semuanya. Kalau bicara ancaman fisik itu minim, karena kan mitigasinya sudah direncanakan sebaik mungkin. Publik sudah tahu kalau ini penting untuk disuarakan bagi mereka yang terdampak dan mungkin dengan pengaruh digital mereka sudah banyak tahu dan lagian juga lebih banyak kekerasan jurnalis itu lebih pada mitigasinya, strategi peliputan yang dari awal itu tidak matang. Kalau saya sendiri mencemaskan kesehatan”. (Informan 14, 14 September 2025)

Empat Belas mendorong jurnalis lain memperhatikan isu keselamatan dalam konteks kesehatan. Lingkungan yang berubah, dapat membahayakan jurnalis yang tidak memahami situasi. “Pertambahannya berkembang terus tetapi banyak yang tidak dipahami ketika kita turun meliput itu sudah terjadi perubahan lingkungan. Seperti contoh di industri nikel itu sulfat sudah menjadi bagian daripada polusi, dulu mungkin sulfat masih pembuangannya ke udara tetapi sekarang sulfat ini sudah transformasinya itu jadi mendung kemudian turun air ke tanah dan itu nggak bisa hilang”. (Informan 14, 14 September 2025)

Ia juga menekankan pentingnya memasukkan komponen iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dalam biaya peliputan. Khususnya bagi jurnalis lepas, seperti dirinya. Empat Belas mendorong ada standar keselamatan jurnalis yang menimbang isu kesehatan sebelum memasuki wilayah yang sudah tercemar.

“Harusnya donor atau fellowship atau outlet itu memastikan dan memiliki standar ahli untuk peliputan yang masuk di daerah industri atau berhubungan dengan kadmium feronikel itu sudah harus ditetapkan dia hanya bisa berapa jam di wilayah itu dalam sehari dan ada pra-test kesehatan dan pascates...siapa yang menjamin kesehatan kita, air yang kita minum saja sudah mengandung itu yang masuk ke tubuh. Kita cuma bisa mengurangi kadar tetapi tidak bisa menghilangkan, harusnya sudah ada standar itu untuk keselamatan jurnalis”. (Informan 14, 14 September 2025)

Delapan belas tahun meliput isu lingkungan, informan ke-14 ini, tidak pernah mendapat kekerasan fisik yang serius. “Paling intimidasi di lapangan, ketemu orang mabuk yang berusaha ga mengancam tapi intonasinya itu mengancam kan. Justru intimidasi itu paling banyak liputan bentrok, ricuh itu yang lebih banyak”. (Informan 14, 14 September 2025).

Namun, jurnalis *freelance* yang fokus pada isu lingkungan sejak 2016 ini mengakui bahwa mitigasi risiko peliputan belum menjadi fokus jurnalis daerah. Hal ini terjadi, menurut Empat Belas, karena ketidaktahuan. Ia sendiri memiliki kesadaran dan pengetahuan ini lantaran pernah kolaborasi dengan jurnalis BBC, London. “Mitigasi

dari teknik liputan, pemilihan narasumber. Saya sudah beberapa kali menggaungkan contohnya ke teman-teman...Kayak misal peliputan lalu budget-nya sedikit dan pakai kendaraan pribadi bagi saya itu nggak masuk akal itu nggak boleh...misalnya liputan berbahaya lalu bawa motor sendiri itu nggak boleh...Karena kita kecil, mudah dicari rumahnya orang". (Informan 14, 14 September 2025).

Bagi Satu, pengalaman meliput pembabatan hutan yang dilakukan perusahaan yang berada di kawasan pariwisata terpadu untuk kelas menengah atas di kawasan Indonesia timur Oktober 2024 sangat membekas. Saat itu Satu liputan bersama seorang temannya.

"Mereka membabat hutan mangrove dan kami dua kali hampir dipukul. Waktu itu lokasinya jauh sekali dari pusat kota. Tetapi saya rasa waktu itu bahwa harga nyawa itu tidak sama dengan harga berita. Kami sudah ambil foto, tetapi memang itu dijaga ketat. Ditanya ngapain masuk ke sini keluar saja, sudah mau dipukul...Pokoknya dilarang semua, tidak boleh foto, ambil keterangan pokoknya nggak boleh". (Informan 1, 18 Januari 2025)

Meliput Isu Lingkungan Bagi Jurnalis Perempuan

Satu, jurnalis perempuan satu-satunya di medianya yang tinggal di utara Pulau Flores ini, menyatakan dari dua media yang pernah disinggahnya sebagai jurnalis, semua memberinya kebebasan menulis lingkungan. Namun, khusus di media pertama, ia diberi perhatian khusus sebagai jurnalis perempuan. *"Mereka akan tanyakan kamu di mana dan menulisnya bagaimana. Mereka melihat dulu apakah isunya berisiko tidak, apalagi untuk seorang perempuan. Kalau misalnya isunya soft kadang saya sendiri atau kadang misalnya saya memberitahukan, saya mau menulis ini dan mereka lihat ini agak berat maka kolaborasi dengan satu jurnalis lain". (Informan 1, 18 Januari 2025)*

Satu mengakui, lokasi liputan yang jauh menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya sebagai jurnalis perempuan.

"Liputan lingkungan jauh-jauh, harus jalan sendiri. Jadi kadang minta saudara laki-laki temani. Biasanya ada yang panggil (menghentikan perjalanan) tetapi orang yang saya nggak tahu. Kamu kemana? Ini karena perempuan (jalan sendiri). Tapi kalau mengajak saudara ya... (menambah biaya liputan)". (Informan 1, 18 Januari 2025)

Satu pernah mengalami pelecehan verbal hingga fisik. Kejadiannya saat ia mengonfirmasi narasumber resmi untuk isu sampah dan abrasi. *"Mereka cukup kaget kalau mereka beberapa kali jokes tentang hal yang seksis, jangan tulis terlalu frontal dan lainnya. (Pelaku) Narasumber". (Informan 1, 18 Januari 2025).* Saat Satu menyatakan keberatan atas apa yang dialaminya, ia tak lagi direspons saat meminta konfirmasi.

“Beberapa kali saya pergi dan mengkonfirmasi misalnya data bencana alam mereka ada di dalam ruangan tetapi menolak bertemu. Tapi beritanya tetap ditulis”. (Informan 1, 18 Januari 2025)

Satu mengakui, sebagai perempuan lebih rentan. Mulai dari dihadang orang di jalan, hingga menghadapi preman yang melindungi perusahaan. *“(Kalau narasumber birokrat atau perusahaan atau aparat) Itu agak susah untuk dapat informasi. Itu saja, susah sekali sampai stres ini. Kok mereka tertutup sekali tentang banyak hal. Di kantor saya bilang bahwa beberapa kali saya mengalami seperti mereka coba cubit pipi, peluk-peluk, dan lainnya. (Pelakunya)Laki-laki dan Kepala Dinas waktu itu. Saya malah pikir tapi pada akhirnya dia memeluk saya saat banyak orang dan saya berpikir bahwa hari itu saya bertemu dengan dia tapi seperti sok akrab”. (Informan 1, 18 Januari 2025)*

Tujuh, belum pernah mengalami kekerasan selama meliput isu lingkungan. Sebagai jurnalis televisi, Tujuh belum pernah turun sendiri, selalu berpasangan dengan *cameraperson*. Meski begitu, Tujuh menyiapkan mitigasi untuk keamanan selama meliput lingkungan. Pengetahuan ini didapat dari mengikuti pelatihan yang diselenggarakan organisasi profesi jurnalis atas inisiatif sendiri. Pengetahuan yang didapat, ia bagikan juga ke jurnalis lain di medianya.

“Misalnya mungkin kalau liputan ke daerah peralatannya kan disiapkan itu dari kantor dan kita siapkan sendiri tapi sebenarnya SOP untuk meliput yang aman, tentang meliput lingkungan atau isu lingkungan yang aman itu belum sih, belum mendapatkan pelatihan khusus tentang itu. At least aku yang cari tahu seperti apa. Dulu juga pernah dapat pelatihan (keamanan) dari AJI, karena ada beberapa anak AJI di sini”. (Informan 7, 3 September 2025)

Dukungan Media Untuk Advokasi Kekerasan Jurnalis

Tanggapan media terhadap laporan jurnalis yang mendapat kekerasan saat meliput isu lingkungan, beragam. Satu misalnya saat mendapat kekerasan verbal maupun pelecehan hanya didengarkan saat melapor pada editor. Sementara, Lima saat dicari banyak orang dan kemudian mengalami serangan digital, sempat ditawari media yang menaunginya untuk dievakuasi. Namun, saat itu Lima menolak, lantaran masih berada di luar kota untuk mengikuti pelatihan.

Selepas dari luar kota, Lima sempat kembali ke kota tempat bermukim. Namun, karena eskalasi ancaman semakin besar, maka ia bersama keluarga memutuskan mengungsi sementara. Saat itu, ia bahkan tak sempat mengabari atasannya. *“Saya gak sempat kontak ke mereka soal kondisi di kampung. (Selama di kampung) Tetap nulis soal isu-isu (lingkungan) yang lain yang di Jakarta saya juga sering nulis. Atau diskusi soal lingkungan”. (Informan 5, 27 Agustus 2025)*

Lima memutuskan kembali, saat mendapat kabar bahwa ia tak lagi dicari. Namun, ancaman itu berdampak hingga kini pada psikisnya. “Sampai sekarang saja macam nongkrong di warkop itu saya nggak mau di tempat terbuka”. Bahkan kemarin-kemarin saya sempat dicari (lagi)”. (Informan 5, 27 Agustus 2025)

Sementara Enam yang keluarganya mendapat intimidasi, saat melapor pada atasannya keesokan hari diminta membuat kronologi. Kemudian Enam sekeluarga diminta mengungsi ke kota di mana kantor pusat media nasional tersebut berada. Semua, dibiayai kantor.

Namun, lantaran tidak punya saudara di sana, keluarga Enam tidak betah sehingga setelah dua minggu, mereka memutuskan kembali berpindah pulau. Kali ini ke kampung halaman. Bahkan setelah sempat ‘istirahat’ di sana, Enam ditugaskan selama sebulan ke provinsi lain, sebelum dikembalikan ke tempat penugasan sebelumnya.

“Kantor itu nanyanya waktu itu seberapa intens orang itu mengancam. Terus dia minta supaya aku melapor ke polisi dulu. Dia kan nanya udah ada kekerasan fisik atau belum, lalu aku bilang nggak ada. Aku dicari-cari juga, orang yang aku kenal dan yang enggak. Disertai ancaman. Bukan ancaman tapi kayak kamu jangan pulang ke kos dulu gitu karena kami tahu kosmu, jadi lebih ke nakut-nakutin ya”. (Informan 6, 2 September 2025)

Sementara, Sembilan mengembangkan sendiri mitigasi risiko peliputan isu lingkungan. Kesadaran dan pengetahuan ini antara lain didapat karena bergabung dengan organisasi profesi.

“Semua pengetahuan dari kita, belum tentu teman-teman yang lain yang bukan anggota organisasi, tidak pernah ikut pelatihan-pelatihan tahu dan nggak ada sistemnya di media”. (Informan 9, 4 September 2025)

Satu, dibebaskan oleh Redaksi untuk meliput isu lingkungan yang menjadi ketertarikannya sejak awal menjadi jurnalis di Nusa Tenggara Timur. Namun saat berpindah media, ia diminta lebih banyak meliput isu yang dianggap Redaksi lebih penting: korupsi. Apalagi, jumlah jurnalis terbatas. Jadi, menurut Satu, ada perbedaan pandangan. Faktanya, ia tidak leluasa untuk meliput apa yang menurutnya penting, yaitu isu lingkungan.

“Kita (diberi) kebebasan untuk memilih topik tapi kalau misalnya secara spesifik (lebih condong) kayak korupsi atau kekerasan. Karena menurut mereka menulis soal lingkungan itu agak mudah sebenarnya. Jadi memang seringkali yang saya bilang bahwa kadang dua minggu saya baru punya 1 berita soal lingkungan karena memang ada banyak isu yang harus saya ambil”. (Informan 1, 18 Januari 2025)

Situasi ini membuat Satu tidak nyaman, hingga akhirnya sejak awal 2025 ia memutuskan menjadi jurnalis lepas. Sementara, Enam mengaku tidak ada arahan khusus dari Redaksi terkait kebijakan meliput isu lingkungan. Pengecualian, untuk liputan panjang yang tidak mungkin dikerjakan sendiri. Perlu ada TOR untuk

membedah persiapan sekaligus pertanggungjawaban tim. *“Lebih ke apa yang mau dibahas, produk tulisannya apa saja dan berapa banyak. Lalu lokasinya di mana. Isu lingkungan dari tempat aku ditugaskan itu laku di media, di mediaku maksudnya naik terus, di-publish terus. Jadi aku bikin perencanaan liputan setahun, itu biasanya merujuk ke yang paling mudahnya itu bikin sesuai sama hari-hari tertentu”.* (Informan 6, 2 September 2025)

Sementara, bagi Tujuh, media televisi tempat kerjanya saat ini merupakan media pertamanya. Ini, sekaligus tempat pertama ia mengasah liputan lingkungan. Meski ia dulu aktif di pers kampus, Tujuh tak pernah mengangkat isu lingkungan.

Ia mengaku, tak ada kebijakan khusus untuk meliput isu lingkungan di medianya saat ini. Pun, berbagai sensor di dalam, baru diketahui saat mengalaminya sendiri. Adapun untuk isu utama yang diangkat di medianya adalah isu politik, hukum dan keamanan. Selain itu, seperti umumnya media audio visual kadang *gatekeeper* lebih tertarik pada audio visual yang menjual.

“Ada visual yang sorry to say harus ngomong kayak gini misalnya ricuh. Dulu tuh misalnya bentrok antar masyarakat adat atau warga di mana atas tambang gitu misalnya geothermal or something. Nah dari visual-visual itu yang memang kita tayangkan ini yang juga akhirnya menanti penasaran penonton tetapi kan nggak semua isu lingkungan itu berangkat dari kericuhan-kericuhan kayak gitu kan, kebanyakan isu lingkungan itu kan menghancurkan dalam diam gitu”. (Informan 6, 2 September 2025)

Bagi Tujuh, program berita harian di media televisi, kurang memberikan ruang bagi isu lingkungan. Peluang justru lebih terbuka di program *magazine*, yang memiliki durasi program lebih panjang. Namun, menurut Tujuh, ini juga bergantung pada Editor apakah memiliki keberpihakan pada isu lingkungan atau tidak. Kini, setelah dipindahkan ke *bulletin*-program berita harian, Tujuh berupaya mencari reporter yang memiliki kepedulian yang sama dengannya. Ini tidak mudah, namun ia berupaya mencari teman bersama di dalam redaksi, untuk membunyikan masalah lingkungan. Senada dengan Tujuh, Sembilan juga menyatakan bila liputan isu lingkungan di medianya bergantung pada inisiatif jurnalis. Di media Sembilan hanya dirinya dan satu jurnalis lain yang peduli dengan isu lingkungan. Kini setelah Sembilan keluar dari media tersebut, tersisa hanya 1 orang.

“Ya nggak ada liputan lingkungan, kecuali dia (jurnalis satunya) mau bikin lagi tetapi dia sudah lama sekali nggak ngajuin proposal liputan isu lingkungan, itu udah nggak ada. Jadi atas inisiatif individu-individu begitu”. (Informan 9, 4 September 2025)

Sementara, media tempat Tiga Belas bekerja, mendukung isu lingkungan. Termasuk menyediakan dana liputan untuk transportasi dan biaya lobi narasumber. *“Tidak ada program khusus...tapi kalau untuk isu lingkungan dia pasti naik”.* (informan 13, 14 September 2025)

Swasensor Berita di Redaksi Media

Berita yang ditulis Lima soal danau yang hilang akibat perkebunan sawit, pernah diturunkan setelah terbit. Saat itu, ia menulis untuk media online nasional sebelum tempatnya bekerja saat ini. *“Setelah sehari terbit di takedown, lalu cari redaksi hubungi dan ada klarifikasi katanya bilang baca dulu”.* (Informan 5, 27 Agustus 2025)

Sementara, Enam diminta untuk membuat **berita yang lebih “soft”** setelah sempat diintimidasi saat menulis *Food Estate*. Ini terjadi, setelah ia melapor dan membuat kronologi ke atasan.

“Yang kasus food estate itu berita pertama itu aku nulis inget banget judulnya ada petani gagal panen di program food estate, itu yang heboh. Terus berapa hari setelah aku mendapat intimidasi, editor menyarankan beritanya di cooling down dulu, aku nggak bikin berita berapa hari terus aku bikin lagi berita fakta, tetap berdasarkan fakta bahwa di dalamnya aku mau mewawancarai petani-petani yang gagal panen saat itu masih dimuat sama editor, aku lupa judulnya itu kayak judul kalau nggak salah jadinya pemerintah turun tangan atau gimana, tapi intinya menunjukkan bahwa enggak sekeras sebelumnya”. (Informan 6, 2 September 2025)

Berita yang ditulis Enam setelah intimidasi memberi ruang lebih banyak pada narasumber pemerintah, tidak berimbang dengan narasumber petani. *“Jadi nggak semua yang aku tulis waktu itu naik, ada yang dihilangkan ada yang dibagi. Tetapi itu kemudian naik di berita-berita setelahnya. Jadi dibikin cooling down dulu sama editor”.* (Informan 6, 2 September 2025)

Tak hanya di isu *food estate*, fakta yang dihilangkan oleh editor, juga terjadi di pemberitaan kawasan pesisir. Persisnya pada 2023 saat Enam meliput di *Spice Islands*. Kala itu, Enam membuat 7-8 tulisan dari sana. *“Liputan tentang kisah-kisah orang-orang yang hidup di sekitar pesisir laut yang kebetulan memang di dekat lokasi tambang. (Kami) nanyain keresahan-keresahan masyarakat terus sampai bawa peneliti untuk meneliti air laut sama ikannya yang tercemar. Terus ada satu, aku diminta sama atasanku juga yang kebetulan ketua tim itu yang turun, aku diminta untuk mengkonfirmasi ke perusahaan, karena salah satu wilayah yang kami datangi itu dekat wilayah perusahaan itu”.* (Informan 6, 2 September 2025)

Enam menghubungi perusahaan tersebut dengan berbagai medium yang ada. Ia sempat “dilempar” sana sini, sebelum akhirnya direspons oleh staf humas. *“Mereka jawabannya yakin mereka tidak mencemari laut. Begitu terus komentarnya, nggak banyak. Jadi aku tulis (mereka) enggan berkomentar banyak. Lalu kirim. Besoknya nggak naik, bagian itu enggak ada, dihilangkan. Dan ketua tim yang minta aku wawancara konfirmasi itu, dia minta maaf katanya dia juga enggak tahu hilang di mana”.* (Informan 6, 2 September 2025)

Enam menduga *swasensor* ini karena perusahaan punya kerjasama dengan medianya. *“Karena humas perusahaan yang aku tanya, dia sempat bilang loh kita kan ada kolaborasi nih, kok nanyanya gini. Lalu aku jawab nggak tahu...Karena bukan aku yang ngerjain jadi kolaborasi itu konten juga, berita juga kalau nggak salah”*. (Informan 6, 2 September 2025)

Sejak awal 2025, Enam diminta bergabung di desk baru yang menjadi wadah kerjasama dengan institusi atau perusahaan. Desk ini, di bawah Redaksi. Isu yang ditulis beragam sejauh ada kerjasama. Kebanyakan isu ekonomi, isu hijau. Beberapa topik seperti transisi energi, energi hijau, masyarakat adat. Konten semacam ini ditulis secara mendalam dan punya aturan main sendiri sebagai konsekuensi konten kerjasama yang mengandung pesanan isu tertentu. *“Iya itu disepakati. Jadi isi ToR itu disepakati dulu...Setelah aku bikin itu aku presentasiin. Di situ terjadi kayak deal-deal-an soal konten”*. (Informan 6, 2 September 2025)

Proposal liputan atau ToR yang memuat perencanaan liputan dibuat oleh jurnalis di desk tersebut yang kemudian dipresentasikan ke ‘klien’. Semua harus atas persetujuan kolaborator, sebelum tim jurnalis turun lapangan. Enam menyadari, saat ini tidak bisa menulis sebebas dulu. *“Bagiku soal swasensor itu terjadi pada saat kita sudah menulis lalu apa yang kita tulis itu terutama fakta-fakta pentingnya itu tidak naik atau tidak di publish”*. (Informan 6, 2 September 2025)

Enam bersama teman-teman sempat menanyakan di awal, bagaimana bila temuan di lapangan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama ‘klien’. Jawaban editor kala itu, tetap disampaikan sesuai temuan. Namun sejauh ini, Enam mengaku belum pernah ada benturan semacam itu. Tapi dari beberapa contoh tulisan kolaborasi yang pernah ada, semua nuansanya positif. Tidak ada perspektif kritis dalam tulisan. Atau upaya mengkritik kolaborator yang mengajak kerjasama, sekalipun institusi tersebut dikenal publik bermasalah. *“Yang ditulis itu tone-nya positif”*. (Informan 6, 2 September 2025)

Sama seperti Enam, Tujuh mulanya juga tidak menyadari bila apa yang dialaminya merupakan bentuk *swasensor*. Liputan mendalam yang diproduksi bersama sebuah LSM, tidak bisa tajam mengkritik karena terkait dengan institusi yang selama ini termasuk pengiklan besar di grup media tempat Tujuh bekerja. “Sensor” terjadi saat di ruang editing. Bukan karena ada data yang perlu diverifikasi lebih lanjut, namun untuk menjaga pengiklan. Perintah datang dari para *gatekeeper* agar tayangan yang diproduksi tidak tajam mengkritik. *“Kali ini kita kurangi dulu dan mungkin di lain kesempatan akan maju lagi, lebih keras lagi untuk meminta pihak bertanggung jawab”*. (Informan 7, 3 September 2025)

Tujuh menyatakan, tayangan hasil kerjasama dengan perusahaan cenderung bermuatan positif. Meski institusi yang diberitakan terkait kepentingan publik dan memiliki banyak masalah. *“Mereka sudah siapkan narasumbernya dengan narasi-narasi yang positif dan mendukung program-programnya...jadi kita lebih kayak content creator, tapi itu sama sekali menurutku aku nggak yakin ya aku bisa bilang itu produk jurnalistik”*. (Informan 7, 3 September 2025)

Isu lingkungan, kian dianggap seksi oleh media. Ini sedikit banyak membuat isu lingkungan pelan-pelan dimasukkan ke berbagai program. Bahkan di media tempat Tujuh bekerja, dibuat program khusus untuk melayani isu-isu keberlanjutan. *“Launching itu jadi cerita bahwa ini kenapa kita perlu ada platform ini, karena ini tujuannya bisnis juga untuk mereka yang punya mindset hijau. Nggak tahu itu green washing atau apa bisa kasih ruang, bisa kasih kapitanya di sini. Jadi pas aku dengar itu, aku mikir itu memang jualan”.* (Informan 7, 3 September 2025)

Sembilan juga berkisah, praktik swasensor di medianya amat kuat. Liputan pencemaran tambang emas besar di Papua, tidak tayang padahal itu dibiayai pihak lain.

“Ini kisah nyata. Liputan di Papua soal pencemaran limbah tailing. Dibiayai funding. Agreement-nya adalah bikin tiga liputan soal limbah tailing... Satu package itu tayang sudah tayang setelah tayang itu di-upload ke YouTube. Ketahuan perusahaan, perusahaan telepon kantor, yang jelas liputan yang pertama itu di take down dari YouTube, liputan package kedua dan ketiga itu ga tayang”. (Informan 9, 4 September 2025)

Sembilan menyebut, medianya tunduk pada penguasa dan uang. Dalam kasus liputan di atas, Sembilan menengaraui uang membuat liputan batal tayang. Padahal media sudah dibiayai pihak ketiga untuk liputan. Itupun dana yang sudah keluar, tidak dikembalikan. Setelah itu, berita yang muncul terkait perusahaan pertambangan tersebut, bernuansa positif. *“Semua isu rentan, kalau berhubungan terutama dengan cuan”.* (Informan 9, 4 September 2025)

Tak hanya uang, tayangan hasil liputan jurnalis juga bisa berubah dari fakta di lapangan bila menyangkut penguasa termasuk korps coklat. Bahkan terdakwa atau orang yang tengah berperkara bisa membeli slot program (blocking time), dengan model dialog misalnya. *“Nggak ada bentuk iklan langsung tapi kayak privilege dan gitu-gitu, buka jalan. (Jurnalis) mengeluhkan itu, dia nggak nulis ada bentrok atau ricuh tapi ketika dikirim ke editornya ditulis tuh ricuh, itukan membahayakan keselamatan jurnalis”.* (Informan 9, 4 September 2025)

Sementara, jurnalis juga yang mengerjakan produksi konten berbayar. Bukan tim khusus dari sales atau marketing. Itupun, produksinya dengan pendekatan berita biasa, tanpa ada tanda apapun bahwa konten tersebut berbayar. *“Lucunya mereka menyebutkan kerja-kerja itu di catatan penugasan sebagai liputan sales, disebar semua di penugasan jadi semua orang tahu. Di email, di whatsapp, liputan sales ada ya? Liputan itu ya produk jurnalistik dan sales itu kan sales itu harusnya beda lagi”.* (Informan 9, 4 September 2025)

Tidak ada batasan isu atau perusahaan yang bisa diterima sales. Semua boleh bekerjasama, sepanjang membayar biaya iklan. Saat produksi, tim sales tidak ikut. Namun mereka bisa mengintervensi isi konten saat editing. *“Dikirim ke mereka dulu, baru mereka kirim catatan ke tim liputan. Yang jelas semuanya harus approvalnya oleh sales... kita jurnalis tetapi di direct sama sales, diperintah sama sales harus liputan ini*

dan wawancaranya harus ini - harus di sini dan seperti itu". (Informan 9, 4 September 2025)

Jurnalis Menghadapi Praktek Swasensor

Lima, pernah mengalami bagaimana tulisannya diturunkan dari website media massa setelah tayang. Sebenarnya tulisan hasil *fellowship* ini muncul di dua outlet media. Di media khusus lingkungan, tulisannya tetap tayang. *"Yang menghubungi itu wakil pemred. Mereka tanya datanya dari mana dan apakah sudah dikonfirmasi. Lalu saya jawab kalau saya turun langsung. Wakil pemred bilang kalau ga masalah tapi yang takedown itu direktur perusahaan langsung. Lalu saya cari tau, ternyata direktur perusahaan itu akrab (dengan perusahaan yang ditulis)".* (Informan 5, 27 Agustus 2025)

Sementara, Enam mengaku cemas bila dirinya akan menjadi tidak kritis setelah *dicemplungin* di desk kolaborasi. Sejauh ini, menurut Enam, ia masih bisa mengembangkan tulisannya di luar dari apa yang disepakati. Walau tetap saja, Enam dan teman-teman tidak bisa mengusulkan investigasi ataupun liputan mendalam yang terkait dengan kolaborator. *"Bahwa aku punya kekhawatiran tidak menulis kritis lagi, itu benar banget. Bahwa aku merasa sekarang mungkin kurang kritis lagi, itu bener. Itu jauh berbeda dari yang aku jalani (sebelumnya). Jadi mau bagaimana lagi, kalau misalkan boleh memilih saya akan memilih (tempat liputan lama)".* (Informan 6, 2 September 2025)

Namun Enam masih berupaya untuk terus berdaya, berupaya memberikan perspektif lain dari tulisannya. Ia mengilustrasikan pernah menulis soal tenaga panas bumi dan tetap diunggah di desk tersebut walau bukan menjadi bagian dari konten yang dijanjikan ke kolaborator tertentu. Tulisan semacam ini menjadi bagian dari kewajiban menyeter 3-4 tulisan per minggunya. *"Ini mudah-mudahan enggak jadi habitus. Aku berharap daya kritisku enggak hilang tapi aku berusaha ngakalin gimana caranya. Mungkin gue enggak bisa sekeras (sebelumnya)".* (Informan 6, 2 September 2025)

Enam memaknai desk ini hadir sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan media. Artinya, menjadi bagian dari upaya media untuk bertahan di era digital. Walau konsekuensinya, jurnalis dipaksa menulis atau memproduksi konten mengikuti arahan isu pesanan kolaborator. Sejauh ini, belum ada kolaborator yang diizinkan membaca terlebih dahulu tulisan yang akan tayang. Enam juga tidak mengetahui berapa nilai kerjasama untuk tiap kolaborasi. Yang pasti, akan ada beberapa serial tulisan yang lahir dari kolaborasi semacam ini. *"Karena kami wartawan yang di desk ini tidak diperbolehkan lebih tepatnya, atau nggak tahulah bukan urusannya kami. Jadi kami bener-bener cuman ngurusin tentang konten aja, tentang liputannya aja".* (Informan 6, 2 September 2025)

Publik boleh jadi, tidak tahu jika konten yang dinikmatinya, merupakan hasil kolaborasi. Pun, hasilnya tidak hanya muncul di desk kolaborasi namun juga muncul di desk lain yang senafas dengan tulisan. *“Iya nggak ada warningnya kalau misalnya ini hasil kerjasama. Nggak semua orang juga yang kerjasama itu mau ditulis juga di dalam isi tulisannya”.* (Informan 6, 2 September 2025)

Tujuh juga mengakui, tren pengiklan atau yang mereka sebut kolaborator kini tak lagi ingin *brand* atau jenamanya muncul dalam tayangan. Bahkan mulanya lulusan universitas negeri di Jawa ini tak sadar bila ia mengalami swasensor. *“Mungkin petinggi-petinggi itu mempunyai pertimbangan yang aku sendiri mempertanyakan, tetapi juga kalau aku di posisi itu aku juga dilema gitu karena orang-orang ini dulu adalah orang-orang yang keras di lapangan atau orang yang passionate. Jadi mungkin ada banyak pertimbangan yang tidak bisa kulihat dari posisiku sekarang dan kalau misalnya bagaimanapun media tempatku kerja ini kan industri ya, bukan media yang benar-benar independen”.* (Informan 7, 3 September 2025)

Tujuh tidak menganggap ini adalah faktor terbesar yang menjadi hambatan atau tantangan meliputi isu lingkungan. Namun menjadi salah satu yang membuat dirinya merasa tidak puas dengan hasil liputan. Karena yang seharusnya bisa disuarakan, menjadi tidak bisa keluar. Tujuh sendiri berupaya mencari celah untuk tetap menyuarakan isu lingkungan. Misalnya mencoba untuk membuatnya muncul di program berita harian. *“Aku fight-nya dengan cara yang persuasif tetapi tidak keras sih. Jadi kayak misalnya oke kita nggak akan bahas itu di liputan yang ini tapi bisa nggak kalau itu dibahas di program yang selanjutnya gitu, ataupun episode selanjutnya gitu”.* (Informan 7, 3 September 2025)

Sembilan, bersama rekan jurnalis lain yang memproduksi tayangan diberitahu jika program berbayar, namun mereka harus memproduksi tetap seperti berita biasa. Tanpa ada simbol, narasi, *tag on* yang menyatakan konten adalah konten berbayar. Bedanya, semua harus dikemas dengan pendekatan jurnalisme positif. *“Tahu, dikasih tau dan treatment-nya sama kayak liputan gitu dan itu sempat aku protes liputan berbayar itu”.* (Informan 9, 4 September 2025)

Protes Sembilan, tidak membuahkan hasil. Pengalaman lain dialami Sembilan saat mengajukan proposal liputan mendalam soal Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2023. *“Waktu itu target pemerintah adalah upacara di tahun pertama di IKN. Lokasi liputan itu bukan di IKN-nya tetapi di Palu Donggala, di situ kan ada tambang galian untuk pasir batu yang dikirim ke IKN...Kita mau buktikan kalau IKN itu bahan-bahannya disuplai dari tambang-tambang ilegal yang bermasalah”.* (Informan 9, 4 September 2025)

Manajemen menolak proposal tersebut, dan meminta Sembilan tidak mengaitkannya dengan IKN. Boleh meliput, tapi sama sekali tidak boleh menyebut atau mengaitkannya dengan IKN. Sembilan mengenang, masa itu marketing media tengah mesra dengan pemerintah agar kecipratan kerjasama untuk mempromosikan IKN. *“Ini sensor yang buatku udah mentok dan aku nggak bisa kalau kayak gini dan itu yang bikin aku kayak problem buatku karena ini sudah terang benderang sensor itu*

dijalankan sejak dari proses pengayaan ide atau gagasan dalam membuat liputan”. (Informan 9, 4 September 2025)

Selain Sembilan, nyaris tidak ada lagi yang memprotes hilangnya garis api redaksi. Budaya perusahaan yang terbangun sejak awal di grup media tersebut, membuat pekerja media tidak kritis. Adapun Tiga Belas tidak mengalami swasensor di medianya saat ini. Pengalaman Tiga Belas soal swasensor, didapat ketika masih menjadi jurnalis di media lokal sebelum ini. Saat itu, ia bahkan dibebani mencari iklan ke perusahaan-perusahaan. Biasanya, di media semacam itu, nuansa pemberitaannya positif. Dari sisi redaksional, menurut Tiga Belas, kalimat dalam berita diperhalus.

“Kalau saya kan orangnya membangkang kalau saya selama benar maka saya berargumen sekalipun dengan Pemred”. (Informan 13, 14 September 2025)

Sementara, Empat Belas yang kini menjadi kontributor tetap sebuah media lingkungan, mengaku tidak pernah punya pengalaman swasensor atau liputan yang harus mengalah pada iklan, lantaran medianya bukan media yang bergantung pada iklan. Bahkan, ketika ia menjadi kontributor media nasional, Empat Belas belum pernah punya pengalaman ini. *“Karena selama ini feature, dokumenter bisa berpetualanglah tapi sebenarnya menceritakan kearifan lokal dibalik itu hanya kemasannya saja”. (Informan 14, 14 September 2025)*

Namun, situasi berbeda menurut Empat Belas, dialami teman-teman di daerah yang bekerja di media lokal. Menurutnya, ini terjadi karena media lokal rata-rata bergantung pada iklan dari pemerintah daerah selain persoalan sumber daya manusia. *“Yang kedua editor dan pemrednya tidak punya kapasitas dalam mengedit berita itu”. (Informan 14, 14 September 2025)*

Pengalaman “Menyerah” Kepada Kepentingan Bisnis

Informan yang diwawancarai mengakui, belum pernah punya pengalaman liputan yang kemudian batal tayang, atau harus mengalah karena ada iklan yang masuk. Namun, Enam pernah punya pengalaman bagaimana **tulisannya berbuah advertorial**. *“Belum pernah sih. Tapi aku pernahnya begini. Yang Food Estate itu, hari ini aku nulis tentang kegagalan food estate lalu besoknya itu ada iklan soal keberhasilan food estate. Tapi tulisannya tayang, dan sempat dihujat juga sama masyarakat...media sosial rame...yang benar nulisnya yang mana gitu. Sampai dibikin status antara yang sebelumnya, sama yang iklan. Tapi aku males aja ngejelasinnya bahwa itu iklan”. (Informan 6, 2 September 2025)*

Tujuh punya pengalaman serupa. Tempatnya bekerja, memang satu grup dengan Enam. Yang berbeda hanya platform medianya. Hasil liputan Tujuh **banyak “dibabat”** di saat proses editing. Belakangan ia tahu bahwa liputannya terkait dengan pengiklan kakap di grup medianya. Setelah itu, ia dipindah ke program lain. *“Di ruang editing ternyata yang kita minta accountability-nya adalah yang memang punya iklan*

besar di sini jadi terbentur dengan industri...esensi dari suara yang mau kita tampilkan, suara dari masyarakat yang genuine ini jadi akhirnya terpotong pada saat terbentur dengan eksekutif produser atau manajer dan sebagainya". (Informan 7, 3 September 2025)

Liputan Sembilan soal lingkungan, yang diberi slot khusus untuk tayang di Special Report, lama-lama terpikir untuk dijual oleh manajemen media. Maka mereka butuh program yang frekuensi tayangnya jelas, liputannya terencana.

"Dengan asumsi, program ini quote unquote bisa dijual ke pengiklan gitu, baik direct selling maupun tidak. Kenapa direct selling karena ada liputan di program ini yang ternyata itu kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah yang mengelola air". (Informan 9, 4 September 2025).

Jurnalis yang memproduksi diberitahu jika program ini berbayar. Namun, *treatment* produksi, penayangan sama seperti produk berita pada umumnya. Bedanya, tidak boleh mengkritik dan *tone* berita harus positif. Sembilan sempat memprotes hal ini. Apalagi, tidak ada pembeda dengan produk berita sehingga akan menyulitkan *audience* untuk membedakan bahwa tayangan tersebut merupakan *advertorial*. Satu-satunya, informasi ada di *credit title* atau *ending title*. *"Di ending title itu present by, paling terakhir. Jadi kalau secara pengamatan awam atau umum itu nggak tahu kalau itu iklan berbayar". (Informan 9, 4 September 2025)*

Posisi Kerja dalam Redaksi Media

Satu, menjadi jurnalis sejak 2017. Dua tahun awal karirnya dimulai dari media cetak lokal di Nusa Tenggara Timur. Setelah itu, perempuan usia 30 tahunan ini pindah ke media online lokal yang kerap mendapat penghargaan. Awal 2025, ia memutuskan *freelance* agar lebih leluasa menulis isu lingkungan. Saat menjadi jurnalis di media online, Satu bekerja tanpa kontrak walau namanya tertulis di *masthead* redaksi.

"Tidak, itu jujur saja (tidak ada kontrak). Kami kadang kreatif ambil video, foto yang menurut mereka bagus dan uang bensin. Jadi saya ambil sebagus mungkin untuk saya tawarkan ke redaksi bisa gak untuk jadi berita foto". (Informan 1, 18 Januari 2025)

Selain itu, Satu dan teman-teman baru dibekali kartu pers semenjak salah satu awak redaksi mengalami kekerasan fisik saat meliput aksi warga yang menentang Proyek Strategis Nasional (PSN). *"Saya nggak dibekali kartu pers, saya merasa sangat kesulitan dan beberapa kali meliput itu dibantu teman jurnalis untuk bisa masuk ke sana dan pernah juga dibentak tentara dan mengeluh untuk tolong bikin saya kartu pers, tolong". (Informan 1, 18 Januari 2025)*

Sembilan berkenalan dengan dunia tulis menulis sejak mahasiswa. Kala itu ia membuat buletin berisi opini dengan isu bebas. Baru setelah itu masuk media online lokal pada 2007. Setelah tiga tahun, lulusan Administrasi Negara dari kampus swasta di Jawa ini, pindah ke media cetak lokal jaringan grup media nasional. Saat itu, ia

belum mengenal isu lingkungan. Sembilan baru mulai meliput isu terkait lingkungan pada 2015 saat berpindah ke media televisi.

Tiga Belas, lulus S1 Ilmu Komunikasi di universitas swasta di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2010. Setelah itu, ia mendapat rekomendasi dari salah satu dosennya menjadi jurnalis di media lokal walau harus merantau ke pulau lain. Selama menjadi jurnalis di beberapa media lokal itulah, ia mengasah kemampuannya menjadi jurnalis lingkungan. Adapun Empat Belas memulainya dari produksi film dokumenter terkait lingkungan untuk diputar di festival pada 2008. Setelah itu ia menjadi juru kamera lepas di sejumlah stasiun televisi. Sejak tujuh tahun lalu, ia belajar menuangkan kepeduliannya akan isu lingkungan lewat tulisan.

Kapasitas yang Diperlukan untuk Jurnalis Lingkungan

Bagi Lima, kapasitas utama yang dibutuhkan saat meliput isu lingkungan adalah pemahaman jurnalis soal keamanan diri. Apalagi, Lima pernah mengalami intimidasi hingga kekerasan fisik maupun digital. *“Sekarang itu kalau turun liputan harus ada analisis keamanan, ngisi (assessment) dulu dan bagaimana kalau ada kode rahasia, jadi kita antisipasi di lapangan. Lalu sumber daya karena kita turun juga bukan biaya kecil apalagi kita mau menjangkau narasumber-narasumber kunci itu ya harus mendaki bukit kadang kala kan”.* (Informan 5, 27 Agustus 2025)

Salah satu cara Lima untuk melindungi diri saat liputan lingkungan adalah dengan berserikat. Ia sadar posisi sebagai jurnalis lingkungan rentan, sehingga perlu bergabung ke organisasi profesi. Ia juga mengupayakan agar tidak hanya bergabung di satu organisasi saja. Namun, upaya dirinya bergabung dengan organisasi jurnalis khusus lingkungan, hingga kini tidak direspons. *“Itu penting juga memang karena saya pikir AJI perlu juga teman untuk sama-sama kalau fokus ke isu lingkungan. Kadangkala isu masalah di lingkungan lebih kompleks. Saya juga pernah daftar di jurnalisme science itu juga gak ada kabar. Saya daftar AJI itu 3 tahun kemudian baru diterima”.* (Informan 5, 27 Agustus 2025)

Sementara, Tujuh menganggap penguatan kapasitas untuk meliput dan menyajikan isu lingkungan, amat penting. Ia yang mulanya tidak begitu tertarik untuk menekuni isu lingkungan menjadi ingin menekuni isu ini, lantaran didorong atasannya untuk mengikuti pelatihan isu lingkungan.

“Awalnya training pertama tentang lingkungan itu ditugaskan kantor, disarankan sama produser eksekutif. Jadi produser eksekutif itu kan ganti-ganti, masing-masing mereka itu punya ketertarikan sama isunya sendiri. Dan produser eksekutif ini yang minta untuk aku ikut. Dari situ punya ketertarikan dengan isu itu dan akhirnya aku cari sendiri. Karena aku merasa nge-stuck aja kalau misalnya tidak training dan tidak berkumpul dengan komunitas yang punya passion yang sama. Jadi mencari tempat bertanya isu ini gimana dan kita harus bersikap seperti apa ya”. (Informan 7, 3 September 2025)

Satu, yang kini menjadi jurnalis lepas mengaku mendapat dukungan dari media pertama tempatnya bekerja untuk mengangkat isu lingkungan. Dalam arti, dibebaskan mengusulkan topik liputan terkait lingkungan. Namun, Satu berharap dukungan media lebih dari itu. Di antaranya **memastikan keselamatan jurnalis** dan **mendukung dari sisi pendanaan liputan**. *“Semenjak mengikuti pelatihan untuk keamanan jurnalis, saya memberitahu redaksi bahwa hal ini yang perlu diperhatikan redaksi ke jurnalisnya. Jadi lain kali kalau jurnalisnya kemana itu ditanya sedetail mungkin karena berisiko tetapi selama yang saya sebelum itu, itu tidak pernah juga sebenarnya. Ditanya paling di mana, hati-hati di jalan begitu saja, kalau biaya itu dihitung kemudian (reimburse)”. (Informan 1, 18 Januari 2025)*

Media kedua tempat Satu bekerja, juga tidak menganggap berita lingkungan sebagai berita penting yang menantang dari sisi keamanan. Satu mencontohkan liputan perdagangan orang sebagai liputan berbahaya di wilayahnya. Apalagi saat ia meliput isu itu, ia pernah difoto dan diambil gambarnya dalam bentuk video. Ini membuatnya trauma. *“Isu lingkungan itu masih dalam berita-berita yang ringan, artinya kalau menghadapi tantangan paling itu tadi yang saya katakan ya bertemu narasumber ini dan juga lokasinya jauh dan tidak mudah kalau pakai motor dan sendirian”. (Informan 1, 18 Januari 2025)*

Rata-rata informan, tidak pernah mendapat pelatihan terkait lingkungan maupun mitigasi keamanan sebelum meliput isu lingkungan. *“Sama sekali tidak pernah. Saya berangkat dari nol belajar sendiri untuk menulis. Pernah sekali ikut (inisiatif sendiri) training untuk jurnalis lingkungan yang diselenggarakan BBC Media Action. Itu 2023”. (Informan 1, 18 Januari 2025)*

Adapun mengenai risiko keamanan, para informan baru mengetahuinya setelah ada di lapangan. Kantor media tidak menyediakan pelatihan atau menyiapkan jurnalisnya terkait mitigasi atau pengetahuan bagaimana menghadapi tantangan meliput isu lingkungan. *“Mengenai risiko untuk keamanan itu juga saya sebenarnya tidak begitu mengetahui. Waktu itu kalau mau jalan, ya jalan saja tetapi karena semakin ke sini bahwa selalu ada risiko-risiko itu mulai ada perhatian. Pelatihan seperti keamanan jurnalis saat meliput isu lingkungan itu tidak pernah saya dapatkan”. (Informan 1, 18 Januari 2025)*

Satu, baru mengikuti pelatihan keamanan jurnalis secara umum dari organisasi masyarakat sipil (*Civil Society Organization/CSO*) yang menaruh perhatian pada keselamatan jurnalis, tahun lalu atas inisiatif sendiri. Enam, juga mendapatkan pengetahuan tersebut dari CSO. *“Waktu itu ada pelatihan, mulai dari keamanan digital sampai keamanan peliputan, fisik. Kalau yang keamanan digital itu di 2017. Aku ikut beberapa pelatihan, kalau yang fisik baru di 2022-2023, ini inisiatif saya sendiri”. (Informan 6, 2 September 2025)*

Tujuh, juga atas inisiatif sendiri mengikuti pelatihan terkait pengetahuan isu lingkungan yang diselenggarakan media asing secara daring. Dukungan lain yang dibutuhkan untuk meliput isu lingkungan adalah soal **dana liputan**. Apalagi, Satu walau disebut sebagai jurnalis tetap media tersebut namun skema pembayaran

dibayar per berita. Itupun, Satu tidak begitu jelas berapa harga per berita. *“Iya saya (dibayar) per berita, tapi apakah itung-itungannya dengan transport sekalian itu saya memang nggak tahu. Itu kisarannya di 100 sampai 200 (ribu rupiah) kadang-kadang (Untuk berita mendalam, karena berita lingkungan dibuat mendalam)”*. (Informan 1, 18 Januari 2025)

“Kalau saya ke Larantuka, Flores Timur, itu malah nggak sebanding dengan yang nanti mereka kasih. Karena mereka kadang nggak tahu jaraknya berapa dan memang pernah dibicarakan. Saya cukup malu (untuk menagih) tapi saya juga berharap mereka bisa melihat bahwa saya di Kabupaten Sikka tetapi beberapa liputan saya dari Kabupaten Flores Timur. Saya nggak bisa menulis kalau hanya menelpon narasumber, ada beberapa teman yang menyarankan saya untuk menelepon saja tetapi saya kadang kalau saya tidak melihat kejadian sebenarnya saya nggak bisa menulis”. (Informan 1, 18 Januari 2025)

Sementara, untuk foto sejumlah 15 sampai 20 foto, Satu mendapat uang antara 100 sampai 200 ribu rupiah. Terkadang, ia juga menyeter video yang diambil melalui gawai androidnya.

Empat Belas, memetakan dukungan yang dibutuhkan agar isu lingkungan bisa diberitakan di media massa. Persoalan pertama, dana liputan. Informan selalu mengajukan biaya uji, agar temuan di lapangan diperkuat dengan hasil laboratorium. Jika untuk liputan mendalam di wilayahnya, biayanya sekitar Rp 8 juta sekali jalan. Sementara, untuk liputan investigasi, menurut Empat Belas butuh antara Rp 20-25 juta sekali produksi. *“Saya selalu nawarin bagaimana kalau kolaborasi, carikan saja dana yang mau test sample mereka, sampling itu lebih kuat dibanding dan karena kebanyakan donor kan lebih senang narasi-narasi laporan”*. (Informan 14, 14 September 2025)

Selain persoalan dana, mitigasi risiko juga jadi persoalan mendesak untuk dipahami dan disiapkan. Ia sendiri menyampaikan soal mitigasi ini ke media atau lembaga donor yang membiayai peliputan lingkungan yang diajukan. *“Sampaikan, menyampaikan. Kayak misalnya saya kan sudah punya standar misalnya kalau liputan nikel saya itu wajib memakai kendaraan di atas 2000 cc, karena saya sudah tahu medan jadi saya udah punya standar. Saya harus paham pertama kendaraannya itu kelayakan itu pertama, skema asuransi yang saya pastikan, (orang) yang bawa jasa itu”*. (Informan 14, 14 September 2025)

B. Editor: Swasensor dan Tanggungjawab Negara

Mengapa isu lingkungan penting diliput?

Selain mewawancarai jurnalis lingkungan di lapangan, tim juga menggali informasi dari editor dan atau wakil manajemen redaksi. Sebanyak delapan jurnalis yang berasal dari manajemen media diwawancarai. Informan Dua merupakan pendiri media lokal yang fokus pada isu pesisir dan pulau-pulau kecil di timur Indonesia.

Alasan utamanya mendirikan media yang membahas isu lingkungan adalah untuk terlibat dalam penyelamatan bumi.

“Kalau kita tidak mendorong dalam bentuk media artinya kita tidak ikut dalam proses penyelamatan bumi..Pulau semakin terancam, belum lagi masalah tambang itu yang serius. Sekarang itu tragedi di Maluku Utara, itu tragedi lingkungan. Makanya media sebagai salah satu pilar penting menyuarkan ke publik”. (Informan 2, 26 Agustus 2025)

Sementara, Tiga yang kini merupakan Pemimpin Redaksi media lokal di Utara Sulawesi, secara sadar memberi perhatian pada isu lingkungan, untuk ‘meneriakkan’ isu penyelamatan hutan. *“Kami sebenarnya medianya kan umum. tetapi tetap memberikan perhatian terhadap isu lingkungan dan terutama soal konservasi...Sulawesi Utara ini kan dia bukan provinsi yang hidup dari dinamika pertumbuhan ekonomi perkotaan tetapi sebenarnya masih berbasis masyarakat masyarakat desa, hidup di tepi-tepi hutan ini bahkan memanfaatkan sumber daya di sana dan topik ini nyaris tidak terkawal di media lokal ya sehingga (media kami) mencoba untuk memberi ruang terhadap isu lingkungan”. (Informan 3, 26 Agustus 2025)*

Informan Empat juga merupakan Pemimpin Redaksi. Ia menahkodai media lokal di timur Indonesia, yang memfokuskan pada Maluku Utara dan Papua. Walau media umum, namun Empat memberi ruang bagi isu lingkungan di desk *In Depth Reporting*. *“Ada investigasi tapi kebanyakan hampir semua lingkungan desk-nya, di situ isu lingkungan itu liputannya in-depth maupun investigasi”. (Informan 4, 26 Agustus 2025)*

Empat mendirikan media sejak hari pertama di 2020. Persisnya sejak ia mundur menjadi pemimpin redaksi di media lain, lantaran tidak cocok dengan pemodal yang lebih condong ke politik. Dua tahun setelahnya, barulah ada desk khusus laporan mendalam, untuk menampung konten terkait lingkungan yang dibuat mendalam.

Empat sehari-hari merupakan kontributor sebuah media khusus lingkungan. Desk tersebut, juga menjadi etalase Empat dan kawan-kawan jurnalis lain memajang karya hasil *fellowship* terkait lingkungan. Adapun Delapan yang pernah menjadi manajer pemberitaan di sebuah televisi menganggap isu lingkungan sebagai isu yang amat luas, terkait lingkungan di sekitar kita.

“Misalnya soal hutan, udara, laut yang berkaitan dengan tempat hidup dan faktor-faktor kehidupan manusia...termasuk juga faktor-faktor penyebabnya ya yang membuat degradasi lingkungan, misalnya soal polusi dan sebagainya”. (Informan 8, 26 Agustus 2025)

Sepanjang karirnya sebagai jurnalis di sejumlah media baik cetak maupun televisi, Delapan paling banyak meliput isu pencemaran lingkungan termasuk dampak industri ekstraktif seperti perusahaan tambang dan sebagainya. Ini tidak hanya menghitung dampak pada manusia tapi juga lingkungan sekitar baik flora maupun

fauna. Sementara, Sepuluh yang berasal dari media cetak ekonomi menyatakan sebelum 2023, isu lingkungan hanya muncul dalam bentuk berita *straight news*. “Ya kita menulis sebagai *straight news* aja, jadi sebuah informasi yang mungkin jika itu besar tidak mungkin kita tidak menulisnya karena pembaca pasti ingin mengetahui itu dan kebutuhannya sekedar untuk melengkapi informasi yang ada di media kami”. (Informan 10, 8 September 2025)

Setelah 2023, menurut Sepuluh, mereka mencoba bertransformasi agar tetap bisa kompetitif dari sisi bisnis media. Medianya memproklamirkan menjadi media *Environmental, Social, and Governance* (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan). “Kita melihat trend global itu terjadi kenaikan investasi yang memiliki pijakan keberlanjutan, mereka mencari bisnis dan menaruh uang di bisnis tersebut tetapi bisnisnya memiliki prinsip *environmental, social and governance* yang bagus, tertata dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari titik itu kami coba mengelaborasi di internal, dimungkinkan nggak sebuah media ekonomi tabloid ini mencoba mengeksplorasi ini, lingkungan hanya bagian karena ada *social and governance* juga”. (Informan 10, 8 September 2025)

Sebelas, merupakan manajemen media televisi nasional yang juga dikenal sebagai tenaga ahli jurnalistik. Menurutnya, publik belum peduli akan isu lingkungan. Hal ini yang menjelaskan, *share* berita lingkungan tidak terlalu besar. Kalaupun ada berita lingkungan, yang *share*-nya baik seperti berita banjir bandang misalnya, hanya di hari pertama saat peristiwa terjadi. Namun di pemberitaan hari-hari selanjutnya, menurut Sebelas, *share*-nya pasti turun. *Share* merujuk pada jumlah pemirsa program televisi pada periode waktu tertentu.

“Kalau pakai angka 1 sampai 10, 1 paling tinggi dan 10 paling rendah itu isu lingkungan itu ada di antara posisi 8-9. Kecuali kalau itu lingkungan itu menyeret ke arah hukumnya. Biasanya kalau masalah ke arah hukum dia bisa naik ke posisi 2 atau 3 dan itu kalau misalnya masuk ke ranah politik itu bisa ke posisi 1. Karena masyarakat Indonesia itu memang lebih senang drama ya ketimbang peduli sama lingkungan”. (Informan 11, 9 September 2025)

Jadi, walaupun isu lingkungan berbasis peristiwa diangkat, tidak akan menceritakan dampak dari sisi lingkungannya. Namun lebih banyak menggali dampak ke manusia dan ekonomi.

Dua Belas, walau berbeda *platform* dengan Sebelas, sepakat jika isu lingkungan tidak menarik bagi pembaca. Walau isu lingkungan sejak awal masuk dalam pemberitaan di media Dua Belas.

Kala itu, isu lingkungan utamanya diliput jurnalis bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), Dan, jika isunya bersinggungan dengan desk ekonomi, politik maupun umum, isu lingkungan juga bisa masuk ke desk-desk tersebut.

“Berita-berita lingkungan itu tingkat keterbacaan sangat rendah. Berita tentang peluncuran jam tangan dalam beberapa jam itu bisa 180.000 pembaca, berita lingkungan sehari bisa lebih 1000 atau sampai 2000 itu udah hebat banget...yang cukup menarik isu di lingkungan itu jika berkaitan dengan profil atau tokoh entah itu dalam tone negatif maupun positif itu keterbacaannya cukup tinggi”. (Informan 12, 13 September 2025)

Dua Belas mengaku masih mempelajari mengapa berita lingkungan tidak banyak pembacanya. Apa ini karena minat pembaca, atau cara mereka mengemas berita. Sejak *rebranding*, medianya justru membuat kanal khusus lingkungan. Hal ini yang antara lain mendorong Dua Belas mempelajari soal *audience* dan tingkat keterbacaan. *“Pertimbangan aslinya seperti apa itu nggak tahu karena itu kebijakan reorganisasi. Isu lingkungan dari dulu sudah ada tetapi sekarang kita lebih melihat ke sumber daya alam jadi tata kelola sumber daya alam, makanya dia dijadikan desk tersendiri karena kita nggak melihat lingkungan hanya dari dampaknya. Tetapi dia justru motif, kenapa kebijakan dibuat karena dia ingin berurusan dengan sektor sumber daya alam itu kan”. (Informan 12, 13 September 2025)*

Sementara, menurut Lima Belas, berita lingkungan yang muncul di medianya kebanyakan berbasis peristiwa. Karena berasal dari kiriman jurnalis daerah. Adapun untuk *follow up news*, diserahkan ke para jurnalis. Tidak ada permintaan untuk pendalaman dari Redaksi, karena memang menurut Lima Belas, medianya tidak memiliki DNA investigasi.

Namun, beberapa jurnalis daerah (kontributor) termasuk jurnalis di Jakarta, pernah beberapa kali membuat tulisan mendalam secara kolaborasi. Biasanya, inisiatif muncul dari jurnalisnya yang kemudian mendiskusikannya dengan editor. Soal pendanaan, bergantung pada realistik tidaknya proposal liputan yang diajukan. Tidak pernah ada kebijakan bahwa tersedia dana liputan dengan jumlah tertentu untuk liputan lingkungan.

Urgensi Isu Lingkungan di Redaksi Media

Bagi informan Dua, Tiga, Empat dan Lima, isu lingkungan teramat penting. Dua misalnya, mendirikan media yang mengangkat isu pesisir sejak 2013. Dananya, merogoh kocek sendiri. *“Dari saya sendiri, waktu itu saya bikin itu karena ada kawan tahu bikin website ya sudah dia bagi. (Mempertahankan) Kalau saya itu lebih kepada rasa memiliki bahwa ada sesuatu yang kita berikan kepada orang lain”. (Informan 2, 26 Agustus 2025)*

Dua bersyukur medianya bisa bermanfaat bagi orang lain. Menjadi obyek penelitian mahasiswa hingga rujukan untuk melihat isu pesisir di media. Bila Dua harus merogoh kocek sendiri untuk membangun media, Tiga mulanya ditopang pemodal untuk membangun media yang kini dipimpinnya. *“Berdiri di 2017, concern kami terhadap lingkungan itu berbeda. Kita awalnya bermodal bahkan besar. Waktu berdiri itu sudah punya 1 ruko gedung 3 lantai dan menggaji orang dengan UMP, membayar*

kontributor sampai kontributor nasional, Sekali menulis itu 250 (ribu) per artikel. Tetapi kita waktu itu dikendalikan oleh 3 orang, ada direktornya, ada pemimpin umumnya lalu saya pemred. Lalu dua orang ini main politik saya nggak mau, bubarnya karena saya nggak setuju politiknya”. (Informan 3, 26 Agustus 2025)

Dua kawan informan Tiga, selain jadi jurnalis juga menawarkan jasa sebagai konsultan politik. Tiga yang tidak sejalan, ditinggalkan mereka yang sebenarnya merupakan pemodal media. Mereka hanya sempat jalan bersama selama setahun. Sejak 2018, Tiga berupaya menghidupi medianya antara lain dengan mengikuti sejumlah *fellowship* dan hibah media yang terkait lingkungan serta konservasi. Sejak awal, media ini memiliki desk Lingkungan dan Konservasi.

“Karena itu tadi, topik soal ini isu lingkungan itu tidak banyak dikerjakan oleh teman-teman media, kalaupun ada itu permukaan. Karakter kita di daerah adalah topik isu lingkungan itu akan menjadi berita kalau aktivisnya itu bersuara begitu, jadi ketika aktivis bersuara atau ada insiden. (Berdasarkan peristiwa ya? Talking news). Iya baru itu, maaf ya. Tidak pernah ada yang turun”. (Informan 3, 26 Agustus 2025)

Kesadaran ini antara lain dipengaruhi oleh hobi Tiga yang kerap bertualang ke alam. Selama menjadi kontributor media online nasional sebelum mendirikan media sendiri, Tiga sudah dikenal sebagai jurnalis yang kerap menulis isu konservasi.

Sementara, Sepuluh yang medianya merupakan media cetak, mengusung ESG -Environmental Social and Governance dua tahun terakhir. *“Secara konsisten memproduksi berita terkait dengan bagaimana korporat menerapkan ESG terkadang aku juga pas menulis wah ini berita baik mulu gitu. Tapi jangan salah dalam pijakan kami itu ketika menulis sebuah korporasi dalam konteks ESG itu kita pasti akan membongkar laporan keberlanjutannya, dalam laporan keberlanjutan itu kita dapat mengukur perusahaan ini berhasil menurunkan karbon atau justru menambah karbon”. (Informan 10, 8 September 2025)*

Isu lingkungan, di media Sebelas, dipersepsikan amat luas sebagai segala sesuatu terkait kehidupan. Mulai dari lingkungan di sekitar kita, bencana alam, kerusakan lingkungan, pertambangan, pembalakan liar, semua masuk isu lingkungan. Kebanyakan berita lingkungan di media televisi tempat Sebelas bekerja, berangkat dari peristiwa. Walaupun mereka pernah punya pengalaman memproduksi tayangan terkait lingkungan dengan durasi lebih panjang, karena ada motivasi lain.

“Karena mau ikut awarding. Tapi balik lagi isu lingkungan itu untuk di media, kalau itu bukan suatu peristiwa jadi taruhlah kita pernah kaget waktu ada temuan kalau nggak salah dari BBC yang soal sampah di Pantai Kuta...kita ikut angkat tetapi berhenti di situ, nggak didalami lagi. Karena ya namanya industri akhirnya kita nyari yang menarik aja, jadi berita-berita yang menarik itu selama ini masih seputar politik, kriminal, sosial kemasyarakatan”. (Informan 11, 9 September 2025)

Dua Belas menjadi penanggung jawab desk lingkungan di medianya. Desk ini baru muncul Januari 2024 setelah reorganisasi *brand* medianya. Meski hingga kini pembaca berita lingkungan tidak sebanyak berita lain, media Dua Belas tetap mempertahankannya. Alasan utama, soal *value* yang diusung media.

“Jadi (dulu) isunya hanya menjadi pelengkap lalu sekarang kami melihatnya justru masalah lingkungan itu sebagai pendorong, maksudnya sebagai penyebab. Lingkungan itu tidak hanya masalah pencemaran yang disebabkan oleh industri tetapi juga jauh sebelumnya ada soal tata kelola sumber daya alam”. (Informan 12, 13 September 2025)

Tak banyak media memberikan porsi khusus berupa rubrik atau desk khusus lingkungan. Lima Belas menyatakan isu lingkungan di medianya tak diberi rubrik sendiri. Media tempat informan Lima Belas berkarya, memprioritaskan isu nasional. Isu lingkungan baru diberi ruang, jika ada isu yang hangat atau kiriman berita dari jurnalis daerah (kontributor).

Lima Belas mengakui, mereka belum pernah secara sadar mengejar atau mengangkat isu tertentu terkait lingkungan. Secara umum, menurut Lima Belas minat tiap jurnalis didukung di ruang Redaksi. Termasuk, jika ingin mengangkat atau menulis soal lingkungan. Namun masalahnya, jelas Lima Belas, hingga kini tak ada jurnalis yang minat menekuni isu lingkungan. *“Kadang dia masuk ke regional atau pemberitaan di wilayah, seringkali juga masuk ke sain. Kita nggak punya perhatian khusus gitu terhadap lingkungan karena di tempat kita itu nggak ada orang yang punya interest terhadap isu ini”. (Informan ke-15, 17 September 2025).*

Lima Belas menjelaskan, medianya memiliki proyek kerja bersama dua media lain dengan platform berbeda - cetak dan televisi, yang bernaung di bawah grup yang sama. Isu yang diangkat menurutnya, tema-teman yang jarang digarap media lain. Ini, menurutnya bagian dari *giving voice to the voiceless*.

Meski tidak menyediakan desk khusus untuk isu lingkungan, namun media online tempat Lima Belas mengabdikan diri, menyediakan desk tersendiri untuk *The 17 Sustainable Development Goals* (SDGs) sejak 1 atau 2 tahun lalu. Mereka melihat ada peluang bisnis di isu pembangunan berkelanjutan sehingga juga menyiapkan para jurnalis hingga editor memahami isu tersebut. Caranya dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi membuat kursus triwulan bagi jurnalis. *“Itu upaya kita menangkap tren yang sekarang terjadi seputar SDGs ada 17 kan sustainable goals itu dan itu bukan soal lingkungan, di situ ada soal pendidikan, di situ ada soal kemiskinan, di situ ada soal lainnya dan lingkungan itu salah satu dari 17 SDGs itu dan corporate kemudian merasa bahwa kita kayaknya perlu juga masuk ke isu itu”. (Informan ke-15, 17 September 2025)*

“Awalnya adalah idealisme, tetapi kemudian dalam perjalanan menemukan cara untuk dapetin uang”. (Informan ke-15, 17 September 2025)

Desk khusus SDGs ini ada di tiap media dalam grup. Namun, namanya berbeda-beda. Tiap media, juga berbagi fokus dari 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 ini. Rata-rata hanya menggarap 3-4 fokus komitmen berkelanjutan. Tim yang mengerjakan adalah para jurnalis yang berjumlah antara 2-3 orang. Meski begitu, karya jurnalis lain juga bisa masuk ke kanal tersebut, karena pengelompokan SDGs menggunakan AI. Jadi, jika ada berita yang menurut AI masuk ke salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, maka secara otomatis masuk juga ke kanal tersebut selain di kanal utama berita itu.

Dalam perjalanannya, konten di kanal ini ada yang berbayar. Konten ini menurut Lima Belas, tidak selalu dikerjakan jurnalis. *“Enggak, enggak selalu. Jadi kami itu punya tim content marketing yang bikin artikel-artikel berdasarkan pesanan itu ada di bawah bisnis, itu besar ada 20 atau 30 orang”.* (Informan ke-15, 17 September 2025)

Lalu, bagaimana publik mengetahui bila sebuah konten di media berbayar? *“Jadi ini firewall-nya kan umumnya firewall-nya itu iklan atau advertorial dan segala macam, ini adalah cara kita berkompromi dengan brand. Jadi brand itu kalau mau pasang iklan di sini itu seringkali nggak mau ada tulisannya iklan. Bisa nggak jadi berita aja? Itu, nggak bisa”.* (Informan ke-15, 17 September 2025)

Kebijakan Redaksi Terhadap Isu Lingkungan

Bagi informan Dua, Tiga dan Empat sebagai pendiri sekaligus pemimpin redaksi, kebijakan redaksi media mereka jelas berpihak pada lingkungan dan tidak memberi ruang bagi intervensi pemerintah maupun perusahaan yang tidak berpihak pada publik. Sebaliknya, Delapan yang pernah menjabat posisi manajerial di sebuah stasiun televisi, mengakui bahwa konten isu lingkungan yang diangkat di medianya tidak boleh merugikan korporasi. *“Biasa, berkaitan dengan kue iklan. Jadi memang yang korporasi itu memang memberikan porsi yang kue iklan yang cukup besar terutama untuk grup ya”.* (Informan 8, 4 September 2025)

Hal ini menjadi persoalan besar, karena biasanya komitmen iklan diperuntukkan grup media bukan per media. *“Iklan, blocking-an, event organizer makanya billing-nya ga sedikit disana tapi guyurannya di grup, dibagi-bagi tuh”.* (Informan 8, 4 September 2025)

Media tempat Informan 8 bekerja pernah menjadi bulan-bulanan di saat rapat grup, lantaran ada salah satu pengiklan menarik dananya karena tidak suka atas pertanyaan jurnalis di lapangan. Kepentingan ekonomi media, memimpin di media Informan 8.

“Jadi isu itu bisa naik kalau memang tone-nya positif misalnya kalau disponsori, kadang-kadang lingkungan juga menurut manajerial tidak selalu negatif, kadang ada isu-isu yang mereka poles menjadi sesuatu yang baik. Misalnya program CSR dari sebuah perusahaan, itu kalau diperhatikan menjadi tone yang positif kalau dia menjadi pengiklan”. (Informan 8, 4 September 2025)

Sementara, Sepuluh mengklaim kebijakan di medianya, memungkinkan menulis kritis terkait isu lingkungan. Namun, terkendala sumber daya manusia dan biaya. *“Cuman masalah yang kami hadapi di internal itu adalah SDM-nya. Untuk mengirim orang. Jadi ...kita tulis karena dekat dan terjangkau. Terus yang jauh itu yang kemudian cost-nya kalau liputan lingkungan itu cost-nya terlalu tinggi dan ketika kita ajukan ini nggak masuk akal dengan biaya”.* (Informan 10, 8 September 2025)

Media Sepuluh, saat ini hanya punya 10 awak redaksi termasuk editor dan bertanggung mengisi 24 halaman. Berbeda saat sebelum pandemi, jumlahnya sampai 24 orang. Dengan situasi saat ini, satu reporter, menurut dia, harus mengisi 2-4 halaman per minggu. Hal ini, yang membuat mereka tidak lagi punya energi dan waktu untuk liputan lingkungan dengan melaporkan dari wilayah terdampak.

Sepuluh menyatakan tidak ada pembatasan dalam penulisan isu lingkungan di medianya. Namun saat observasi, berita-berita yang diproduksi cenderung positif, konstruktif. Sepuluh beralasan, ini karena latar belakang audience mereka. *“Agak berbeda sedikit. Media ini untuk menjawab kebutuhan investor akan bisnis, pilihan-pilihan bisnis yang ramah lingkungan jadi karakter pembacanya ya optimistik gitu”.* (Informan 10, 8 September 2025)

Media yang digawangi Sepuluh, tidak menggantungkan bisnis medianya dari iklan. Jadi, menurut dia, tidak ada konflik kepentingan dengan pengiklan. Mereka mendefinisikan media, bukan *single platform*. Jadi didukung juga dengan *brand* media tersebut di *platform lain*. Selain, menggantungkan pada pemasukan dari berlangganan.

Sementara, Sebelas mengakui, medianya tidak banyak memberitakan isu lingkungan karena penontonnya sedikit. Ini terlihat dari data rating share Nielsen. *“Program-program idealis yang bertujuan baik untuk mengedukasi masyarakat itu jarang diterima...ketika performanya nggak bagus berarti penontonnya nggak terlalu tertarik gitu dan akhirnya pengiklan nggak jadi beli spot”.* (Informan 11, 9 September 2025). *“Kalau kebijakan redaksi itu biasanya ada peristiwa dulu. Baru masuk sidebar-nya jadi second layer”.* (Informan 11, 9 September 2025)

Situasi ini, menurut Sebelas sudah berlangsung sejak awal dirinya bekerja di televisi dua dekade lalu. Bahkan, jika mundur ke belakang saat ia masih aktif sebagai jurnalis di media cetak, isu lingkungan juga tidak terlalu disukai pembaca. *“Dua halaman itupun kalau besar sekali bisa jadi laporan utama, itu juga kalau kaitannya ada politik. Tadi yang aku bilang, ada kaitannya sama tokoh politik atau yang bermain orang-orang pemerintah itu bisa jadi laporan utama”.* (Informan 11, 9 September 2025)

Di medianya, kisah orang-orang yang terdampak karena kerusakan lingkungan juga tak banyak muncul. Publik, menurutnya, lebih suka berita yang mengaitkan isu lingkungan dengan politik. Seperti, gambaran aliran dana pembalakan liar ke sejumlah aktor politik.

Dilema semacam ini juga sempat muncul di media Dua Belas. Ia menyebutnya perbedaan pendapat kawan-kawan di Redaksi, antara ingin membangun jurnalisme berkualitas dengan ekonomi media. Dua Belas tak membantah, mereka tetap membutuhkan *page view*. Catatan Dua Belas, berita lingkungan yang menyangkut kisah inspiratif profil tertentu tidak harus terkenal ataupun menyangkut tokoh, lebih disukai.

“Kita pakai news value ketokohan itu memang cukup berhasil untuk isu yang tone-nya lebih problematik seperti food estate. Kita ngomongin food estate itu Merauke dengan mengedepankan tentang isu Amran dan Isam itu jauh lebih tinggi ketimbang masalah food estate serupa di Sumatera Selatan yang nggak ada siapa-siapa gitu...Karena ketika kita kasih news value lain soal impact itu kalau tanpa tokoh itu juga orang nggak peduli”. (Informan 12, 13 September 2025)

Belakangan, tim redaksi mengembangkan konten dengan pendekatan jurnalisme konstruktif. Bahkan, beberapa sudah diikutsertakan mengikuti pelatihan jurnalisme konstruktif. *“Satu, karena memang ada rasa frustrasi. Maksudnya, kita kayak cuma mengungkap masalah...misalnya pembangunan jalan yang membelah Taman Nasional...ketika kita melihat itu dari sisi yang negatif ya kita cuma melihat persoalan koridor gajah impact-nya kan ke situ ya sedangkan sebenarnya kita tahu loh kalau jalan itu dibutuhkan oleh masyarakat di Sumatera Barat misalnya”. (Informan 12, 13 September 2025)*

Jurnalisme konstruktif, menurut Dua Belas, dapat mengakomodir semua pihak, yang terdampak maupun aktor pelakunya. Namun, pada prakteknya karena medianya sendiri masih uji coba dengan pendekatan jurnalisme konstruktif, tidak semua isu lingkungan dilihat dengan pendekatan ini. *“Memang agak debatable. Karena nggak semua persoalan pada akhirnya bisa didekati dengan jurnalisme konstruktif. Kalau saya pribadi melihat ya itu satu, dari sisi urgensi misalnya ketika masyarakat adat sudah diusir kemudian katakanlah dikriminalisasi. Makanya kalau kita ngomongin jurnalisme konstruktif itu harus semuanya, dari sisi aspek kepentingan pebisnis ya kan, nah urgensitasnya itu yang harus diukur”. (Informan 12, 13 September 2025)*

Dua Belas sendiri mengaku tak berani menyebut apa yang dikerjakannya sebagai jurnalisme konstruktif. Selain melihat dari sisi kepentingan, ia juga mencemaskan soal dampak *misleading*, bila salah melihat persoalan secara utuh. Kebijakan redaksi soal pemberitaan apapun termasuk isu lingkungan di media Dua Belas, diputuskan melalui rapat redaksi yang diikuti semua penanggung jawab desk. Artinya, tidak akan ada putusan yang bisa diambil di rapat desk itu sendiri tanpa diketahui oleh Pimpinan Redaksi.

Menurut Dua Belas, budaya perusahaan di medianya memungkinkan level reporter sekalipun bisa memprotes kebijakan perusahaan. Hal ini pernah terjadi saat ia belum mengepalai desk lingkungan. Reporter memprotes di ruang redaksi karena mempersepsikan pertanyaan direksi yang menanggapi keluhan institusi soal berita, sebagai intervensi. Dua Belas menganggap ini *miscommunication*. *“Ini menunjukkan gimana budaya di (media) terutama wartawan-wartawan muda mereka bahkan punya*

daya. Direksi menjelaskan bukan mau mengintervensi tetapi mau tahu gitu apa masalahnya. Jadi, di sini pasti akan sensitif dengan "tolonglah dihalusin" itu tuh tidak mungkin. Kalau dibilang ini apakah SOP-nya memang dituliskan seperti itu, enggak pernah lihat SOP itu, bahwa enggak boleh ini itu tetapi itu sudah seperti value yang ditanamkan ke temen-temen, itu yang sebenarnya jadi satu-satunya kebanggaan wartawan. Kalau diusik pasti justru loe yang hancur". (Informan 12, 13 September 2025)

Sementara, informan ke-15 yang merupakan editor media online menyatakan tidak ada kebijakan redaksi yang khusus mengatur pemberitaan isu lingkungan. *"Yang jadi pegangan, memayungi seluruh kebijakan atas berbagai macam isu. Yang paling utama soal kemanusiaan, memberi ruang lebih untuk memuliakan manusia yang itu artinya tidak menyakiti pihak-pihak manapun". (Informan ke-15, 17 September 2025)*

Lelaki yang sejak awal karirnya di dunia jurnalistik hingga kini setia di satu media online menyatakan kebijakan redaksi medianya, mengkritik namun tidak menyerang. Gaya mengkritiknya halus. Apalagi media nasional yang menjadi bagian dari konglomerasi media di Indonesia ini, menurutnya tak punya sejarah atau DNA investigasi. Kesadaran untuk tidak frontal mengkritisi isu publik lantaran sejarah panjang jenama media ini yang pernah dibredel di masa Orde Baru. Mengalah, untuk mengamankan bisnis media dan juga bisnis lainnya yang jamak dimiliki konglomerat media di Indonesia. Berhenti mengkritik, ketika pesannya sudah disampaikan, terlepas ada perubahan atau tidak.

"Kita sebagai wartawan tidak hanya hidup sendirian dengan idealisme, tetapi ada puluhan ribu orang yang juga bergantung di sini". (Informan ke-15, 17 September 2025)

Value para pendiri media ini sudah diterapkan berpuluh tahun dan diwariskan dari generasi ke generasi di ruang redaksi. Mediumnya melalui diskusi, pelatihan dan yang paling berdampak menurut Lima Belas adalah melalui interaksi di ruang redaksi setiap harinya maupun komunikasi di grup Whatsapp. Alasan utama, adalah untuk mempertahankan bisnis media. *"Jadi idealisme aja nggak cukup, dia harus punya pondasi bisnis yang baik supaya kita bisa menyampaikan berbagai macam gagasan yang ingin kita sebarkan ke masyarakat karena kalau perusahaan ini mati maka kesempatan kita untuk berkontribusi, untuk memberikan pengaruh itu jadi hilang juga". (Informan ke-15, 17 September 2025)*

Lima Belas menambahkan, industri media itu seperti dua sisi mata uang. Menurutnya, media harus seimbang antara bisnis dan idealisme. Bisnis untuk menopang eksistensinya dan idealisme untuk memberi jiwa dan pengaruh yang besar dan bermanfaat bagi publik. Pun, tidak pernah ada kebijakan soal plafon pendanaan liputan isu lingkungan. *"Kalau semua orang merasa bahwa ini penting maka ada gerakan untuk ayo kita cari dananya. Tapi kalau rasa cuma beberapa orang ya, pasti nggak akan jadi kayak gini, keputusannya sangat komunal". (Informan ke-15, 17 September 2025)*

Liputan terkait lingkungan di luar pulau Jawa, biasanya dikerjakan oleh kontributor. Dan biasanya, tidak ada liputan panjang yang diajukan para kontributor ini. *“Kontri dibayar per berita, jadi kalau dia bikin liputan 3 hari atau 7 hari itu dia rugi nggak dapat duit”.* (Informan ke-15, 17 September 2025)

Informan Tiga, setia pada fokus isu biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang semakin terancam di wilayahnya. Sementara bagi Empat, isu sampah penting untuk diberitakan, selain isu pertambangan. *“Orang mungkin berpikir kecil, tapi sampah kan juga salah satu faktor perubahan iklim sebenarnya. Bagaimana saya gerah saat orang buang sampah dan berpengaruh pada laut. Artinya kalau laut rusak, nelayan tentu saja akan melaut lebih jauh dan kalau lebih jauh maka akan berpengaruh ke ongkos bensin dan keselamatannya, cuaca tidak menentu. Orang tidak melihat lebih jauh. Saya bilang ke Pemerintah bahwa Pemerintah tidak meneliti lebih jauh padahal banyak nelayan meninggal karena melaut lebih jauh itu karena faktornya sampah juga”.* (Informan 4, 26 Agustus 2025)

Sementara, di wilayah pesisir tempat Dua bermukim, tengah terancam dengan kerusakan lingkungan akibat tambang. Namun, kebanyakan orang sudah dibungkam. *“Itulah pekerjaan korporasi. Media, NGO, kelompok masyarakat sipil, kampus semua sudah jadi tidak ada yang ribut...Jadi misalnya masyarakat demo kalau ga ada media yang nulis, ya selesai. Saya bilang di forum kalau seandainya hari ini di lingkungan ga ada media, sudah selesai, tutup buku. Jadi tambang dan kedua kita concern ke perubahan iklim. Dampak perubahan iklim kan isu pulau kecil, perempuan, nelayan, anak itu kan semua dapat”.* (Informan 2, 26 Agustus 2025)

Dua menambahkan, pertambangan juga berdampak ke banyak hal. Artinya, banyak fokus liputan yang bisa dikembangkan jurnalis. *“Berdampak ke konservasi, masyarakat adat, HAM, petani, nelayan karena ruang hidup petani sempit, lahan-lahannya terampas...Jangankan kebun bahkan orang yang meninggal pun sudah tidak punya tanah untuk dikuburkan”.* (Informan 2, 26 Agustus 2025)

Bagi media Delapan, tidak ada isu lingkungan yang penting untuk diberitakan. Yang penting harus dijaga adalah kepentingan pemodal atau korporasi yang beriklan di media mereka. Bahkan, funding dari lembaga tidak bisa memastikan bahwa isu lingkungan akan muncul di media. *“Mau ikut pitching untuk fellowship misalnya, lalu proposal liputan yang itu didiskusikan di rapat redaksi. Ada beberapa isu yang kadang nggak diloloskan di rapat editorial, itu yang bikin makin sulit mas. Jadi misalnya kita mau ngomongin soal polusi udara di IKN misalnya atau apa, kadang-kadang itu jadi di intervensinya itu sejak awal”.* (Informan 8, 4 September 2025)

Sementara, bagi media Dua Belas yang menjadi prioritas pemberitaan isu lingkungan saat ini ada Proyek Strategis Nasional. Menurut Dua Belas, pemimpin redaksi medianya saat ini memahami dan menguasai isu lingkungan. Jadi, walau bukan prioritas di media, namun tidak pernah ada pertentangan soal liputan isu lingkungan. *“Kecuali urusan pendanaan”.* (Informan 12, 13 September 2025).

Liputan Kolaborasi Isu Lingkungan

Model peliputan konten kolaborasi (konten berita yang dibiayai pemasang iklan), saat ini marak di media. Terlebih, banyak Humas perusahaan ekstraktif, sebelumnya bekerja di media sehingga mereka punya jaringan dengan jurnalis. Dua mengakui kerap mendapat undangan dari mantan jurnalis yang kini menjadi humas untuk mengunjungi lokasi tambang. *“Ke site itu puluhan juta dapat, lalu saya bilang kalau saya ada agenda padahal belum”.* (Informan 2, 26 Agustus 2025)

Informan Tiga dan Empat juga memilih untuk tidak memenuhi undangan perusahaan. *“Perusahaan itu seringkali bermasalah dengan masyarakat, ada media-media yang memanfaatkan itu untuk menaikkan berita dengan harapan perusahaan itu bereaksi. Ketika perusahaan bereaksi mereka akan bikin konferensi pers dan mengundang kita. Supaya kita tidak terjebak dan tidak enak dengan teman-teman, lebih baik tidak hadir karena pasti ada pembagian uang di situ”.* (Informan 3, 26 Agustus 2025). *“(Tidak menolak di depan jurnalis lain) Nanti teman-teman berpikir bahwa kita bersikap sombong”.* (Informan 4, 26 Agustus 2025)

Dua, Tiga dan Empat sama-sama memilih tidak hadir dan bersurat atau mengirimkan email saat ingin meminta konfirmasi perusahaan. Kebijakan tidak menerima amplop dari perusahaan ekstraktif termasuk liputan kolaborasi, menurut mereka, sudah dipahami oleh para jurnalis di media mereka. Salah satu implikasinya, mereka sulit mendapat konfirmasi dari perusahaan. *“Memang agak lama kalau konfirmasi bisa sampai 2-3 minggu”.* (Informan 2, 26 Agustus 2025). *“Karena mereka mempersiapkan jawaban yang matang”.* (Informan 3, 26 Agustus 2025)

Sementara, Delapan tidak melihat ada konten kolaborasi di medianya. Walaupun, ada beberapa tayangan yang disponsori perusahaan tambang yang ditayangkan di media Delapan maupun di YouTube media tersebut, menyebut sebagai hasil kolaborasi dalam keterangannya. Biasanya, media visit dari perusahaan maupun pemerintah, menjadi pintu masuk proposal kerjasama. *“Mungkin gini ya, dibentuk proposal liputan nanti kalau perusahaan oke, akan kasih feedback, mau blocking program ini, katakanlah 200 juta per episode. Tapi tolong poin pertanyaan-pertanyaan ini yang ditanyakan ke bos, terus kami pengen menonjolkan poin-poin ini dan narasumbernya ini dari kami dan nanti narasumbernya selain perusahaan, kami maunya ini gitu ya, itu yang aku pahami sebagai collaborative content karena narasumbernya dari si perusahaan sudah dimunculkan untuk ditanyakan poin-poinnya, sudah dikasih listnya”.* (Informan 8, 4 September 2025)

Institusi atau perusahaan yang membayar dapat mengatur bentuk konten tayangan. Tidak ada pembatasan, sejauh mereka membayar. Bisa berbentuk *talkshow*, *package* berita di program reguler berita, *feature* ataupun dokumenter. *“Nanti perusahaan sudah menyiapkan instalasi pengelolaan limbah kita begini dan nanti yang diwawancara tuh nelayannya ini. Jadi sudah di-setting semuanya sama mereka gitu”.* (Informan 8, 4 September 2025)

Brand media Sepuluh juga memiliki konten kolaborasi. Konten semacam ini dilokalisir dalam kanal sendiri yang dinamai konten kerjasama. Penjelasan di website, konten apapun yang diproduksi bekerjasama dengan tim bisnis ataupun mitra korporasi, tidak diproduksi oleh redaksi. Namun, Sepuluh menyebut belum pernah ada konten isu lingkungan hasil kerjasama yang terbit di media yang digawangnya. Kalaupun ada konten kerjasama, seperti pengalaman sebelumnya dibuatkan boks khusus dan tidak ada *byline* penulisnya.

Menurut Sepuluh, sejak awal medianya berdiri memang melihat segala sesuatu dari peluang usaha atau bisnis. Perspektif itu juga yang digunakan untuk isu lingkungan, jadi tidak murni soal lingkungan hidup. *“Bagaimana orang bisa cuan, bagaimana orang bisa dapat duit, bagaimana menjadi investor yang baik, bagaimana bisnisnya bisa berkembang...jadi perspektifnya itu tidak lingkungan pure gitu, selalu melihat kapitalisasinya seperti apa”*. (Informan 10, 8 September 2025)

Sementara, di media Sebelas, berita lingkungan tidak terlalu banyak penontonnya berdasarkan data rating share. Menurut Sebelas, ini membuat pengiklan tidak tertarik. *“Kecuali dia pengiklan yang punya kepentingan...dia mau pasang iklan di sini tapi kan ada kepentingan bukan karena dia peduli sama lingkungannya, warganya itu”*. (Informan 11, 9 September 2025)

Kepentingan yang dimaksud Sebelas misalnya perusahaan pengiklan ingin memikat warga untuk bisa masuk ke wilayahnya, atau ingin terlihat peduli lingkungan, dst. Untuk berita berbayar semacam ini, tidak bisa sepenuhnya mengikuti keinginan yang membayar. Namun, berita tersebut bisa masuk ke program berita harian -bulletin di segmen paling terakhir dan tanpa penanda apapun sebagai berita berbayar.

“Kalau isi biasanya kita membatasi misalnya kalian boleh memberikan statement aja misalnya. Selebihnya naskahnya itu kita yang buat. Terserah statement-nya mau bagaimana membela diri juga nggak apa-apa yang penting statementnya seperti itu dan biasanya pengiklan maunya kayak begitu”. (Informan 11, 9 September 2025)

Sebelas yang merupakan Kepala Departemen Pemberitaan di Stasiun Televisi sebuah grup besar menyatakan, sangat jarang ada yang ingin beriklan atau memproduksi konten kerjasama terkait lingkungan. Secara umum, jika konten berbayar maka mereka biasanya *blocking time* di luar redaksi. Kecuali, ada permintaan produksi dikerjakan oleh tim redaksi. Presenter pun juga bisa “dipinjam” dari redaksi. *“Kalau talkshow itu biasanya dikasih ke tim kita nih di tim CA tetapi kita sebatas tim produksi karena semua pertanyaan itu sudah dari sana semua, jadi udah kita pekerja aja”*. (Informan 11, 9 September 2025)

Untuk produksi semacam ini, tim sales yang menjadi pemimpin produksi. Dan ini jamak di grup medianya. *“Justru dia yang supervisi. Iya punya hak (editing)”*. (Informan 11, 9 September 2025)

Sementara, di media Dua Belas, tidak ada model peliputan kolaborasi yang dibiayai, termasuk oleh korporasi. Desk lingkungan berupaya mengembangkan

ekosistem pendanaan mandiri, untuk menjaga independensi sekaligus mengupayakan isu ini tetap diangkat di media. *“Kita biasanya berkolaborasi juga dengan beberapa CSO, ini juga masih ada debatable di beberapa kawan-kawan juga. Maksudnya sedikit harusnya itu tanggung jawab kantor dong kita jadi nggak independen dong kalau satu, kolaborasi itu enggak pernah ada pesanan. (Informan 12, 13 September 2025)*

Model liputan kolaborasi yang dikembangkan di media Dua Belas, harus sudah disetujui Redaksi. Artinya, perencanaan dibuat terlebih dahulu oleh tim liputan. Kemudian, lembaga mitra kerjasama, tidak dapat mengatur isi liputan. *“Gua tetap harus melaporkan dan itu semua harus pakai MoU karena pada akhirnya duitnya harus ke kantor”. (Informan 12, 13 September 2025)*

Sebagian kolaborator membantu karena memang dekat dengan media Dua Belas, sebagian lain karena dianggap punya fokus yang sama dengan isu yang mau diangkat. *“Kantor bisanya berapa, misalnya bisanya mengeluarkan 5 juta sedangkan kebutuhannya 40 juta maka 35 juta gua harus cari dong. (Kolaborator) Tahu perencanaan dari kami tapi selama pengerjaan itu sama sekali mereka nggak iniin...Jadi kami ngerjainnya seperti apa dan output yang keluar yang seperti apa itu mereka enggak boleh tahu, dari awal. Itu yang makanya di MoU itu ada kita tidak bisa memberikan pra blablabla, itu tidak boleh”. (Informan 12, 13 September 2025)*

Tidak ada intervensi selama produksi, pasca produksi bahkan kolaborator juga tidak diwawancarai. Kalaupun lembaga atau institusi tersebut memiliki hasil riset yang relevan dengan isu yang diangkat, hasil risetnya yang digunakan untuk melengkapi laporan jurnalistik. Publik juga akan tahu bahwa konten tersebut adalah hasil kolaborasi.

“Dituliskan bahwa “laporan ini atas dukungan” itu selalu ada di bawahnya tapi kita tidak akan kasih logo karena itu ribet lagi nanti di web dan di cetak pun kita nggak kasih tapi kita tuliskan tuh di atas, di bawah judul bahwa laporan ini atas dukungan blablabla dan kalau masih ada (nama media) di situ berarti urunan”. (Informan 12, 13 September 2025)

Sementara, kolaborasi dalam peliputan lingkungan, menurut Lima Belas, jarang terjadi dengan sesama jurnalis antar media di grup. Liputan mendalam hasil kolaborasi yang dimaksud merupakan kerjasama dengan brand atau jenama. Misalnya dengan merek air mineral. Lalu sejauh mana “kolaborasi” ini memengaruhi tulisan?

“Kalau liputan bareng brand itu tentu kita nggak bisa tentuin sendiri itu tidak 100%, kita biasanya ngobrol karena kan brand punya kepentingan maka kita harus mengakomodasi kepentingan brand lalu habis itu kita diskusi tapi yang pasti bukan sesuatu yang merugikan brand kan karena brand pasti nggak mau, jadi tone-nya positif”. (Informan ke-15, 17 September 2025)

Pendekatannya menurut Lima Belas, tidak dalam konteks jurnalisme masalah. *“Kita tidak main dalam jurnalisme yang menyerang”. (Informan ke-15, 17 September 2025)*

Informan Dua, Tiga dan Empat sepakat bila sumber daya manusia merupakan tantangan luar biasa dalam mengelola media atau desk yang menampung tulisan berfokus isu lingkungan. Mereka sulit mencari regenerasi jurnalis muda yang peduli akan isu lingkungan.

“Bicara soal kapasitas dalam memahami isu ini. Bikin berita dengan memahami isu kan dua hal yang berbeda. Bikin berita, mereka menulis tetapi memahami secara komprehensif soal isu lingkungan, apalagi di kita yang agak memberi ruang untuk diversity dan konservasi, itu tantangan yang luar biasa”. (Informan 3, 26 Agustus 2025)

Hal ini membuat sekitar 80 persen liputan investigasi lingkungan yang diproduksi medianya, masih bertumpu pada Tiga. *“Liputan-liputan mendalam seperti ini kan butuh riset, butuh memahami topiknya secara keseluruhan, di poin itu yang masih menjadi tantangan yang luar biasa bagi kami”. (Informan 3, 26 Agustus 2025)*

Jurnalis yang berusia di atas 50 tahun ini berupaya mengatasi dengan mendorong tim liputannya untuk terus belajar. Walau di era “jurnalisme algoritma” ini, menurut Tiga, tidak mudah. *“Apalagi kemudian mereka-mereka ini disuruh fokus untuk lingkungan dan konservasi sedangkan mereka sedang tertarik dengan isu-isu yang populer, yang pop”. (Informan 3, 26 Agustus 2025)*

Jurnalis Gen Z, menurut Tiga, lebih tertarik bekerja cepat. Sementara, jurnalisme lingkungan, membutuhkan banyak riset melalui artikel jurnal, riset dokumen, hasil studi lembaga yang tentu butuh waktu tersendiri untuk memahami isunya. Tiga berharap, tahun depan sekitar 80 persen awak redaksi medianya bisa bertumpu pada anak muda. Dan ini sudah dimulai sejak 2024. Sejauh ini, mereka yang sudah dididik secara internal untuk mendapat pendidikan jurnalistik maupun isu lingkungan masih setia di perusahaan media yang dikelola secara manajemen keluarga. Namun Tiga masih menyimpan kekhawatiran, bila ia tak lagi di sana, apa anak-anak muda ini masih mau bertahan atau tidak. Sementara, untuk pendanaan, Tiga mengaku tidak khawatir. *“Saya pikir dengan media kami 7 tahun fokus di situ mitra banyak, kayak NGO, CSO kasih fellow. Kita pernah mengerjakan fellow yang dapat 100 juta untuk perdagangan (satwa ilegal). Meyakinkan anak-anak itu bahwa isu ini ada duitnya meski mereka sudah lihat ada tetapi tantangannya luar biasa, itu persoalannya”. (Informan 3, 26 Agustus 2025)*

Berbeda dengan Tiga, informan Dua dan Lima menganggap tantangan utama liputan isu lingkungan adalah soal biaya operasional. Selama ini, untuk mengisi konten di media yang didirikannya, Lima misalnya, menumpang penugasan liputan di media lain.

“Jurnalisme lingkungan itu jurnalisme berbiaya tinggi juga”. (Informan 2, 26 Agustus 2025). “Misalnya turun liputan untuk A, saya juga menulis isu-isu lainnya untuk B, angle-nya dibedain atau misalnya sama tapi yang terbit di A agak berbeda...Ini cara agar media ini terus ada update informasi soal lingkungan”. (Informan 5, 26 Agustus 2025)

Terkadang media yang didirikan Lima, menjadi outlet untuk hasil *fellowship* soal lingkungan yang diikutinya. Lima juga menggarisbawahi soal tantangan keamanan, baik fisik maupun digital. Apalagi Lima pernah mengalami intimidasi fisik hingga *doxing*.

“Karena saya menulis soal praktik pertambangan ilegal, lalu saya juga nulis soal pelet kayu itu karena perusahaannya besar, perdagangan ilegal ke Korea Selatan dan Jepang. Perusahaan sempat nyari saya waktu itu bahkan bukan hanya karyawan tapi keluarga karyawan”. (Informan 5, 26 Agustus 2025)

Delapan juga menganggap faktor risiko yang mengancam keselamatan jurnalis lingkungan sebagai tantangan mengangkat isu ini ke media. Baik dari perusahaan, aktor pelaku pengrusakan lingkungan, aparat keamanan maupun warga yang diuntungkan. Selain itu, soal isunya yang dianggap tidak menarik. Kemudian masalah biaya, karena media televisi minimal memberangkatkan dua orang untuk meliput isu lingkungan.

“Masih isu marginal dan isu lingkungan kan baru hype belakangan ini. Kedua faktor biaya, kita kan nggak mungkin di saat ini...dulu juga ya kalau kita nggak ada undangan atau sponsor untuk mungkin jarang ya ada, tetapi jarang sekali. Selain biaya itu risiko, karena ada faktor keselamatan baik dari sisi alamnya karena cukup jauh dan cukup berisiko bagi keselamatan jurnalis”. (Informan 8, 4 September 2025)

Sepuluh juga mengakui soal biaya dan sumber daya manusia menjadi tantangan mengangkat isu lingkungan. Soal SDM ini menyangkut jumlah dan pemahaman. Sepuluh sendiri saat ini tengah kuliah S2 ilmu lingkungan, lantaran diminta oleh medianya agar lebih memahami isu lingkungan. *“Tidak semua paham isu lingkungan. Aku kan kebetulan lagi studi ya jadi diminta untuk kuliah. ...Jadi di situ aku coba petain karakter-karakter perusahaan dalam mengelola lingkungan, tidak hanya greenwashing tetapi ternyata ada banyak yang dilakukan oleh perusahaan itu termasuk mereka mengelola masalah lingkungan ini biar nggak kelihatan jadi masalah di luar”. (Informan 10, 8 September 2025)*

Kurangnya pengetahuan reporter terkait bagaimana membaca laporan keberlanjutan disandingkan dengan situasi riil di lapangan, membuat mereka kerap kurang kritis melihat persoalan. Sepuluh mengakui, laporan reporter kerap kali kurang utuh dalam memotret persoalan. Jika masih ada waktu, editor biasanya akan meminta laporan dilengkapi. Namun, dalam beberapa kasus, situasi semacam itu dibiarkan dan laporan tersebut bisa terbit begitu saja. *“Misalkan kita menulis Antam...pergi ke Obi itu bopeng-bopeng kalau kita lihat ya areal tambangnya dari satelit, bagaimana Pulau Obi itu wilayah konsesi mereka itu sudah rusak namun perusahaan ini terdaftar sebagai perusahaan yang masuk KEHATI, yang dianggap ramah lingkungan oleh investor dan kita berpijak pada standar ini...banyak reporter yang kemudian tidak secara objektif melihat kondisi tampaknya”. (Informan 10, 8 September 2025)*

Senior Editor yang sudah bekerja selama 18 tahun di media ini, pernah mengajukan usulan liputan terkait lingkungan, namun tidak diberi tim untuk meriset dan meliput.

“Usulan disetujui tetapi aku nggak dikasih tim masa aku kerjain sendiri, lagi-lagi di SDM itu dan ketika aku minta teman-teman lain untuk mencoba masuk tim itu pekerjaannya mengedukasi teman-teman yang lain ini mereka belum menguasai bagaimana mencari data, mengumpulkan data...Ini secara data tersedia dan waktu itu cuman dikembalikan ke aku jadi cuma aku aja yang kerja jadi aku menyerah”. (Informan 10, 8 September 2025)

Tak hanya itu, Sepuluh juga masih harus mengurus kolaborasi terkait isu lingkungan di grup mediana. Ini, di luar membantu produksi konten di luar mediana. *Brand* media milik Sepuluh memiliki beberapa produk di berbagai platform. Bahkan ada yang khusus menampung *release* ataupun informasi promo. Sebanyak 30% pemasukan *brand* berasal dari *membership*. *“Aku juga di sini bekerja untuk membantu tim-tim yang lain juga gitu, aku ngerjain insight, aku bantuin harian juga bantu ngedit, ya bantu online juga..by system, sudah diatur sama manajemen”. (Informan 10, 8 September 2025)*

Bagi Sebelas, tantangan utama mengangkat isu lingkungan ke media televisi adalah *audience*. Padahal, mereka sudah memulai ceritanya dari *human interest*. Namun menurut lulusan pascasarjana Ilmu Politik Universitas Negeri di Jawa Timur ini, berita lingkungan baru dianggap menarik bila sudah berdampak pada manusia dan mengakibatkan bencana.

“Kalau masyarakat itu aware sama lingkungan di mana tempat dia tinggal maka dia akan peduli. Nah, persoalannya kita menemukan masyarakat yang tidak aware. Jadi, ketika kita menyajikan berita misalnya bencana alam atau akibat kerusakan lingkungan ya sudah itu hanya sebatas berita aja. Yang dilihat itu kan banjirnya bukan kenapa banjir”. (Informan 11, 9 September 2025)

Sebelas mengakui, faktor sumber daya manusia atau jurnalis di redaksi juga mempengaruhi. Banyak jurnalis terjebak rutinitas kerja dan liputan isu yang dianggap lebih disukai penonton -politik, hukum, kriminalitas, ketimbang isu lingkungan. Akibatnya mereka tidak memiliki kesadaran dan pemahaman akan isu lingkungan. *“Pahamnya makin lama tergerus. Harusnya diimbangi dengan adanya pelatihan-pelatihan dan ini nggak ada, pelatihan itu maksudnya soal nge-charge baterai soal lingkungan. Jadi pemahaman isu itu enggak pernah ada. Waktu itu pernah ada lomba-lomba, fellowship, juga nggak terlalu antusias juga yang ikut. Aku suka share, siapa yang mau ikut nih 2-3 hari di luar kota. Diem semua”. (Informan 11, 9 September 2025)*

Bahkan sekalipun ada undangan dari Kementerian/ Lembaga yang terkait soal isu lingkungan, mereka ikut kemudian menayangkan dan tidak pernah ada upaya membuat *follow up news*. Menurut Sebelas, sekedar menggugurkan kewajiban. Tantangan sumber daya manusia, juga dihadapi informan Dua Belas. Dari sisi jumlah, SDM desk Lingkungan nomor dua paling sedikit dibanding desk lainnya. Prioritas

utama, seturut dengan fokus media Dua belas adalah desk politik dan ekonomi. Namun, jika ada isu lingkungan yang dianggap kuat, bisa diliput jurnalis desk lain. Dan, berdasarkan pengakuan Dua Belas, mereka sering berkolaborasi. Sebagai Kepala Desk Lingkungan, Dua Belas bisa menugaskan jurnalis di desk lain, bila disepakati di rapat besar.

“Kami itu cuman ada 10 orang sedangkan nasional itu bisa sampai 30-an orang dan memang alokasi sumber dayanya itu core-nya masih di politik dan ekonomi. Tapi yang perlu diingat di lingkungan itu nggak hanya punya desk lingkungan tetapi juga sering dikerjakan oleh kawan-kawan di desk hukum maupun ekonomi”. (Informan 12, 13 September 2025)

Meski jumlahnya sedikit, namun Dua Belas menyebut jurnalisnya memiliki sensitivitas terhadap isu lingkungan. Persoalan penguasaan masalah, membaca data masih bisa diatasi dengan belajar bersama di ruang redaksi. Dua Belas kerap membagikan pengetahuan dan keterampilannya soal ini. *“Berkaitan dengan teknik itu juga masih banyak yang kurang. Misalnya mungkin enggak ada atau cuma segelintir teman-teman bisa membaca peta gitu, kemudian menganalisis secara sederhana GIS, itu kan technical tetapi penting”. (Informan 12, 13 September 2025)*

Tantangan lain, adalah soal dana liputan. *“Kondisi bisnis sekarang itu relatif mustahil untuk bisa mensupport dari kantor. Ini sudah terjadi sebelum pandemi sedikit lah, ketika pandemi makin parah dan sekarang sudah mulai membaik untuk beberapa liputan-ikutan yang masih bisa atau masih masuk di akal secara biaya itu kita masih cover seperti di Jawa. Tapi isu lingkungan itu lebih banyak di luar Jawa kan yang sekarang ini dan enggak lagi Sumatera, sudah sampai Sulawesi dan Maluku juga Papua yang itu biayanya tinggi banget”. (Informan 12, 13 September 2025)*

Dua Belas mencoba bersiasat dengan mencari peluang pendanaan lain, salah satunya melalui program *fellowship*. Tim liputan didorong untuk memanfaatkan program tersebut. Sementara Dua Belas bahkan secara aktif mencari informasi peluang ini untuk dibagikan ke para jurnalis. Sejak 2023, peluang pendanaan dari pihak lain termasuk *fellowship* bahkan yang diterima atas nama pribadi dikelola oleh media.

“Dibikin skema, skema itu termasuk insentifnya. Insentif project, ini lebih fair dan lebih bagus. Meskipun bagi sebagian orang mungkin menganggap ini terlalu diatur ya, tetapi menurut gua ini bagus misalnya duit fellowship itu masuknya ke kantor, gua ini dapat pendanaan itu nggak bisa buat terima sendiri harus langsung ke kantor dan dikelolanya oleh sekretariat redaksi, satu dari sisi akuntabilitas itu kan lebih bagus dan bagaimanapun kita enggak cari pendanaan itu bukan untuk tambahan gaji tetapi untuk...jadi menambal kebutuhan untuk operasional ke lapangan”. (Informan 12, 13 September 2025)

Jurnalis penerima tetap mendapat insentif atau bagian dari *fellowship* tersebut. Ketentuan besarnya, diatur dalam Surat Keputusan (SK) perusahaan yang ditandatangani Direktur. Bahkan semua anggota tim yang terlibat juga mendapat

insentif. Karena menurut Dua Belas, ini adalah kerja bersama sampai hasil liputan bisa diterbitkan dan dinikmati oleh khalayak. Jika masih ada kelebihan dana dari program *fellowship* tersebut, akan tetap disimpan oleh sekretariat redaksi. Dana semacam *petty cash* ini sewaktu-waktu akan dapat digunakan untuk liputan peristiwa besar, seperti bencana alam.

Mitigasi Redaksi Terkait Keamanan Jurnalis

Informan Dua, Tiga dan Empat mengakui liputan isu lingkungan riskan bagi jurnalis. Tapi mereka tidak memetakan itu sebagai tantangan yang utama, lantaran bisa dimitigasi melalui pelatihan yang diinisiasi oleh organisasi jurnalis. *“Kalau dari sisi keamanan jurnalis pasti ada, sangat besar. Tapi bagi saya itu bisa diselesaikan karena kan pelatihan-pelatihan yang AJI lakukan, lalu teman-teman PPMN itu yang menurut kita cukup bagus. Saya lebih mengkhawatirkan soal SDM kita, kita mau mencari siapa sekarang jurnalis di daerah anak muda yang mau fokus di isu lingkungan, itu luar biasa menantang”.* (Informan 3, 26 Agustus 2025)

Jurnalis muda ini, menurut Tiga, belum terlalu sadar soal keamanan baik fisik maupun digital.

“Saya bahkan sekarang punya program yang magang berbayar itu saya belum dapat dari puluhan yang mendaftar. Karena saya cari anak-anak yang belum terlanjur populer di media sosial karena persiapan tim investigasi”. (Informan 3, 26 Agustus 2025)

Sementara, menurut Empat tim jurnalis di medianya melihat dan meniru gaya dirinya liputan. Termasuk soal mitigasi keamanan jurnalis. Ia meminta jurnalis muda membaca modul perlindungan jurnalis yang disusun oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Empat mendapatkan jurnalis muda dari pers mahasiswa. Mereka usia 20-30 tahunan yang rata-rata lulusan S1 komunikasi dan merupakan orang lokal. Meski sudah menyiapkan mitigasi, namun tetap saja peluang para jurnalis mendapat kekerasan, besar. *“Kayak intimidasi, teror lewat telepon dan lain-lain ya ada”.* (Informan 3, 26 Agustus 2025)

“6 bulan lalu saya didatangi salah satu kawan (jurnalis) tetapi dia dekat dengan orang perusahaan...bilang kalau hampir sekitar 90 atau 70 media itu sudah kontrak dengan (perusahaan tambang nikel) jadi mengeluarkan uang sekitar 2 sampai 3 miliar untuk membayar media...Ada orang titip salam abang kalau mau nanti abang tidak masuk dalam kelompok ini tetapi kelompok khusus”. (Informan 2, 26 Agustus 2025)

Dua, menolak dengan baik tawaran tersebut. Sementara Empat memitigasi risiko kekerasan jurnalis dengan memastikan semua liputan *indepth* dan investigasi isu lingkungan di bawah koordinasinya langsung. Selain itu, tidak ada *byline*. Adapun Dua Belas menyatakan, medianya sudah mulai membakukan *Standard Operational Procedure* (SOP) mitigasi ancaman kekerasan fisik dan digital.

“Ketika kejadian X siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melaporkan, siapa yang boleh tau, jadi gak harus semua tau untuk dilihat skalanya tapi itu semua dari atasan langsung. Yang belum dan ini masih menjadi kekurangan adalah SOP untuk peliputan di lapangan ini kan tadi untuk merespon beberapa kejadian-kejadian ancaman terakhir tetapi yang belum dibakukan itu justru SOP untuk peliputan lapangan karena selama ini masih berbeda-beda tergantung dengan redaktornya”. (Informan 12, 13 September 2025)

Dalam hal ini, menurut Dua Belas, jam terbang redaktur menjadi penting. Hal ini menentukan sensitivitas memetakan risiko liputan, yang akan berpengaruh pada keselamatan tim liputan. Apalagi mereka memang belum punya standar liputan lapangan yang dianggap berbahaya. *“Kita belum obrolin lagi soal SOP yang peliputan bencana itu kan harus dirinci, peliputan ke Papua itu harus seperti apa, selama ini itu tergantung redaktornya. Kalau yang kayak gitu, kayak misalnya kalau di tempat gua itu misalnya setiap anak gua berangkat itu tergantung risiko ya itu laporan sudah terjadwal. Manajemen komunikasi juga manajemen evakuasi”. (Informan 12, 13 September 2025)*

Adapun Lima Belas mengaku, lantaran DNA mediana bersahabat dengan banyak orang, perusahaan tidak menyiapkan mitigasi untuk keamanan jurnalis. *“Tidak sistematis, ketika ada pelatihan-pelatihan apa tentu pada ikutnya sporadis, diikuti lembaga luar mungkin karena kami hampir tidak pernah mengalami kekerasan”. (Informan ke-15, 17 September 2025)*

Praktek Swasensor di Redaksi Media

Delapan pernah punya pengalaman tayangan yang terkait perusahaan tambang besar di Indonesia diturunkan walau baru tayang satu episode dari tiga episode yang direncanakan. Dua lainnya, tidak tayang sama sekali. Perusahaan melayangkan protes langsung pada Pemimpin Redaksi, lantaran secara editorial dianggap merugikan perusahaan. *“Beberapa liputan teman-teman terutama yang berkaitan dengan beritanya negatif itu di take down. Karena dianggap tidak sesuai dengan harapan maka yang kedua dan ketiga itu tidak ditayangkan dan berita yang pertama itu yang package pertama itu di take down”. (Informan 8, 4 September 2025)*

Sebenarnya dari sisi disiplin jurnalisme, semua sudah dijalankan termasuk verifikasi ke lapangan. Namun kedekatan sang Pemred dengan perusahaan tambang membuat karya jurnalistik harus “kalah”. Dalam kasus ini, perintah menurunkan tayangan langsung diberikan Pemred pada Wakil Pemimpin Redaksi. *“Persoalannya tidak dibahas di rapat editorial, kalau ada kasus-kasus seperti itu jadi tidak langsung...Biasanya kan kalau kita editorial itu kan terbuka kita mau bikin apa, itu nggak, jadi langsung setengah kamar”. (Informan 8, 4 September 2025)*

Delapan menuturkan, berita yang *tone*-nya diubah menjadi positif, tidak hanya berita lingkungan. Namun, juga berita yang terkait dengan penguasa, aktor-aktor politik termasuk institusi coklat. *“Alasan pada kelancaran bisnisnya si owner sih*

sebenarnya. Karena mereka sangat dekat dengan para keamanan, kejaksaan. Jadi memang grup usaha ini kan sering bekerja sama dengan Polisi dan Kejaksaan dan mereka biasanya menjaga hubungan baik". (Informan 8, 4 September 2025)

Delapan sendiri pernah mendapat Surat Peringatan (SP) lantaran memberikan ruang bagi aktivis demokrasi untuk diwawancarai di medianya. Sebelumnya, pemilik pernah mengingatkan untuk tidak menayangkan konten apapun yang menyerang pemerintah. Sekali sepekan, pemilik mengikuti rapat redaksi. Selain untuk mendapat informasi terkait rating dan share, forum ini menjadi kesempatan pemilik memberikan arah kebijakan pemberitaan, isu yang wajib diliput serta narasumber yang harus diambil atau diwawancarai. Di forum ini, tidak ada Redaksi yang berani mendebat pemilik. *"Yang hadir itu direktur grup, pemred, wapemred dan para manager dan manajer pun nggak semuanya kadang-kadang hanya sekedar beberapa. Itu kan dibahas tuh tentang rating and share terus traffic-nya (media online yang mereka miliki) kadang dia akan memberikan instruksi kayak main ini dong, main ini dong, ini beritanya jelek jangan yang ini dan ini gitu, jadi sampai begitu sangat teknis. Terus untuk narasumber ... kalau kita bikin program khusus kita harus menyiapkan setidaknya 4-5 narasumber untuk dipilih sama dia". (Informan 8, 4 September 2025)*

Konten yang disponsori akan dikemas berupa berita berbentuk *package* yang artinya lengkap dengan wawancara. Umumnya berita semacam ini akan masuk ke program berita pagi dan malam. Tidak ada informasi apapun dalam berita yang menunjukkan jika itu adalah berita berbayar. Jika pendekatannya untuk program panjang akan dibuatkan bumper khusus program setengah jam yang terdiri tiga (3) segmen dengan durasi bersih 20-22 menit. Publik, menurut Delapan akan tahu jika program ini berbayar, karena *chargen* (CG) program dibuat berbeda dengan program berita reguler, maupun pilihan presenternya.

Walau, Delapan mengakui ada program *talkshow* reguler yang di setiap episodenya pasti ada narasumber yang membayar. Otomatis sang narasumber tersebut mendapat porsi bicara lebih banyak. Namun, narasumber lain, menurut Delapan, tidak diberitahu jika program tersebut dibiayai pihak tertentu. Untuk bisa mengatur konten program talkshow dengan presenter ikonik, biayanya antara Rp200-300 juta per episode. Harga per episode ini bisa dinegosiasikan. Program berbayar inilah yang menjelaskan mengapa ada isu yang bukan atau minim kepentingan publiknya untuk di level media nasional, bisa tayang.

Sementara, informan Sebelas dan Dua Belas tidak punya pengalaman swasensor. Sebelas, karena relatif tidak ada pemberitaan isu lingkungan yang serius mereka garap kecuali berbasis peristiwa. Adapun Dua Belas, karena value medianya yang memegang teguh prinsip independensi ruang redaksi. Tidak ada yang bisa intervensi, tak terkecuali jajaran komisaris ataupun direksi. *"Bisa dijamin, karena kita beberapa kali nulis tentang (pemegang saham) bahkan Komisaris Independen pun kita tulis, soal aliran duit dia terus di tulisan itu kita tulis komisaris independen media ini gitu, kita tetap declare itu, bukan mau nyombong-nyombongin kantor tetapi memang nggak ada". (Informan 12, 13 September 2025)*

Sementara, konten berbayar seperti yang digagas media Lima Belas, masuk ke subkanal dengan warna yang berbeda. Boleh jadi, awam tidak langsung mengetahuinya bila konten yang di subkanal tersebut berbayar. Menurut Lima Belas, konten berbayar ini tidak mempengaruhi independensi redaksi.

“Kita juga punya sekian persen pertimbangan berita-berita kita itu supaya tidak mengganggu bisnis. Persoalannya lebih pada diksi dan cara melihat persoalannya. Ada misalkan berita-berita yang menyinggung pengiklan, kritis kemudian diprotes sama mereka, karena mereka adalah client, berita itu tidak diturunkan tetapi diperhalus. Jadi, lagi-lagi karena DNA maka kita punya ruang untuk kompromi dengan bisnis. Bukan berarti kita terbungkam, ini soal cara menyampaikan”. (Informan ke-15, 17 September 2025)

Kompromi yang diminta CEO ini biasanya disampaikan ke Pemimpin Redaksi lalu dibicarakan di grup Redaktur Pelaksana dan Editor untuk kemudian “diperhalus” beritanya. Kebijakan ini menurut Lima Belas, tidak pernah disampaikan ke jurnalis di lapangan. Kalaupun misalnya mereka tahu, ini lantaran pembicaraan yang terjadi antar mereka. “Teguran” pemilik atau CEO ini menjadi alarm bagi para *gatekeeper* di Redaksi.

“Ketika ini menyinggung keluarga penguasa atau menyinggung apa itu kan, ada alarmnya untuk hati-hati. Kita harus pakai cara yang cantik itu mainnya...Menghaluskan itu kata-kata, misalkan ada diksi-diksi tertentu yang orang nggak suka, maka kita pakai diksi yang lain. Atau ini ada namanya disebut. Okelah gimana ngakalannya supaya namanya nggak muncul tetapi orang bisa nangkep”. (Informan ke-15, 17 September 2025)

Selain menggunakan metode menghaluskan diksi berita, yang disebut Lima Belas sebagai *win-win solution*, masih ada cara lain. Berhenti memberitakan, sampai kurun waktu tertentu. *“Stop dulu, udah ada telepon banyak. Begini para penguasa yang mengintervensi atau berusaha. Bukan berusaha, tapi sudah melakukan intervensi. Kalau udah kayak gitu kita stop dulu tahan, lagi ada yang marah jadi kita stop dulu nanti lanjut lagi”. (Informan ke-15, 17 September 2025)*

Prinsip Pagar Api Redaksi dan Bisnis

Empat mengakui, tidak mudah menjalankan bisnis media di era saat ini, apalagi medianya fokus pada isu lingkungan. *“Banyaknya media yang tidak independen ini yang hanya bekerja sama dengan pihak lain dalam hal ini kan pemerintah ya. Itu membuat kita menjadi gelisah...sementara kita harus mampu survive (tanpa kerjasama)”. (Informan 4, 26 Agustus 2025)*

Empat mengaku menghindari kerjasama dengan pemerintah atau perusahaan, agar independensi ruang redaksi bisa tetap terjaga. Ia juga menghindari menjadikan jurnalis medianya sebagai pencari iklan atau marketing. Saat ini, media yang dipimpin Empat memiliki 8 kontributor yang tersebar di Maluku, Maluku Utara dan Papua. *“Beberapa kali ikut peneliti, dan itu ada teman-teman juga walaupun kolaborasi bersama”.* (Informan 4, 26 Agustus 2025)

Jika menolak kerjasama, sementara bisnis media juga sulit mengandalkan iklan, lalu bagaimana media yang digawangi Empat hidup? Menurut jurnalis lulusan S2 ini, salah satunya melalui kepercayaan publik yang dibangun sejak awal. Rekam jejak independensi yang terjaga sejak awal, tanpa diduga membawa peluang pendanaan publik. *“Ada simpati dari masyarakat Maluku, ada sebagian masyarakat Maluku yang di Maluku ada yang di Jakarta dan ada yang di Belanda mereka bergotong-royong menyisipkan donasi untuk menyumbang...kami ada donatur tetap, dia tidak setiap bulan tetapi dia tiap 2 bulan untuk kita”.* (Informan 4, 26 Agustus 2025)

Empat mengklaim tidak memiliki kepentingan apapun, selain kepentingan publik. Ini sesuai dengan motto medianya: menyuarakan kebenaran dan independen. *“Dalam sebulan saya harus bayar itu total pengeluaran itu sekitar 13 juta, 13 - 14 juta (rupiah). Kita kontributor itu, saya bahkan jadi kontri ya maksudnya kita tahulah misalnya sampai saat ini, etik itu kan ibaratnya kecil sekali, saya harus menggaji mereka untuk itu per orang Rp50.000 per berita”.* (Informan 4, 26 Agustus 2025)

Hingga tahun 2022, Empat bertahan dengan hibah untuk menghidupi medianya. Kini, tiga tahun terakhir donasi tetap dari warga Maluku yang tidak pernah menyetir redaksi, menghidupi media mereka. Menurut Empat, sebenarnya ada banyak yang ingin menyumbang, namun ia masih sangat hati-hati untuk memverifikasi penyumbang, sumber dana agar tidak ada konflik kepentingan. *“Itukan didapat per 2 bulan sekitar 30 juta tapi bukan 1, itu kan ada beberapa donasi dan beberapa orang yang mau kasih, ya kasih gitu. Sebenarnya banyak orang mau kasih tapi aku juga masih ini ya (hati-hati menanggapinya)”.* (Informan 4, 26 Agustus 2025)

Sementara Dua, menghidupi medianya antara lain melalui subsidi silang dengan pekerjaannya yang lain seperti menulis untuk media lain, mengajar, memfasilitasi diskusi, atau mengisi seminar dan pelatihan terkait jurnalisisme. Menjaga idealisme ini, menurut Dua, Tiga dan Empat tidak mudah saat ini. Maka informan Tiga, menggarisbawahi pentingnya ada proses regenerasi jurnalis muda yang tertarik mengangkat isu lingkungan. *“Ini pekerjaan besar. Di usia kita sekarang kita ini banyak tawaran ya komisioner KPU, jadi (kerja) tambang tetapi karena kita terlanjur punya barrier ini kita masih mampu bertahan”.* (Informan 3, 26 Agustus 2025)

Dua dan Tiga mengaku memiliki komitmen pribadi, batasan yang mereka buat sendiri, yang menjadi pagar “etik” selama menjadi jurnalis. Hal ini yang menurut mereka, menjadi tantangan bagi jurnalis muda. Tiga mencontohkan salah satu jurnalis muda di Sulawesi yang juga menjadi anggota organisasi profesi, kemudian banyak diedukasi soal isu lingkungan, kerap memenangkan *fellowship*, namun ternyata

belakangan mengundurkan diri sebagai jurnalis. Saat ini, ia bekerja di perusahaan tambang.

“Ongkos hidup semakin tinggi, teman-teman yang lain semakin kaya pula kan. Teman-teman kita di organisasi profesi, organisasi media sekarang staf khususnya Bupati, staf khususnya Dewan, sudah bawa mobil sedangkan kita bawa motor. Kita masih bertahan dengan idealisme kita”. (Informan 3, 26 Agustus 2025). “Saya masih bertahan dengan jalan kaki, dengan motor butut, itu keputusan kita”. (Informan 2, 26 Agustus 2025)

Dua juga menolak ketika perusahaan ekstraktif ingin beriklan di mediana. Bahkan ketika mereka menyatakan iklan tersebut tidak akan mempengaruhi konten. *“Tidak, hari ini mau 100 juta atau 150 juta ... saya tidak mau”. (Informan 2, 26 Agustus 2025)*

Empat juga beberapa kali mau disuap perusahaan ekstraktif. Sejak itu, ia selalu mengajak kawan bila diminta bertemu narasumber yang bukan warga terdampak, atau saat ingin mengkonfirmasi temuan di lapangan. Salah satunya saat ia bertemu narasumber pasir garnet yang sudah mencarinya selama dua pekan setelah tulisannya terbit. *“Sudah disiapkan amplop coklat tebal, panjang...katanya uang pulsa ... Sabar kita duduk dulu, ini kan teman-teman sana sudah biasa dikasih ini. Bang jangan begitu kalau mau ubah, abang harus ubah tata kelolanya, saya bikin bukan mau menghakimi abang”. (Informan 4, 26 Agustus 2025)*

Empat menolak upaya narasumber untuk mengintervensi Redaksi. Integritas Empat sebagai jurnalis lingkungan, menurutnya didapat lantaran ia sudah lama peduli akan isu lingkungan. Termasuk dengan aksi nyata seperti berupaya mengatasi sampah, menanam pohon dan seterusnya. *“Selain komitmen, kita juga menjaga kepercayaan masyarakat”. (Informan 4, 26 Agustus 2025)*

Ketiga informan -Dua, Tiga dan Empat yang merupakan warga lokal, menganggap menjaga kepercayaan masyarakat ini sangat penting. Masyarakat tidak bisa membedakan mana konten berita dan mana *advertorial* atau konten yang berbayar. Hal ini antara lain terlihat ketika media mingguan yang dikenal dengan liputan investigasinya, hadir dengan film pendek menggunakan pendekatan dokumenter yang sebenarnya merupakan inforial. Warga lokal yang terdampak dengan perusahaan pertambangan pemasang iklan, sangat marah.

Sementara, Pagar api antara Redaksi dengan bisnis media, bagi Delapan, sudah tidak ada lagi. Delapan mencontohkan pihak sales bisa menghubungi redaksi untuk melindungi kepentingan pengiklan dengan cara menurunkan berita tertentu, atau mengubah kebijakan redaksional akan sebuah isu. Saat masih proses *bidding* pun, pihak marketing media bisa meminta redaksi untuk ‘melunak’ agar mereka bisa mendapatkan iklan dari korporasi atau pemerintah tersebut.

Sulit sekali, mengangkat isu lingkungan di redaksi. Kalau pun bisa, Delapan mencontohkan hanya bisa mengangkat *sidebar*, seperti bahaya polusi udara,

dampaknya. Namun tidak bisa membuat laporan mendalam apalagi investigasi soal siapa pembalak di Taman Nasional, bagaimana penambangan ilegal bisa terus berlangsung, dll. Artinya, jangan sampai mengganggu kepentingan bisnis media ataupun grup.

“Apalagi yang nabrak-nabrak korporasi bukan hanya korporasi saja tapi pemerintah itu lebih susah lagi, apalagi menyangkut kalau si terduga pelakunya misalnya partai politik terus pemerintah itu agak sulit, agak-agak rame itu berlapis-lapis”. (Informan 8, 4 September 2025)

Untuk program berbayar, pengiklan bisa mem-*preview* konten sebelum ditayangkan. Keleluasaan bagian marketing mempengaruhi redaksi, berlangsung terutama sejak perubahan analog ke digital. *“Lagi-lagi-lagi kalau mau ngomongin itu tuh power orang-orang marketing pasti lebih besar daripada orang editorial, editor. Jadi kalau hari ini sudah diedit ulang dan sudah di preview ya 3 kali ya itu nggak ada 3 kali (bisa lebih), ya sampai puas”. (Informan 8, 4 September 2025)*

Sementara, *advertorial* yang masuk ke media Sepuluh, bisa ditolak, bila institusi tersebut dianggap melanggar lingkungan. *“Itu gak masuk. (Keputusan) Di rapat redaksi, di rapat kita... misalkan jika tidak ada indikator yang bagus untuk ditulis ya ngapain ditulis gitu”. (Informan 10, 8 September 2025)*

Menurut Sepuluh, perusahaan tersebut mungkin bisa beriklan di *brand* media yang sama namun berbeda *platform*. Media yang digawangi Sepuluh, menurutnya hanya memuat informasi perusahaan yang menjalankan standar pembangunan berkelanjutan yang baik. Tidak ada jurnalisme kritis di dalamnya. *“Media ini didedikasikan sebagai panduan bagaimana investor atau pelaku bisnis pengusaha itu menjalankan bisnis yang rambu-rambunya itu ESG gitu. Jadi aku mencari perusahaan yang ESG-nya bagus”. (Informan 10, 8 September 2025)*

Sementara, Sebelas menyatakan pagar api masih dijalankan di medianya. Namun, ini amat bergantung pada *gatekeeper* yang bertugas saat itu. Ia sendiri biasanya akan coba menawar pada bagian/tim sales soal penayangan berita berbayar setelah *bulletin* (program berita harian).

“Pagar api itu tetap ada cuman memang kalau dilihat bentuknya seperti apa...jadi ada mungkin spot-spot iklan yang tiba-tiba muncul di pemberitaan padahal itu adalah berita berbayar atau berita barter. Itu ada, tetapi jumlahnya tidak banyak kalau misalnya dari 22 berita paling ada 1. Itu di bulletin harian. Biasanya kita dari redaksi itu selalu memberikan tawaran, boleh nggak setelah closing presenter, kalau salesnya oke”. (Informan 11, 9 September 2025)

Ini cara Sebelas, untuk tetap menegakkan pagar api. Berita berbayar ditayangkan setelah keluar *credit title* dari program berita harian yang sebenarnya menandakan program sudah selesai. Namun, upayanya tak selalu berhasil. *“Tapi pernah kejadian aku tolak tapi tiba-tiba dia naik ke pemred dan itu diboletin sesuai*

maunya client. Aku udah berapa kali nolak-nolak tapi tahunya di iyain, itu brand produk". (Informan 11, 9 September 2025)

Sejak itu, Tim Sales biasanya menghindari berkomunikasi dengan Sebelas walau posisinya adalah Kepala Departemen Pemberitaan. Dan ia sudah mengalami rotasi ke jajaran manajemen berbagai media televisi yang dimiliki grup. *"Sudah langsung ke pemred-nya gitu. Jadi dia langsung nerabas aja kan dia tahu pasti kalau sama saya ditolak-ditolak". (Informan 11, 9 September 2025)*

Dua Belas juga punya pengalaman dengan tim Sales. Mereka menerima iklan dari pihak yang tengah diliput secara mendalam oleh redaksi. *"Kami nggak pernah tahu iklan yang masuk itu. Bahkan mereka merencanakan mendekati siapapun, kita nggak tahu. Karena memang ada beberapa aturan tidak tertulis itu tentang firewall. Misalnya, kita memang enggak boleh ketemu narasumber itu barengan dengan anak iklan gitu". (Informan 12, 13 September 2025)*

"Angkat kasus Wilmar, tiba-tiba Wilmar mengiklan gitu. Di edisi yang sama, sampai anak iklannya itu diproses, karena kita redaksi mempersoalkan. Lalu kita mengerjakan food estate, Kementan tiba-tiba bikin advertorial meskipun tidak di edisi yang sama". (Informan 12, 13 September 2025)

Menurut Dua Belas, meski ada upaya-upaya dari tim Sales, namun pagar api masih terjaga. Misalnya tim Sales mengajak perusahaan atau institusi untuk media visit. Maka, menurut Dua Belas, Redaksi benar-benar harus hati-hati.

BAB IV REFLEKSI DAN REKOMENDASI

Meliput Alam Tindakan Berisiko

Di tengah krisis lingkungan global yang kian parah, jurnalisme lingkungan memegang peran vital sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan kesadaran masyarakat. Namun, seperti diungkap dalam riset ini, pekerjaan di sektor ini kian berat dan berbahaya. Dari 125 jurnalis yang disurvei di 38 provinsi, enam dari sepuluh jurnalis pernah mengalami kekerasan fisik saat meliput isu lingkungan.

Situasi ini telah memperberat kerja jurnalisme lingkungan, yang dalam sejarah pers di Indonesia cenderung termarginalisasi. Sejarah jurnalisme lingkungan di Indonesia tak bisa dilepaskan dari warisan ideologi *developmentalisme* Orde Baru yang menempatkan alam sebagai sumber daya ekonomi, bukan subjek kehidupan (Peluso, 1992; Li, 2007). Perspektif ini melahirkan bias struktural di ruang redaksi media, di mana liputan lingkungan dianggap sekunder dibanding politik atau kriminalitas. Hingga kini, hanya sekitar 200 dari 235.000 jurnalis nasional yang fokus pada isu lingkungan, menjadikannya kelompok minoritas yang bekerja di garis depan dengan perlindungan yang minim.

Dimensi ketidakadilan berbasis gender memperparah kerentanan jurnalis lingkungan di Indonesia. UNESCO (2023) mencatat bahwa jurnalis perempuan tiga kali lebih sering menjadi korban pelecehan daring dibandingkan jurnalis laki-laki. Di Indonesia, jurnalis perempuan yang meliput isu tambang seringkali mendapat komentar seksis dan ancaman kekerasan fisik dan digital. Sementara itu, banyak redaksi media belum memiliki protokol keamanan berbasis gender, memperlihatkan bias patriarki dalam struktur media. Dalam konteks ini, maka kebebasan pers dan perlindungan kerja jurnalisme kritis/investigatif tanpa perspektif dan kebijakan berbasis keadilan gender hanyalah semu.

Ruang digital yang awalnya menjanjikan kebebasan, demokratisasi informasi kini berubah menjadi arena kontrol opini. Peneliti Ross Tapsell (2018) menunjukkan bahwa sejak Pemilu 2014, ruang digital Indonesia dipenuhi “tentara siber” dari dua kubu politik besar yang mengendalikan wacana publik. Jurnalis yang kritis terhadap kebijakan lingkungan sering menjadi target peretasan dan disinformasi, karena mereka menyajikan berbagai fakta dan isu terkait oligarki politik dan ekonomi. Di era algoritmik ini, seperti ditulis Zuboff (2019), kapitalisme digital menukar kebenaran dengan perhatian. Akibatnya, berita lingkungan yang kompleks kalah bersaing dengan konten dangkal dan viral.

Riset ini telah menyajikan data dan analisa, serta refleksi bahwa negara seharusnya menjadi pelindung, bukan bagian dari atau setidaknya membiarkan adanya tindak kekerasan kepada jurnalis selaku pejuang HAM dan warga negara. Riset AJI (2025) ini menunjukkan bahwa aparat pemerintah, termasuk BUMN, kerap menjadi pelaku intimidasi terhadap jurnalis peliput isu lingkungan. Secara khusus riset

melihat, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mencantumkan jaminan keselamatan bagi peliput kasus lingkungan. Padahal, mereka sejatinya adalah *human rights defenders*, sebagaimana diakui dalam Deklarasi PBB 1998 tentang Pembela HAM.

Dari sisi manajemen redaksi dan kegiatan jurnalisme secara umum, kerja liputan lingkungan membutuhkan riset data dan kasus yang mendalam, juga perjalanan ke daerah terpencil, tentunya dengan biaya mahal, dan berisiko. Namun survei kami menunjukkan tiga hambatan utama yang dialami jurnalis lingkungan Indonesia, yaitu biaya liputan yang tinggi (22%), kompleksitas isu (19%), dan minimnya data/narasumber (17%).

Tekanan dan ancaman terhadap masyarakat yang bersuara kritis sebagai sumber berita juga menguat. Selain mengalami ancaman kekerasan fisik dan psikis, mereka yang bersuara kritis terhadap perusakan lingkungan hidup dibungkam melalui gugatan hukum atau dikenal sebagai SLAPP (*strategic lawsuit against public participation*). Misalnya, kasus yang dialami dua Guru Besar IPB University, yakni Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis yang digugat secara perdata oleh PT KLM karena keterangan mereka dituding merugikan perusahaan. Pihak KLM menilai keterangan Bambang dan Basuki sebagai ahli pada saat persidangan membuat perusahaan itu dihukum membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan atas kasus kebakaran lahan tahun 2018 (*Kompas*, 8 Juli 2025).

Gugatan hukum oleh pihak yang memiliki kuasa ekonomi dan politik ini kerap kali dilakukan dengan menggunakan berbagai celah regulasi resmi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) termasuk yang paling sering dipakai untuk membungkam suara kritis di pengadilan. Undang-undang ini kerap dipakai oleh pelaku bisnis atau pejabat publik untuk menekan sikap kritis, seperti yang dialami aktivis sosial Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tahun 2023 terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Haris dan Fatia dilaporkan Luhut karena menyampaikan dugaan keterlibatan sang Jenderal dalam bisnis tambang di Papua melalui acara diskusi yang disiarkan di kanal Youtube.

Kasus SLAPP terjadi secara terselubung. Hal ini, misalnya, dialami pegiat lingkungan Karimunjawa, Jawa Tengah, Daniel Frits Maurits Tangkilisan yang seolah dilaporkan oleh "warga" lain, akibat komentarnya di media sosial tentang kritik dan penolakannya terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan limbah tambak udang. Upaya membungkam suara kritis terkadang tidak hanya dalam wujud gugatan keperdataan antarnegara atau pebisnis melawan masyarakat sipil, tetapi juga dalam hukum pidana. Hal ini, misalnya, dialami 34 warga yang menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-city. Mereka ditangkap saat aksi unjuk rasa di depan Kantor BP Batam yang berlangsung ricuh pada 11 September 2023. Seluruh terpidana dari Pulau Rempang ini dituntut melanggar Pasal 170 ayat 1 UU KUHP karena dianggap melakukan kekerasan atau perusakan.

Berbagai tekanan terhadap aktivis sosial yang memiliki suara kritis ini menyebabkan para narasumber jurnalisisme investigasi menjadi lebih berhati-hati, terutama jika menyangkut delik perusahaan dan pejabat publik. Pada akhirnya, jurnalis semakin kesulitan mendapatkan data dan sumber informasi untuk mendukung liputan lingkungan.

Di sisi lain, isu lingkungan juga dianggap “tidak menghasilkan klik” alias memiliki tingkat keterbacaan yang rendah yang berkorelasi dengan pendapatan ekonomi media. Hal ini menyebabkan redaksi lebih sering mengalokasikan anggaran dan sumber daya manusianya untuk berita topik lain, seperti politik, ekonomi, bahkan bahkan hiburan. Sejalan dengan temuan Ward (2022) bahwa kepentingan ekonomi (*attention economy*) telah mendorong redaksi mengutamakan berita sensasional ketimbang berita publik.

Secara internasional, kekerasan terhadap jurnalis lingkungan bukan fenomena baru. Laporan UNESCO (2023) mencatat bahwa 70% jurnalis yang meliput isu lingkungan di Asia Tenggara pernah mengalami ancaman fisik atau digital. Survei kami dalam laporan ini juga menemukan, dari 125 jurnalis selaku responden di 38 provinsi, enam dari sepuluh jurnalis mengakui pernah mengalami kekerasan fisik saat meliput kasus lingkungan, dan hampir semuanya bekerja tanpa perlindungan yang memadai.

Dari segi aktor kekerasan, di Indonesia, pelaku kekerasan tidak hanya berkategori preman (14,8%), tetapi juga aparat pemerintah (12,9%), anggota polisi dan perusahaan (masing-masing 11,7%) (AJI, 2025). Kasus intimidasi terhadap jurnalis di Halmahera, Maluku yang meliput tambang nikel memperlihatkan bagaimana kepentingan aktor ekonomi ekstraktif memanipulasi kekuasaan negara untuk membungkam kritik.

Swa-sensor: Kekerasan Struktural Tak Terlihat

Selain kekerasan dari pihak eksternal, baik dari aparat keamanan, preman maupun perusahaan, kami juga menemukan adanya praktik swasensor di ruang redaksi dan oleh individu jurnalis terkait pemberitaan isu lingkungan hidup yang sangat merugikan publik. Fenomena ini tidak kalah berbahaya dibandingkan kekerasan fisik, karena menggambarkan ketakutan internal jurnalis untuk menulis isu sensitif.

Swasensor adalah bentuk kekerasan struktural yang mematikan fungsi sosial jurnalisisme (Couldry & Mejias, 2019). Konsep ini berakar dari gagasan Johan Galtung (1969) tentang *structural violence*, kekerasan yang tidak langsung, tetapi menghambat manusia untuk mengekspresikan diri secara bebas. Dalam konteks media, tekanan struktural (politik, ekonomi, dan kepemilikan) membuat jurnalis kehilangan otonomi untuk menulis, melaporkan kebenaran. Dalam jurnalisisme, bentuk ini muncul sebagai *self-censorship* atau swasensor, ketika jurnalis menghindari liputan sensitif karena takut pada represi atau kehilangan pekerjaan. UNESCO (2021, *The Chilling: Global Trends in Online Violence Against Women Journalists*) menyebut bahwa efek kekerasan terhadap jurnalis tidak berhenti pada serangan langsung, tetapi juga

menciptakan “*chilling effect*”, suasana ketakutan yang mendorong swasensor massal. Dengan kata lain, swasensor adalah hasil dari kekerasan yang sistematis dan terinstitusionalisasi, bukan pilihan individu semata.

Dalam laporan riset ini, kami melihat swasensor sebagai upaya koreksi internal oleh jurnalis atau editor atas berita yang mereka buat dalam situasi ketakutan, baik ketakutan terhadap kondisi struktural ekonomi atau politik. Misalnya risiko kehilangan pekerjaan. Ini memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan perburuan. Riset Tapsell (2018) dan Lim (2012) juga menunjukkan bahwa kepemilikan media yang terkonsentrasi, diikuti praktek politisasi dan intervensi politik ke redaksi (Masduki, dkk. 2025) di Indonesia mendorong banyak jurnalis untuk melakukan *self-censorship* dalam upaya mempertahankan pekerjaan atau menghindari tuntutan hukum (terutama lewat UU ITE dan pasal pencemaran nama baik).

Dalam banyak kasus, investigasi pencemaran atau deforestasi dihentikan karena alasan keamanan atau oleh adanya intervensi dari para pemilik media. Dari perspektif ekonomi, algoritma, iklan, dan kepemilikan media bekerja bersama sebagai bentuk sensor baru atas kerja jurnalisisme yang lebih halus daripada represi negara.

Sebelum reformasi 1998 atau selama era Orde Baru, praktik swasensor dilakukan oleh dan dalam formula represi keamanan dan politik. Beberapa penelitian sebelumnya, misalnya yang dilakukan Dhakidae (1991) serta Sen dan Hill (2001), mengungkap tentang represi Orde Baru ini dan dampaknya bagi media massa di Indonesia saat itu. Upaya kontrol oleh penguasa Orde Baru ini misalnya dilakukan oleh Departemen Penerangan yang bisa sewaktu-waktu mencabut SIUPP (Surat Izin Usaha Pers) jika dianggap mengancam kepentingan ekonomi politik rezim berkuasa. Pengalaman pernah dibredel dan sederet represi lainnya membuat redaksi media saat itu menerapkan *self-censor* atau swasensor. Sekalipun tidak ada aturan tertulis isu mana yang boleh ditulis dan tidak, dan bagaimana cara menulisnya, namun melalui pengalaman sehari-hari dalam proses penyuntingan berita oleh jajaran redaksinya, banyak jurnalis saat itu cenderung menulis secara lebih berhati-hati, apalagi jika menyangkut sosok penguasa dan keluarganya, serta proyek-proyek pemerintah.

Tumbangnya Orde Baru ditandai dengan melonggarnya kontrol langsung terhadap media di Indonesia. Pada tahun 1999, pemerintahan Presiden BJ. Habibie menerbitkan Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam UU ini, istilah kebebasan disepakati menjadi kemerdekaan. Secara resmi, sensor terhadap media nyaris tiada lagi. Media bebas menyuarakan apa saja, sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik. Kebebasan itu disambut dengan menjamurnya media-media baru, utamanya di bidang pertelevisian. Selain itu, pada era ini juga ditandai dengan karakter informasi yang disajikan dengan lebih lugas. Selama hampir 20 tahun media di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik dan jurnalis cenderung bebas menulis secara kritis, sekalipun kekerasan dan tekanan tetap terjadi, namun jauh berkurang dibandingkan semasa Orde Baru.

Namun demikian, memburuknya ekosistem media, terutama karena disrupsi digital dan pasca pandemi COVID-19, telah melemahkan struktur ekonomi media. Kini, sebagian perusahaan media lebih tergantung pada kue iklan dari perusahaan, yang mayoritas industri ekstraktif, selain dari dana iklan pemerintah, pusat maupun daerah. Sebagian media juga menjalin kontrak bisnis jangka panjang dengan perusahaan tambang. Kontrak-kontrak ini akan mengecualikan, menghindari atau minimal menghalangi kinerja media untuk melakukan kritik melalui jurnalistik terhadap pemerintah atau perusahaan terkait, sehingga melahirkan praktik swasensor baru dengan motif terutama tekanan ekonomi.

Selain itu, saat ini muncul tren konten jurnalisme kolaborasi, yaitu peliputan yang dibiayai langsung oleh perusahaan atau pemerintah, yang biasanya akan mengglorifikasi keberhasilan mereka, dan pada gilirannya akan cenderung menjadi ajang *green washing*. Konten kolaborasi ini lebih menyerupai iklan atau advertorial, namun dalam kemasan berita, kebanyakan tidak diberi keterangan sebagai iklan atau advertorial. Kalaupun ada keterangan, redaksi sengaja menyamarkan sehingga publik sulit mendeteksinya. Situasi ini menunjukkan bahwa konsepsi dan idealisme tentang pagar api (*fairwall*), pemisahan prinsip kerja antara jurnalis dan pekerja di sektor bisnis media telah diabaikan.

Dalam situasi yang kompleks dan berisiko di atas, kami mencatat bahwa sebagian media jurnalisme tetap berupaya kritis di tengah represi politik-ekonomi, walaupun gaya penulisannya bisa berbeda-beda. Sebagian media menulis dengan gaya yang lebih 'santun'. Bedanya, di era Orde Baru prinsip pagar api masih bisa dijaga. Semangat perlawanan dan kritik juga cukup solid. Namun, saat ini swasensor terutama melalui represi ekonomi yang menjadi sumber penghidupan media justru mendisrupsi pagar api. Swasensor lebih merusak, karena menghancurkan pagar api dan independensi media dalam mengungkapkan fakta lapangan atau kebenaran demi menjaga keberlanjutan usaha.

Rekomendasi: Memperbaiki Ekosistem

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, krisis otonomi jurnalis peliput isu lingkungan terjadi secara berlapis dan kompleks. Ada tekanan ekonomi dan politik. Model bisnis berbasis klik dalam sistem dan budaya digital menyingkirkan jurnalisme investigatif yang memerlukan waktu dan biaya tinggi. Sebagaimana ditulis McChesney (2015), liberalisasi media telah mengubah berita sebagai produk sosial menjadi produk ekonomi atau komoditas. Sementara itu, bisnis media yang memburuk dan suasana ketakutan kehilangan pekerjaan bagi jurnalis melahirkan bentuk baru swasensor karena kekhawatiran terhadap sumber ekonomi mereka, yang didominasi industri ekstraktif dan anggaran pemerintah.

Terhadap swasensor karena tekanan keamanan ekonomi, riset ini merekomendasikan perlunya penguatan jejaring dalam jurnalisme berkualitas, sebagai pilar demokrasi. Untuk swasensor karena tekanan ekonomi, peluang untuk mengatasinya adalah

memperbaiki sumber pendapatan media, sehingga tidak tergantung pada pendanaan pemerintah atau perusahaan ekstraktif. Rekomendasi ini tidak mudah oleh karena ketidakpastian ekonomi. Solusi lain membangun model bisnis publik dan independen seperti *crowdfunding* atau penguatan pola *membership journalism*. Contoh baik datang dari beberapa media jurnalisme independen yang mengembangkan ekosistem pendanaan kolektif demi menjaga independensi editorial. Mereka antara lain **Jaring.Id**, Project Multatuli dan **Konde.co**.

Di tengah represi yang berlapis seperti diuraikan di atas, solidaritas menjadi strategi bertahan hidup bagi institusi media dan jurnalis. Organisasi jurnalis AJI, organisasi khusus jurnalis lingkungan seperti SIEJ, dan jejaring masyarakat sipil kini memperkuat pelatihan keamanan, membangun mekanisme respon cepat, dan memperluas kolaborasi lintas daerah. Model liputan kolaboratif yang melibatkan para pegiat jurnalisme investigasi terbukti efektif memperluas jangkauan dan mengurangi risiko kerja dalam konteks individu. Sebagaimana dikatakan Thomas Hanitzsch (2019), kolaborasi lintas redaksi adalah bentuk baru adaptasi jurnalisme terhadap tekanan struktural di era disrupsi.

Jurnalisme lingkungan bukan hanya soal melaporkan bencana kepada publik, tetapi juga menggugat sistem atau struktur kuasa yang melahirkan bencana itu (Klein, 2014). Untuk itu, dibutuhkan perubahan struktural di empat level:

1. Negara harus menjamin keselamatan jurnalis sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Media harus mengembalikan fungsi sosialnya sebagai ruang publik.
3. Lembaga pendidikan jurnalistik perlu membekali calon jurnalis dengan etika ekologis dan pengetahuan ilmiah isu lingkungan.
4. Masyarakat perlu mendukung media independen yang berpihak pada advokasi hak hak mereka pelestarian dan lingkungan hidup.

Akhirnya, riset ini telah menunjukkan dan menemukan dua hal utama. Pertama, profil jurnalis peliput isu lingkungan yang cenderung berwarna dari sisi demografis. Kedua, profil dan kondisi umum jurnalis peliput isu lingkungan yang rentan mengalami kekerasan secara fisik dan di ruang digital. Berdasarkan temuan riset, kami menyampaikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas jurnalisme lingkungan sebagai berikut.

1. Kekerasan terhadap jurnalis yang menaikkan isu lingkungan cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya pendataan terus menerus, sebagai rujukan pengambilan keputusan, reformasi kebijakan, pendampingan mereka selaku korban dan potensial korban di masa depan.
2. Pendampingan kepada jurnalis dapat dilakukan oleh asosiasi perusahaan media, organisasi jurnalis dll antara lain dengan pelatihan untuk memperkuat keahlian teknis dan memperkaya pengetahuan isu lingkungan. Misalnya training *safety of journalist*. Kegiatan ini seharusnya terjadwal dan sistematis

melibatkan semua pihak terkait. Secara khusus, diperlukan kerja mitigasi dan tindakan darurat misalnya atas terjadinya intimidasi dari pihak massa yang pro kepada aktor perusak lingkungan, misalnya kelompok sosial radikal dan kelompok preman.

3. Riset ini menunjukkan urgensi perlindungan atas jurnalis perempuan yang mendapat tugas melakukan peliputan kasus lingkungan, mengingat riset ini menemukan fakta mereka kurang mendapatkan perlindungan dari kantor media tempat bekerja.
4. Secara umum, seluruh asosiasi media dan jurnalis harus solid dalam mendorong negara atau pemerintah untuk hadir dalam mencegah kekerasan terhadap jurnalis lingkungan, karena kerusakan lingkungan pasti akan menyengsarakan masyarakat. Dalam skala internasional, perlu konsolidasi gerakan perlawanan berskala global atas kekerasan jurnalis dan impunitas atas kasus-kasus pembunuhan jurnalis lingkungan.
5. Dari perspektif regulasi di Indonesia, revisi beberapa UU yang terkait kerja media dan jurnalis investigasi sangat diperlukan. Antara lain: UU KUHP, UU Perlindungan Data Pribadi PDP, UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU ITE, UU Cipta Kerja.
6. Dalam konteks manajemen media, penguatan lembaga media/newsroom atau dalam kerangka kerja UNESCO sebagai ***sustainability of quality journalism*** perlu diupayakan, secara khusus terkait peluang mengakses sumber pendanaan yang terbebas dari ketergantungan kepada dana korporasi ekstraktif dan pemerintah.
7. Selain dukungan kepada media arus utama, dukungan kepada media-media alternatif di Indonesia yang memuat karya investigasi isu lingkungan semakin diperlukan. Krisis multidimensi yang dihadapi media arus utama atau konvensional masih berlangsung lama dan peran kontrol sosial mereka mulai digantikan media alternatif.

Sebagai penutup, kami ingin mengutip pernyataan seorang jurnalis di Maluku Utara yang diwawancara untuk laporan ini: "Bumi sedang tidak baik-baik saja. Tapi yang lebih menyedihkan, suara orang yang mencoba memberitakannya juga dibungkam." Kalimat ini merangkum krisis yang kita hadapi bahwa ketika jurnalis dibungkam, maka alam kehilangan suaranya. Maka melindungi jurnalis lingkungan berarti melindungi dan melestarikan bumi itu sendiri. Karena di setiap berita tentang hutan yang hilang atau laut yang tercemar, terselip satu pertanyaan: Apakah kita (Indonesia) masih mempunyai keberanian untuk mendengarkan alam berbicara, melalui mereka yang menjadikannya suara?

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustina, D. (2019). *Integritas Aktivis Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Jurnalisme*
- Anderson, A. (1997), *Media, Culture, and Environment*. London. UCL Press. Bandung. Simbiosis Rekatama.
- Abrar, A.N. (1993). *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Aziz, M. (2010). *Pelaporan Masalah Lingkungan dalam Buku: Pedoman untuk Wartawan*.
- Albert L. Hester & Wai Lan J (eds.). Penerjemah: Abdullah Alamudi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Badri, M. (2011). *Paradigma Jurnalisme Sensitif Bencana: Komunikasi Bencana*. Setio Budi
- HH (ed.). Yogyakarta: Buku Litera. (2013). *Jurnalisme Siber*. Pekanbaru: Riau Creativa Multimedia.
- Curran, J. dan Gurevitch, M. (2000). *Mass Media and Society*. London: Edward Arnold.
- Friedman, S.M. dan Friedman, K.A. (1989). Environmental Journalism: Guardian of the Asian Commons, *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 31:5, 6-37.
- Golding, P. dan Murdock, G. (1991). *The Political Economy of the Media*. London: Edward Elgar Publishing.
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press.
- Keating, M. (1993). *Covering The Environment: A Handbook of Environmental Journalism*. The University of Western Ontario
- Kovach. B dan Rosensteel, T. (2001). *Nine Elements of Journalism*. London: Goldsmith Book
- Kutanegara, P.M, dkk. (2014). *Membangun Masyarakat Indonesia Peduli Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Masduki (2009). Environmental Journalism in Indonesia. Paper presented in 18th APFEJ Congress of Environmental Journalists, Sri Lanka, October, 19-22.

- Masduki dan Muchtar, N. (2021). *Jurnalis di Indonesia: Antara Otonomi dan Intervensi*. Yogyakarta: UII Press.
- Masduki, Arif, A., Galuh, F., Wendratama, E., Suci, P. L. N. (2025). *Potret jurnalis Indonesia 2025: Demografi, budaya kerja, kompetensi digital, dan kekerasan terhadap jurnalis*. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
<https://aji.or.id/data/potret-jurnalis-indonesia-2025-demografi-budaya-kerja-kompetensi-digital-dan-kekerasan>
- Makuba, N. (2024). Masyarakat Adat di Papua Selatan Menderita Akibat Proyek Strategis Nasional. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
<https://www.aman.or.id/news/read/1884>
- Mawel, B., Tanjung, E., Nigtyas, I., Musdalifah., & Sasmito. (2021). *Kebebasan Pers Memburuk di Tengah Pandemi: Catatan AJI atas situasi kebebasan pers di Indonesia 2021*. Aliansi Jurnalis Independen.
https://aji.or.id/upload/article_doc/Kebebasan_Pers_Memburuk_di_Tengah_Pandemi.pdf
- Mocatta, G. (2024). *Environmental Journalism*. Open School of Journalism.
- Priyonggo, A., Haryanto, I., Pramadiba, I. I., Winaldi, I., & Prestianta, A. M. (2024). *Lanskap dan dampak digitalisasi terhadap model bisnis serta dinamika redaksi industri media di Indonesia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Rademakers, L. (2004). *Examining The Handbooks of Environmental Journalism: A Qualitative Documents Analysis & Response to the Literature*. University of South Florida
- Rizky, R. (2010). *Isu Lingkungan Hidup dalam Media Massa: Media dan Komunikasi Lingkungan*. Endri Listiani & Askurifa'i Baksin (eds.). Bandung: Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba dan Litera.
- Romli, A.S.M. (2012). *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sudibyo, A. (2014). *34 Prinsip Etis Jurnalisme Lingkungan; Panduan Praktis untuk Jurnalis*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Simon, J. 2009. Unnatural Disaster: The Crisis of Environmental Journalism, *World Policy Journal*, Vol. 26(1), pp. 87-94.
- Wendratama, E., Suci, P. L., Suriyani, L. D., Masduki. (2023). *Laporan riset: Keamanan digital perusahaan media di Indonesia*. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
<https://aji.or.id/system/files/2024-10/ajilaporan-riset-keamanan-digital-perusahaan-media-di-indonesiafinal.pdf>

Jurnal :

Lingkungan Hidup yang Berkualitas. Ct *ALATHU: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No. 1

Burgess, K., Mayiga, J-B., Mandi, N. A. (2024). Press and Planet in Danger. UNESCO.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389501>

Dian Utami, R. Dan Bharata, B. Praktek Jurnalisme Lingkungan dalam pemberitaan pembangunan Pabrik Semen di kawasan Pegunungan Kendeng Rembang (Analisis Framing Praktek Jurnalisme Lingkungan dalam Pemberitaan Pembangunan Pabrik Semen di Kawasan Pegunungan Kendeng Rembang pada Media Mongabay.co.id Periode Februari-Agustus 2014).

Hanitzsch, T. (2001). Rethinking Journalism Education in Indonesia: Nine Theses. *MediaTOR*, Vol. 2(1):93-100.

Iswari, A. (1992). Media coverage of environmental issue in Indonesia. In Seminar-Workshop on Environmental Policies and Media Reporting, Singapore, 27-31 January 1992. Singapore: Asian Mass Communication Research & Information Centre.

Putri Aisyiah Rahma Dewi. Praktik Jurnalisme Lingkungan oleh *Harian Jawa Pos*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 15, Nomor 2, November 2011

Patel, S. (2006). Island Understand- ing: Environmental Journalism in The South Pacific. *Pacific Journalism Review*.

Palen, J.P. (1999). Objectivity as Independence: Creating the Society of Environmental Journalists, 1989-1997, *Science Communication*, Vol. 21(2): 156-171.

Parahita, G. (2017). The Practice of Indonesia's Environmental Reporters: Competence and Challenges. *Asian Journal of Media and Communication*, Vol 1 No. 1

Pavlik, J. (2000). The Impact of Technology on Journalism, *Journalism Studies*, Vol. 1 No. 2

Pedroso de Hollanda, J., Kaapa, P., Costa, L. (2022). Environmental Journalism: Characteristics and Interfaces in developing Field. *Intercom Journal*.

Suyanto. Jurnalisme Lingkungan Hidup di Media Massa.

Surjadi, H. (2008). Green City:" Indonesian Newspaper Launches Weekly Environmental Report.
<https://www.icfj.org/news/green-city-indonesian-newspaper-launches-weekly-environmental-report>

Van Witsen, A., & Takahashi, B. (2018). Knowledge-based Journalism in Science and Environmental Reporting: Opportunities and Obstacles. *Environmental Communication*, 12(6), 717–730.
<https://doi.org/10.1080/17524032.2018.1455723>

Whitney, D. (2005). Environmental Journalism's New Focus. *Television Week*. Vol. 26.

Website :

Collins, S. (2023). The Challenges and Rewards of Environmental Journalism. SLEJF.
<https://environmentaljournalists.org/the-challenges-and-rewards-of-environmental-journalism/>

INDEKS BUKU

A

advertorial · 65, 66, 75, 92, 93, 94, 99
Air dan sanitasi · 26
Aktivisme digital · 15
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) · 2, 12, 22, 87, 103
aliran dana · 77
animal agriculture · 8
Aparatur pemerintah · 30, 32, 34
asosiasi perusahaan media · 23, 100

B

bencana ekologis · ii
Berita berbayar · 94
biodiversitas · 8, 48, 79
Biosentris · 5
bisnis tambang · 96
buzzer · 2, 14

C

cat calling · 37
climate change · 15
Committee of Protect Journalist (CPJ) · 2
Cybertroop · 14

D

deforestasi · 8, 98
degradasi sumber daya alam · 6
demografi jurnalis · 16
disrupsi digital · 6, 11, 13, 99
distributed denial-of-service (DDoS) · 14
Doxing · 31

E

ekonomi politik media · 9
ekosistem media · 99
energi terbarukan · 48
Energi terbarukan · 26
ESG · 73, 93

F

Fellowship · 108
firewall · 46, 75, 94
Food Estate · 49, 50, 60, 65
Freedom House · 3

G

gastronomi · 43
gatekeeper · v, 9, 59, 61, 90, 93
green press · 5
green washing · 62, 99

H

hak asasi manusia · i, 100, 108
hak atas air bersih · i
hubungan sosial · 1

I

impunitas · 1, 2, 101
industri ekstraktif · i, iii, 70, 99
intervensi negara · iii
Intimidasi · 13, 41, 50, 54

J

jurnalis perempuan · iv, vi, 11, 12, 36, 37, 41, 56, 95, 101
jurnalisme data · 11
jurnalisme investigasi · 11, 97, 100
Jurnalisme konstruktif · 77
Jurnalisme lingkungan · i, 4, 6, 7, 84, 100
Jurnalisme sensitif bencana · 5

K

kampanye kebencian · i
Keanekaragaman hayati · 26
Kebebasan pers · 2
Kekerasan digital · v, 31
kekerasan fisik · i, iii, v, 11, 14, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 53, 55, 58, 66, 67, 88, 95, 96, 97
Kekerasan fisik · 12
kepentingan publik · ii, 9, 10, 61, 91
Komnas HAM · 37, 38, 40
kriminalisasi hukum · i
krisis iklim · ii, 26, 42, 48
Krisis iklim · 26

L

liberal pluralism · v, 9
limbah medis · 41
Lingkungan hidup · i
liputan investigasi · iii, 8, 16, 53, 69, 83
LPSK · 37, 38, 40

M

Masyarakat adat · 26
media alternatif · 101, 108
media independen · 100
media sebagai ruang publik · 10
media visit · 80, 94
mitigasi risiko · 54, 55, 58, 69

O

oligarki · 4, 95
otonomi editorial · 2
Otonomi jurnalis · 2

P

Pelecehan seksual · 14
pembela HAM · 1, 14
Pidanaaan · 12, 33
pencemaran industri · 6
Peran jurnalis lingkungan · 7
perdagangan satwa liar · 26
peretasan akun · i, 13
perlindungan jurnalis · 1, 2, 87
perubahan iklim · 6, 79
politik digital · 15
Politik digital · 15
Proyek Strategis Nasional (PSN) · 26, 42, 66, 96

R

Rempang Eco-city · 96

Revolusi teknologi · 4, 13
Reporters san Frontiers (RSF) · 3

S

serangan digital · i, vi, 11, 14, 32, 51, 57
Serangan digital · 13, 32
Silent Spring · 5
SLAPP (*strategic lawsuit against public participation*) · 96
Social engineering · 31
Soft news · 25
Swasensor · vi, 38, 60, 63, 69, 88, 97, 99

T

tata kelola lingkungan · 9
teknologi digital · 4, 13
Teror dan intimidasi · 13
transisi energi · 61

U

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik · ii, 96
UNESCO · 1, 2, 11, 35, 39, 95, 97, 101, 104
UU Cipta Kerja · 101
UU Informasi dan Transaksi Elektronik · 14
UU Keterbukaan Informasi Publik · 101
UU Perlindungan Data Pribadi · 101
UU Pers · iii

BIODATA PENELITI/PENULIS

Masduki adalah dosen tetap dan Guru Besar bidang Media dan Jurnalisme, pada Program Studi Ilmu Komunikasi UII. Ia telah lama berkiprah dalam advokasi regulasi dan pengkajian sistem penyiaran di Indonesia melalui organisasi seperti Pemantau Regulasi dan Regulator Media, Rumah Perubahan LPP, Koalisi Nasional Reformasi Pe-nyiaran (KNRP) dan Aliansi Jurnalis Independen. Mengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, sejak 2004-sekarang. Menulis buku: *Penyiaran Indonesia: Dari Otoriter ke Liberal* (2007) dan *Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Dunia* (2017). Disertasinya pada University of Munich, Jerman (2019): *Public Service Broadcasting and Post-Authoritarian Indonesia* terbit pada Palgrave Macmillan (Springer Nature, London) Desember 2020. Tulisan Masduki juga telah dimuat di beberapa jurnal internasional bereputasi, seperti *Journalism Studies*, *Asian Journal of Communication*, *GAZETTE*, *Journal of Digital Media & Policy*, *Media History*, *Interactions* dan *MEDIA ASIA*. Masduki menekuni studi media, kebebasan berekspresi, demokrasi digital, perbandingan tata kelola media publik; dan aktivisme media.

Ahmad Arif, menjadi wartawan di Kompas sejak 2003. Menekuni bidang sains, lingkungan, dan bencana. Memiliki ketertarikan membangun media alternatif dan citizen science dengan turut mendirikan Project Multatuli, LaporCovi-19, Lapor Iklim, dan Nusantarafoodbiodiversity.org. Menamatkan pendidikan Fakultas Teknik UGM, Magister Sosiologi UI, dan mendapatkan pelatihan jurnalistik dari seperti Jefferson Fellowship on food security (2025), Pulitzer Center grantee (2022-2023-2025), Japan Foundation Fellowship on disaster reporting (2013-2014), Inwent-IIIJ Berlin on environment journalism (2009). Arif menerbitkan sejumlah buku jurnalistik seperti *Jurnalisme Bencana*, *Bencana Jurnalisme* (2010) dan buku sains populer termasuk empat buku tentang seri pangan Nusantara: *Sagu Papua untuk Dunia* (2019), *Sorgum Benih Leluhur untuk Masa Depan* (2020), *Masyarakat Adat dan Kedaulatan Pangan* (2021), dan *Buah Leluhur dari Pohon Kehidupan* (2025).

Febrina Galuh P. adalah Direktur Eksekutif di Aliansi Jurnalis Independen(AJI) Indonesia, sejak Mei 2021. Febrina memiliki keahlian dalam manajemen proyek, komunikasi, dan relasi media, dengan fokus pada isu kebebasan pers, hak asasi manusia, dan fact checking. Febrina adalah co-founder CekFakta.com (2018), inisiatif kolaboratif pengecekan fakta terbesar di Indonesia, dan juga membantu mendirikan PFMSea.org, kolaborasi untuk memantau isu kebebasan pers di Asia Tenggara. Ia berkontribusi pada beberapa riset AJI, termasuk “Potret Jurnalis Indonesia 2025” , Laporan Penilaian Penggunaan AI di Media (2024), dan riset Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan (2022). Febrina sedang menempuh studi Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia (2024-saat ini) , dan telah mendapatkan pelatihan formal seperti Global Media Forum and Hate Speech Workshop (DW, Jerman, 2024) dan Digital Media to Counter Disinformation and Hate Speech (RNTC, Belanda, 2023).

Anastasya Andriarti adalah jurnalis yang sudah bekerja di industri media selama dua dekade dan juga pengajar jurnalistik di sejumlah universitas sejak 2005. Saat ini menjadi jurnalis di Independen.id dan mengajar di Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Bakrie. Memiliki ketertarikan penelitian pada bidang media, jurnalistik, dan komunikasi lingkungan khususnya setelah menuntaskan penelitian masternya terkait strukturasi di ruang redaksi TV merah dalam kasus bencana industri. Salah satu peraih hibah Cek Fakta dari Google News Initiative-Koalisi Cek Fakta pada 2023 ini, mendapatkan pendidikan formal di bidang komunikasi dan manajemen media di Universitas Indonesia.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan/Kuisisioner Survei

Riset Situasi Jurnalis Isu Lingkungan

Teman-teman yang kami hormati,

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dengan dukungan Kemitraan melakukan riset untuk melihat situasi jurnalis isu lingkungan. Riset tersebut akan diawali dengan penyebaran survei kepada 100 jurnalis di Indonesia.

Harapannya, riset ini dapat memberikan gambaran situasi kekerasan (ancaman/serangan) terhadap jurnalis (termasuk jurnalis perempuan) dalam pemberitaan isu lingkungan hidup, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi situasi serangan kepada jurnalis lingkungan dan menggambarkan serta menganalisis instrumen perlindungan dan jangkauan perlindungan dari serangan terhadap jurnalis (negara dan organisasi yang menaungi jurnalis). Pada akhir penelitian kami juga akan menyusun rekomendasi kebijakan untuk penguatan perlindungan terhadap jurnalis secara umum dan secara khusus terhadap jurnalis yang menyiarkan isu lingkungan hidup.

Untuk itu, kami mengharapkan kesediaan Anda menjawab 29 pertanyaan kuesioner ini, sesuai pengalaman dan pengetahuan Anda.

Data pribadi yang Anda isikan akan dirahasiakan dan dilindungi sebaik mungkin, tidak akan muncul dalam publikasi apa pun kecuali atas izin dari Anda, dan hanya digunakan untuk kepentingan riset ini. Kami akan memberikan penggantian pulsa kepada responden sebesar Rp. 50,000,-. Mohon tuliskan nomor hp Anda di akhir pertanyaan riset jika Anda menginginkan penggantian tersebut.

Bila ada pertanyaan dan tanggapan terkait survei ini, Anda bisa menghubungi kami melalui program@ajiindonesia.or.id atau putri@ajiindonesia.or.id. Terima kasih banyak atas partisipasinya!

Tim peneliti AJI Indonesia

1. Email*

Profil Responden

2. 1. Nama/Inisial*

3. 2. Gender*

Mark only one oval.

☐ Laki-laki ☐ Perempuan ☐ Non-biner

4. 3. Usia*
Mark only one oval.
☐ 25 tahun ke bawah ☐ 26–30 tahun ☐ 31–35 tahun ☐ 36–40 tahun ☐ 41–45 tahun
☐ 46–50 tahun ☐ 51–55 tahun ☐ 56 tahun ke atas
5. 4. Domisili*
Mark only one oval.
☐ Aceh ☐ Sumatera Utara ☐ Sumatera Selatan ☐ Sumatera Barat ☐ Bengkulu ☐ Riau ☐ Kepulauan Riau ☐ Jambi ☐ Lampung ☐ Kepulauan Bangka Belitung ☐ Kalimantan Barat ☐ Kalimantan Timur ☐ Kalimantan Selatan ☐ Kalimantan Tengah ☐ Kalimantan Utara ☐ Banten ☐ DKI Jakarta ☐ Jawa Barat ☐ Jawa Tengah ☐ DI Yogyakarta ☐ Jawa Timur ☐ Bali ☐ Nusa Tenggara Timur ☐ Nusa Tenggara Barat ☐ Gorontalo ☐ Sulawesi Barat ☐ Sulawesi Tengah ☐ Sulawesi Utara ☐ Sulawesi Tenggara ☐ Sulawesi Selatan ☐ Maluku Utara ☐ Maluku ☐ Papua ☐ Papua Barat ☐ Papua Tengah ☐ Papua Pegunungan ☐ Papua Selatan ☐ Papua Barat Daya
6. 5. Pendidikan terakhir*
Mark only one oval.
☐ SLTP ☐ SLTA ☐ Diploma ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3
7. 6. Lama bekerja sebagai jurnalis (sepanjang karier)*
Mark only one oval.
☐ < 1 tahun ☐ 1–5 tahun ☐ 6–10 tahun ☐ 11–15 tahun ☐ > 15 tahun
8. 7. Status kepegawaian di tempat kerja saat ini*
Mark only one oval.
☐ Pegawai tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ☐ Pegawai kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ☐ Pekerja mandiri (freelance) ☐ Kontributor
9. 8. Posisi/jabatan saat ini*
Mark only one oval.
☐ Pemimpin redaksi ☐ Redaktur pelaksana ☐ Editor ☐ Reporter ☐ Peneliti ☐ Penyiar ☐ Host ☐ Produser ☐ Fotografer ☐ Desainer grafik ☐ Other:
10. 9. Apakah Anda tergabung dalam asosiasi jurnalis?*
Mark only one oval.
☐ Ya, Skip to question 11 ☐ Tidak, Skip to question 12

Asosiasi Jurnalis

11. 9b. Jika Ya, Anda tergabung dalam asosiasi apa?
Mark only one oval.
☐ AJI ☐ IJTI ☐ PWI ☐ SIEJ ☐ Other:
12. 10. Dimana wilayah Anda meliput?*
Mark only one oval.
☐ Domisili ☐ Nasional/ Seluruh Indonesia

13. 11. Apakah Anda pernah mengikuti pendidikan/ pelatihan jurnalistik? Seperti: * (Dapat pilih lebih dari satu jawaban)
Check all that apply.
☐ Teknik reportase ☐ Investigasi ☐ Penulisan ☐ Kode Etik Jurnalistik ☐ SOP Keamanan Peliputan ☐ Peliputan isu tematik ☐ Tidak pernah mengikuti pelatihan jurnalistik apapun
14. 12. Jenis media tempat Anda bekerja saat ini *
Mark only one oval.
☐ Daring ☐ Televisi ☐ Cetak ☐ Radio ☐ Lintas platform
15. 13. Spesialisasi liputan yang Anda kerjakan *
Mark only one oval.
☐ Hard news (lebih mendesak, langsung, singkat) ☐ Soft news (tidak bersifat mendesak, lebih menekankan sisi human interest) ☐ Hard news dan soft news (generalis) ☐ Investigasi
16. 14. Seberapa sering Anda meliput isu lingkungan *
Mark only one oval.
☐ Setiap minggu ☐ Dua minggu sekali ☐ Satu bulan sekali ☐ Enam bulan sekali ☐ Setahun sekali
17. 15. Topik atau isu lingkungan yang pernah diliput selama setahun terakhir * (Dapat pilih lebih dari satu jawaban)
Check all that apply.
☐ Pertambangan ☐ Perkebunan ☐ Sampah dan pencemaran lingkungan ☐ Penebangan hutan ☐ Polusi dan pencemaran udara ☐ Konflik agraria ☐ Sinergitas program pemerintah dengan masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan ☐ Kesehatan lingkungan ☐ Isu dan kebijakan sosial ☐ Pembangunan berkelanjutan ☐ Masyarakat adat ☐ Isu korupsi di sektor lingkungan ☐ Perdagangan karbon ☐ Keanekaragaman hayati ☐ Proyek Strategi Nasional (PSN) ☐ Air dan sanitasi ☐ Perburuan & perdagangan satwa liar ☐ Krisis iklim ☐ Other:
18. 16. Bagaimana Anda mendeskripsikan diri Anda dengan tema liputan yang diliput *
Mark only one oval.
☐ Spesialis lingkungan ☐ Generalis
19. 17. Apa saja yang mempengaruhi liputan Anda sebagai jurnalis lingkungan *

20. 18. Apa tantangan Anda meliput isu lingkungan? * (Dapat pilih lebih dari satu jawaban)
Check all that apply.
☐ Kompleksitas isu ☐ Biaya Liputan ☐ Keamanan fisik ☐ Keamanan Digital ☐ Tidak adanya dukungan redaksi ☐ Tingkat keterbacaan rendah ☐ Ketersediaan data dan narasumber ☐ Other:

Untitled Section

Ada lima opsi jawaban untuk tiap pernyataan di bawah ini. Jika mengisi dengan ponsel, mungkin lima opsi jawaban tidak tampak semua, jadi Anda bisa menggeser layar ponsel Anda untuk melihatnya.

21. 19. Apakah Anda pernah mengalami kekerasan fisik (seperti di bawah ini) selama melakukan liputan tentang isu lingkungan?

Mark only one oval per row

	Tidak pernah	Jarang	Kadang	Sering	Sangat Sering
Serangan fisik	☐	☐	☐	☐	☐
Ancaman atau pelecehan lisan	☐	☐	☐	☐	☐
Perusakan atau perampasan hasil / alat liputan	☐	☐	☐	☐	☐
Serangan fisik yang bersifat seksual	☐	☐	☐	☐	☐
Ancaman atau pelecehan lisan yang bersifat seksual	☐	☐	☐	☐	☐

22. 20. Siapakah yang menjadi pelaku kekerasan/serangan tindak kekerasan tersebut? *
 (Dapat pilih lebih dari satu jawaban. Jika Anda menjawab pernah mengalami, mohon jelaskan siapa pelakunya)

Check all that apply.

☐ Polisi ☐ TNI ☐ Jaksa ☐ Aparatur pemerintah ☐ Organisasi masyarakat ☐ Warga ☐ Perusahaan ☐ Partai politik ☐ Pekerja professional ☐ Preman ☐ Tidak pernah ☐ Other:

Untitled Section

Ada lima opsi jawaban untuk tiap pernyataan di bawah ini. Jika mengisi dengan ponsel, mungkin lima opsi jawaban tidak tampak semua, jadi Anda bisa menggeser layar ponsel Anda untuk melihatnya.

23. 21. Apakah Anda pernah mengalami kekerasan digital (seperti di bawah ini) selama melakukan liputan tentang isu lingkungan?

Mark only one oval per row

	Tidak pernah	Jarang	Kadang	Sering	Sangat Sering
Penyebaran rumor/fitnah	☐	☐	☐	☐	☐
Doxing (penyebaran informasi pribadi korban dengan tujuan mengancam dan mengganggu)	☐	☐	☐	☐	☐
Intersepsi/penyadapan (pelaku menyimpan dan membaca komunikasi/lalu lintas internet korban)	☐	☐	☐	☐	☐
Peniruan identitas (pembuatan akun palsu atas nama korban)	☐	☐	☐	☐	☐
Peretasan/pengambilalihan akun media sosial	☐	☐	☐	☐	☐
Social engineering (taktik manipulasi psikologis supaya	☐	☐	☐	☐	☐

korban memberikan akses terhadap akun, perangkat, atau data pribadi)					
Phishing (tindakan pencurian informasi dengan mengarahkan korban untuk masuk ke halaman/situs palsu)	☐	☐	☐	☐	☐
Serangan digital berbasis gender (misalnya pelecehan secara verbal melalui teks dan audio visual, hingga ancaman kekerasan fisik terkait gender korban)	☐	☐	☐	☐	☐
Ancaman dan intimidasi yang bukan berbasis gender (mencakup ancaman kekerasan, pembunuhan, hingga intimidasi terkait konten jurnalistik) di ranah digital	☐	☐	☐	☐	☐
Diawasi/stalked	☐	☐	☐	☐	☐

24. 22. Siapakah yang menjadi pelaku kekerasan/serangan tindak kekerasan tersebut? *
(Dapat pilih lebih dari satu jawaban. Jika Anda menjawab pernah mengalami, mohon jelaskan siapa pelakunya)
Check all that apply.

☐ Polisi ☐ TNI ☐ Jaksa ☐ Aparatur pemerintah ☐ Organisasi masyarakat ☐ Warga ☐ Perusahaan ☐ Partai politik ☐ Pekerja professional ☐ Preman ☐ Tidak pernah ☐ Other:

Ada lima opsi jawaban untuk tiap pernyataan di bawah ini. Jika mengisi dengan ponsel, mungkin lima opsi jawaban tidak tampak semua, jadi Anda bisa menggeser layar ponsel Anda untuk melihatnya.

25. 23. Apakah Anda pernah mengalami kekerasan lain di luar fisik dan digital (seperti di bawah ini) selama melakukan liputan tentang isu lingkungan? *
Mark only one oval per row.

	Tidak pernah	Jarang	Kadang	Sering	Sangat Sering
Pemidanaan atau kriminalisasi terkait kerja jurnalistik	☐	☐	☐	☐	☐
Diskriminasi gender di tempat kerja	☐	☐	☐	☐	☐

26. 24. Siapakah yang menjadi pelaku kekerasan/serangan tindak kekerasan tersebut? *
(Dapat pilih lebih dari satu jawaban. Jika Anda menjawab pernah mengalami, mohon jelaskan siapa pelakunya)
Check all that apply.

☐ Polisi ☐ TNI ☐ Jaksa ☐ Aparatur pemerintah ☐ Organisasi masyarakat ☐ Warga ☐ Perusahaan ☐ Partai politik ☐ Pekerja professional ☐ Preman ☐ Tidak pernah ☐ Other:

27. 25. Khusus untuk jurnalis perempuan, apa saja bentuk kekerasan yang Anda alami dalam liputan selain yang disebutkan di atas?

28. 26. Ketika mengalami hal tersebut pada nomor 19, 21 dan 23 apakah Anda mendapat bantuan (misalnya bantuan hukum, pengobatan, bantuan moril maupun pengurangan jam kerja) dari pihak-pihak sebagai berikut*

Mark only one oval per row.

	Iya, mendapat dukungan	Tidak mendapat dukungan	Tidak pernah mengalami semua jenis kekerasan di no. 5
Perusahaan media (pemilik, editor)	☐	☐	☐
Kolega dari kantor sendiri	☐	☐	☐
Kolega dari kantor lain	☐	☐	☐
Asosiasi Jurnalis	☐	☐	☐
Pemerintah	☐	☐	☐
Lembaga Negara (LPSK, Komnas HAM dan Komnas Perempuan)	☐	☐	☐
Polisi	☐	☐	☐
LSM (Lembaga Non Profit)	☐	☐	☐

29. 27. Apa saja bentuk hambatan dalam redaksi selama meliput isu lingkungan?* (Dapat pilih lebih dari satu jawaban)

Check all that apply.

☐ Swasensor oleh jurnalis ☐ Penghapusan data tertentu oleh editor ☐ Penundaan penayangan liputan ☐ Pelarangan liputan isu tertentu ☐ Pembatalan penayangan berita ☐ Pengurangan dan peniadaan anggaran ☐ Tidak ada hambatan sama sekali ☐ Other:

30. 28. Apa saja bentuk dukungan yang sudah tersedia bagi jurnalis lingkungan?* (Dapat pilih lebih dari satu jawaban)

Check all that apply.

☐ Akses terhadap pengetahuan mengenai lingkungan ☐ Akses terhadap pelatihan jurnanisme lingkungan ☐ Hibah pendanaan atau beasiswa ☐ Dukungan media tempat bekerja ☐ Jejaring masyarakat sipil ☐ Other:

Untitled Section

Ada lima opsi jawaban untuk tiap pernyataan di bawah ini. Jika mengisi dengan ponsel, mungkin lima opsi jawaban tidak tampak semua, jadi Anda bisa menggeser layar ponsel Anda untuk melihatnya.

31. 29. Apa pandangan Anda terhadap bantuan atau dukungan dalam liputan lingkungan dari pemangku kepentingan di bawah ini (dari sisi kemananan, pendanaan, akses ke sumber data, bantuan hukum, dll)*

Mark only one oval per row.

	Baik	Sangat Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Pemerintah daerah	☐	☐	☐	☐	☐

Lembaga Negara (LPSK, Komnas HAM & Komnas Perempuan)	☐	☐	☐	☐	☐
Dewan Pers	☐	☐	☐	☐	☐
Organisasi wartawan	☐	☐	☐	☐	☐
Lembaga Bantuan Hukum	☐	☐	☐	☐	☐
Organisasi Masyarakat Sipil (WALHI, Greenpeace)	☐	☐	☐	☐	☐
Perusahaan Media	☐	☐	☐	☐	☐
Tidak ada dukungan	☐	☐	☐	☐	☐

32. Anda bisa menggunakan kolom ini untuk mengklarifikasi, menambahkan informasi, dan pengalaman terkait kekerasan selama liputan yang belum ditanyakan dalam survei di atas.*

33. Apakah Anda bersedia dihubungi oleh Tim Peneliti AJI Indonesia untuk wawancara mendalam?*

Mark only one oval.

☐ Ya ☐ Tidak

34. Nomor kontak*

Kami akan memberikan pengganti pulsa sebesar Rp. 50.000,- pada 100 responden secara acak. Jika berkenan silakan tuliskan no handphone Anda dalam kolom ini, atau tulis "Tidak" jika tidak berkenan.

Terima kasih atas bantuan Anda!

Jangan lupa untuk klik Kirim/Submit!

"Jurnalis lingkungan adalah aktivis HAM.

*Isu lingkungan bertalian erat dengan hajat hidup orang banyak,
dan hak konstitusional warga negara untuk mengetahui dinamika
pembangunan lingkungan yang adil dan aman.*

*Namun, jurnalis yang meliput isu lingkungan
di area industri ekstraktif menghadapi risiko ganda berupa kekerasan fisik
maupun serangan digital dengan proteksi yang sangat terbatas."*

- Tim Peneliti -